

DINAMIKA KONFLIK POLITIK DI PAPUA 1998 – 2001

(Sebuah Tinjauan Terhadap Faktor Yang Meningkatkan Gerakan
Kemerdekaan Di Papua)

SKRIPSI



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1)
Pada
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Asal	Hadiah	Klass
	Rembelian	324.759 80
Terima	: Tgl, 04 MAR 2003	yul
Oleh :	No. Induk. SKS	d
		c.1

Yuke Yuliantaries

NIM : 960910101250

PEMBIMBING:

Drs. Asrial Aziz

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2003

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

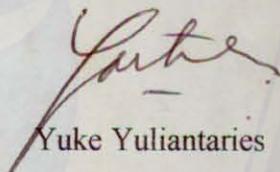
Nama : Yuke Yuliantaries Desrianto

NIM : 960910101250

Sebagai penulis menyatakan bahwa "SKRIPSI INI MERUPAKAN HASIL KARYA TULIS SENDIRI" dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan ini berasal dari sumber-sumber yang sah dan diketahui.

Demikian pernyataan saya tersebut yang dibuat dengan sebenar-benarnya

Jember, 27 Februari 2003


Yuke Yuliantaries

Motto

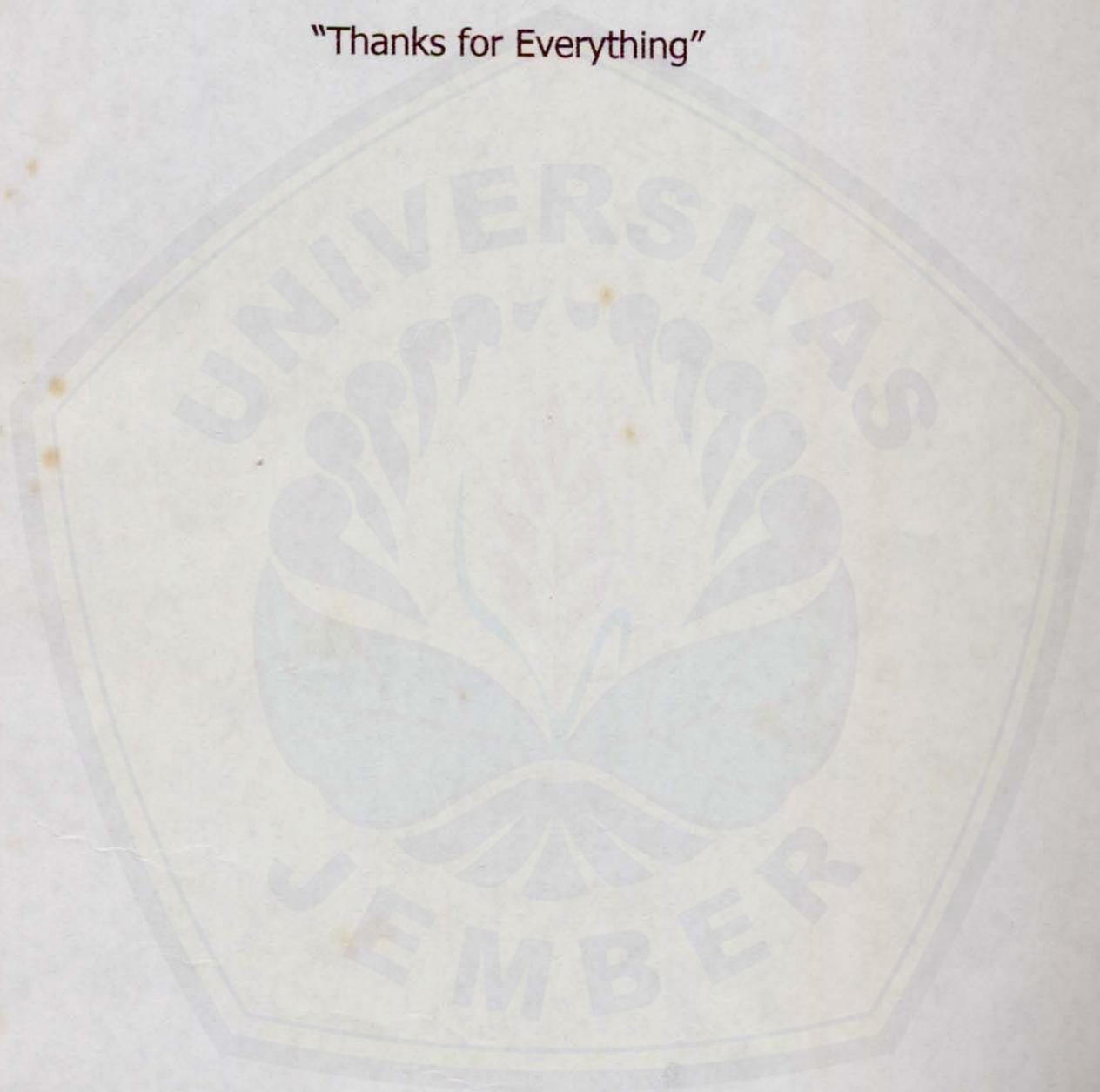
**“Pertarungan terbesar dalam hidup ini adalah
mengalahkan diri sendiri”**

Sumber : Penulis

PERSEMBAHAN

Untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta
(Didik Astiawan – Srie Umiati)
Beserta segenap keluarga besar Maesan

“Thanks for Everything”



PENGESAHAN

Diterima oleh dan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi
guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S1)

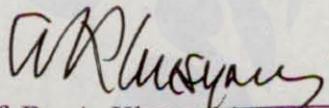
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional

Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

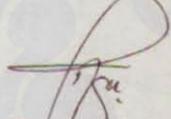
Pada Hari : Kamis
Tanggal : 27 Februari 2003
Pukul : 09.00 WIB

Panitia Penguji,

Ketua

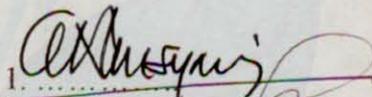
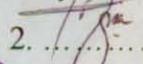
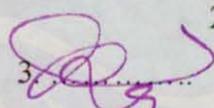
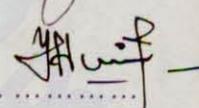

(Prof. Dr. A. Khusyairi, MA)

Sekretaris


(Drs. Asrial Aziz)

Susunan Anggota Panitia Penguji :

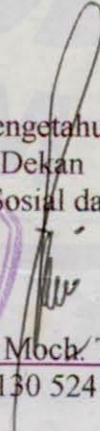
1. Prof. Dr. A. Khusyairi, MA
2. Drs. Asrial Aziz
3. Drs. Pra Adi S.
4. Dra. Sri Yuniati, MS.i

1. 
2. 
3. 
4. 

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T. karena atas berkah, rahmat dan hidayahnyalah, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tulisan yang berjudul “Dinamika Konflik Politik di Papua 1998 – 2001” ini mencoba untuk menganalisa suatu fenomena pergolakan politik yang terjadi di tanah Papua berdasarkan pada faktor-faktor yang meningkatkan aksi atau gerakan kemerdekaan Papua pada kurun waktu 1998 s/d 2001. Berbagai macam kejadian yang menggambarkan adanya konflik politik yang semakin menghangat setelah dimulainya era reformasi berusaha dipaparkan secara kronologis dalam tulisan skripsi ini.

Masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini, akan tetapi diharapkan mampu memberikan sumbangan moral bagi perjuangan politik rakyat Papua. Selain itu penggunaan teori konflik dalam karya tulis ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan dan penyelesaian konflik politik yang terjadi di Papua.

Penulis sangat menyadari bahwa didalam penyelesaian skripsi ini telah mendapatkan banyak bantuan moral yang sangat besar. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Asrial Aziz, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, kritik dan saran yang “luar biasa” kepada penulis.
2. Drs. Nuruddin M. Yasin, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
3. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Agus Tri Hartono S.Sos., selaku dosen waliku yang sering memberikan sumbangan kritik dan saran sejak 1996.
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademik FISIP Universitas Jember.
6. Bapak – Ibu ku, yang telah memberikan segalanya untukku.
7. Adikku Ifriko Desriandi
8. Keluarga Maesan (Bude Liek & Niek).
9. Dodit Soelaksono, yang banyak membantu penyelesaian skripsi ini.
10. Bentot Y.S.Y yang telah banyak menyumbangkan data-data untuk skripsiku.

11. Farouk, Nurul Aini, dan teman teman lain yang terus menerus memberi support kepadaku dalam merampungkan skripsi ini.
12. Semua temen-temen HI '96 Go for another Vacation???
13. Tak lupa... terima kasih buat semua yang udah mendukung aku dalam penulisan skripsi ini!!!!

Penulis senantiasa berdoa, semoga Allah S.W.T. memberikan segala rahmatnya atas dukungan yang sudah diberikan kepada penulis. Pada akhirnya penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Jember, 27 Februari 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 ALASAN PEMILIHAN JUDUL	1
I.2 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN	7
I.3 PERMASALAHAN	8
I.4 KERANGKA DASAR TEORI	10
I.5 HIPOTESA	12
I.6 METODE PENELITIAN	13
I.6.1 METODE PENGUMPULAN DATA	13
I.6.2 TAHAP ANALISA DATA	14
I.7 PENDEKATAN	14
BAB II GAMBARAN UMUM PAPUA	16
II.1 LATAR BELAKANG DAN LETAK GEOGRAFIS PAPUA	16
II.2 PAPUA, AWAL DAN SEJARAH SEBUAH NAMA	16
II.3 PAPUA DI MASA KOLONIALISASI BELANDA	17
II.4 PAPUA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	19
II.4.1 PAPUA DAN PROSES INTEGRASI 1962-1969	19
II.4.2 PAPUA DALAM WAJAH PEMBANGUNAN RI	21
II.4.2.1 KONDISI SOSIAL BUDAYA	21
II.4.2.2 KONDISI SOSIAL EKONOMI	25
II.4.2.3 KONDISI SOSIAL POLITIK	27
BAB III DINAMIKA KONFLIK POLITIK DI PAPUA	29
III.1 KRONOLOGI MENINGKATNYA KONFLIK POLITIK DI PAPUA	29
III.1.1 UNJUK RASA BERDARAH PADA TAHUN 1998	30
III.1.2 PERKEMBANGAN ASPIRASI MERDEKA PADA TAHUN 1999	32
III.1.3 PELAKSANAAN KONGGRES RAKYAT PAPUA	36
III.1.4 MENINGGALNYA THEYS H. ELUAY	40
III.2 ORGANISASI PAPUA MERDEKA DAN SEPAK TERJANGNYA	41
III.2.1 CIKAL BAKAL LAHIRNYA OPM	42
III.2.2 PENYEBAB MUNCULNYA OPM	46

III.2.3	KIPRAH OPM DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN PAPUA	47
III.3	USAHA-USAHA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEREDAM GEJOLAK POLITIK DI PAPUA	50
BAB IV	SEBAB-SEBAB MENINGKATNYA GERAKAN KEMERDEKAAN DI PAPUA	53
IV.1	INTERNAL HISTORY	54
IV.2	KETIDAKADILAN YANG MENIMPA RAKYAT PAPUA	58
IV.2.1	EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM	59
IV.2.2	DOMINASI PENDATANG	62
IV.2.3	DOMINASI DAN PENINDASAN BUDAYA	65
IV.2.4	KEKERASAN MILITER	67
IV.3	PERGANTIAN KEKUASAAN NASIONAL/REFORMASI	68
IV.4	DUKUNGAN MASYARAKAT INTERNASIONAL	70
BAB V	KESIMPULAN	72
DAFTAR PUSTAKA		x
LAMPIRAN		
Peta Bumi Papua	xii
Laporan Hasil Kongres Papua	xiii
Kekayaan Sumber Daya Alam Papua	xiv



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Alasan Pemilihan Judul

Setelah pengunduran presiden Soeharto pada bulan Mei 1998, suhu politik di Papua yang merupakan propinsi yang paling timur, semakin memanas. Instabilitas politik yang terjadi menyusul tumbangnya rezim Orde Baru secara nyata telah meningkatkan aksi-aksi demonstrasi pendukung kemerdekaan Papua. Gelombang demonstrasi yang dipelopori oleh para mahasiswa di Papua menyerukan berbagai tuntutan yang pada dasarnya adalah adanya keinginan dari masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan dan gugatan masyarakat Papua untuk merdeka sebenarnya telah muncul sejak awal integrasi dengan Indonesia pada tahun 1962.

Sebelum integrasi, tepatnya pada tanggal 1 Desember 1961, rakyat Papua telah menyatakan kemerdekaannya yang ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora. Selain itu telah pula terbentuk dengan apa yang dinamakan Dewan New Guinea (Nieuw Guinea Raad), sebuah quasi-parlemen bagi negara Papua.¹ Namun lewat berbagai strategi dan pendekatan yang melibatkan pemerintah Belanda, Indonesia dan PBB, wilayah dan masyarakat Papua yang telah menyatakan kemerdekaannya diintegrasikan kedalam wilayah Indonesia, 1 Mei 1963 melalui New York Agreement 15 Agustus 1962. Hal ini yang menimbulkan perlawanan dari sebagian masyarakat Papua. Selama kurang lebih 35 tahun berintegrasi dengan Indonesia, telah terjadi serangkaian konflik politik di wilayah Papua. Berbagai kebijaksanaan yang dibuat pemerintah pusat dan dianggap merugikan masyarakat Papua menjadi sumber bagi munculnya konflik yang berkepanjangan. Kemudian kegagalan pusat dalam menyelesaikan konflik tersebut semakin menambah kekecewaan masyarakat Papua dan ini bermuara pada timbulnya gelombang protes bahkan pemberontakan terhadap pemerintah

¹ Ikrar Nusa Bhakti, "*Aspek-aspek Internasional dalam Integrasi Nasional : Suatu Tinjauan Empiris Atas Kasus Irian Jaya*", Analisis CSIS XXIII No.5, 1994, hlm.395.



UNIVERSITAS JEMBER
 Perpustakaan
 Jl. Sekeloa Utara No. 25 Jember
 Telp. (0331) 421311

Sumber : Kompas Fokus Minggu 25 November 1999

Perpustakaan
 Jl. Sekeloa Utara No. 25 Jember
 Telp. (0331) 421311

KABUPATEN JAWAPURA
 Ibu kota Jayapura
 Luas Wilayah 61.493 km²
 Jumlah Penduduk 155.261 jiwa**
 Jumlah Rumah Tangga Miskin (1999) 11.300
 PDRB/kapita (1999) Rp 3.443.296
 Tahap eksplorasi 2.093.695,62 ha
 Logam Dasar (Tahap eksplorasi) 10.660,9 ton
 Produk Perikanan

KABUPATEN JAWAWIAYA
 Ibu kota Wamena
 Luas Wilayah 52.916 km²
 Jumlah Penduduk 398.918 jiwa**
 Jumlah Rumah Tangga Miskin (1999) 93.200
 PDRB/kapita (1999) Rp 1.335.189
 Tahap eksplorasi 590.618 ha
 Produk Perikanan

KABUPATEN MERAUKE
 Ibu kota Merauke
 Luas Wilayah 119.749 km²
 Jumlah Penduduk 307.343 jiwa**
 Jumlah Rumah Tangga Miskin (1999) 37.000
 PDRB/kapita (1999) Rp 2.745.393
 Tahap eksplorasi 3.518.775,98 ha
 Produk Perikanan

KOTA JAYAPURA
 Ibu kota Jayapura
 Luas Wilayah 940 km²
 Jumlah Penduduk 171.875 jiwa**
 Jumlah Rumah Tangga Miskin (1999) 2.700
 PDRB/kapita (1999) Rp 4.400.712
 Luas Hutan Produksi 199.662,78 ha

KABUPATEN BIAK NUMFOR
 Ibu kota Biak
 Luas Wilayah 3.130 km²
 Jumlah Penduduk 106.808 jiwa**
 Jumlah Rumah Tangga Miskin (1999) 8.000
 PDRB/kapita (1999) Rp 3.673.358
 Luas Hutan Produksi 581.063,14 ha
 Produk Perikanan

KABUPATEN YAPEN WAROPEN
 Ibu kota Serui
 Luas Wilayah 18.746 km²
 Jumlah Penduduk 75.727 jiwa**
 Jumlah Rumah Tangga Miskin (1999) 4.000
 PDRB/kapita (1999) Rp 3.326.503
 Tahap eksplorasi 1.205.191,88 ha
 SDA Nonmigas Tembaga, Emas, Nikel (Tahap eksplorasi) 9.251,8 ton
 Produk Perikanan

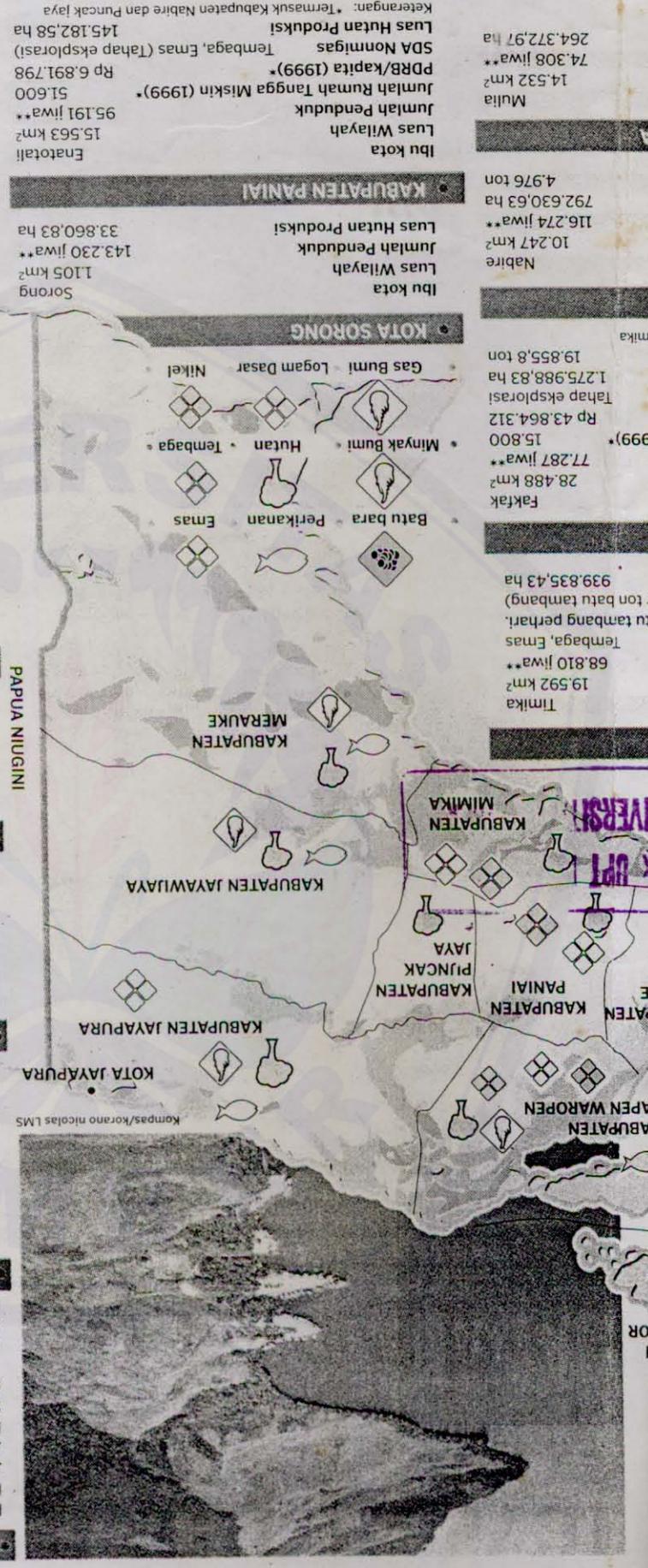
KABUPATEN MANOKWARI
 Ibu kota Manokwari
 Luas Wilayah 37.901 km²
 Jumlah Penduduk 181.194 jiwa**
 Jumlah Rumah Tangga Miskin (1999) 14.100
 PDRB/kapita (1999) Rp 6.604.548
 Tahap eksplorasi 1.695.213,50 ha
 SDA Gas Bumi Cadangan terbukti: 14,3 triliun kaki kubik
 SDA Minyak Bumi Cadangan potensial: 9,3 triliun kaki kubik
 Batu bara (Tahap Eksplorasi) 26.204,6 ton
 Produk Perikanan

KOTA JAWAPURA
 Ibu kota Jayapura
 Luas Wilayah 940 km²
 Jumlah Penduduk 171.875 jiwa**
 Jumlah Rumah Tangga Miskin (1999) 2.700
 PDRB/kapita (1999) Rp 4.400.712
 Luas Hutan Produksi 199.662,78 ha

KOTA SORONG
 Ibu kota Sorong
 Luas Wilayah 1105 km²
 Jumlah Penduduk 143.230 jiwa**
 Luas Hutan Produksi 33.860,83 ha

KABUPATEN PANIAI
 Ibu kota Nabire
 Luas Wilayah 10.247 km²
 Jumlah Penduduk 116.274 jiwa**
 Luas Hutan Produksi 792.630,63 ha
 Produk Perikanan

KOTA MIMIKA
 Ibu kota Mimika
 Luas Wilayah 19.855,8 ton
 Tahap eksplorasi 1.275.988,83 ha
 Faktak 939.835,43 ha
 (1999) Rp 43.864.312
 Jumlah Penduduk 77.287 jiwa**
 Produk Perikanan



0 50 100 km

Jaya Oh, Alangkah Kayamu, Alangkah Miskimu...



KOTA SORONG
KABUPATEN SORONG
KABUPATEN MANOKWARI
KABUPATEN FAKFAK
KABUPATEN MIMIKA
KABUPATEN NABIRE
KABUPATEN PUNCAK JAYA
KABUPATEN WAROPEN
KABUPATEN PANIAI
KABUPATEN SUPIORI
KABUPATEN SARMI
KABUPATEN TANIMBAR
KABUPATEN BINTAN
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN PANGKAJENE-ANDALENA
KABUPATEN GOWA
KABUPATEN MAROS
KABUPATEN TAKENGON
KABUPATEN ACEH TENGGARA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KABUPATEN ACEH BARAT
KABUPATEN ACEH SELATAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KABUPATEN ACEH BARAT
KABUPATEN ACEH SELATAN

... sumber daya alam ber-
 istikan menjadi magnet
 n. Termasuk kepentingan
 dengan kepentingan
 la perekonomian. Tak
 yang terdapat di bumi
 nya mulai berhsinar pada
 nda, Jean Jacques Dozy,
 mbaga berkedar tinggi:
 wilayah tak dikenal itu baru
 seorang manajer
 ur Company, yang
 McHohan Cooper and
 giatan eksplorasi dimulai
 ta ditanatangi! Feme-
 belumnya. PT Freeport



Kompas/korialis kewa emta

... sumber daya alam adalah (lebit dari) Rp 297 milyar. Sisanya, Rp 2,85 triliun untuk dana
 alokasi umum dan (lebit dari) Rp 238 milyar untuk bagi hasil dari pajak.
 Yang tadi diunggapkan baru sebatas sumber daya alam yang manfaatnya bisa langsung
 diambil. Masih terdapat sumber daya alam yang memerlukan upaya dan penanganan lebit
 serius hingga hasilnya dapat dirasakan, setidaknya untuk membuka lapangan
 kerja, seperti pantai dan penggunaan untuk pariwisata.
 Sayangnya, sepanjang 32 tahun Orde Baru, Irian Jaya dengan sumber daya alam berlimpah
 belum membuat penduduknya sejahtera. Sampai tahun 1999, jumlah penduduk miskin di
 provinsi ini tidak tangnung-tangnung, tak kurang dari 1.148.600 orang atau 53 persen dari
 jumlah seluruh penduduk. Kemiskinan absolut dijumpai di Kabupaten Paniai dan
 Jayawijaya, yakni 80 persen dari penduduk masing-masing kabupaten itu.
 Bagaimana rupa kemiskinan itu? Dalam sebulan, pengeluaran rata-rata per kapita
 penduduk Irian adalah Rp

KABUPATEN SORONG
 Ibu kota
 Luas Wilayah
 Luas Hutan
 Jumlah Penduduk
 Jumlah Rumah Tangga Miskin (1999)*
 PDRB/Kapita (1999)*
 SDA Minyak Bumi
 Cadangan potensial: 5.384.000 barel/hari
 Produkksi: 88.738.300 barel
 Cadangan potensial: 11.268.000 barel
 Produkksi: 25.870.000 kaki kubik/hari
 Cadangan potensial: 189,4 milyar kaki kubik
 Nikel (Tahap eksplorasi)
 Luas Hutan Produkksi
 Produkksi Perikanan
 Keterangan: * Termasuk Kota Sorong

KABUPATEN PUNCAK JAYA
 Ibu kota
 Luas Wilayah
 Luas Hutan Produkksi
 Produkksi Perikanan
 Keterangan: * Termasuk Kabupaten Mimika

KABUPATEN FAKFAK
 Ibu kota
 Luas Wilayah
 Luas Hutan Produkksi
 Produkksi Perikanan
 Keterangan: * Termasuk Kabupaten Mimika

KABUPATEN MIMIKA
 Ibu kota
 Luas Wilayah
 Luas Hutan Produkksi
 Produkksi Perikanan
 Keterangan: * Termasuk Kabupaten Mimika

... sumber daya alam ber-
 istikan menjadi magnet
 n. Termasuk kepentingan
 dengan kepentingan
 la perekonomian. Tak
 yang terdapat di bumi
 nya mulai berhsinar pada
 nda, Jean Jacques Dozy,
 mbaga berkedar tinggi:
 wilayah tak dikenal itu baru
 seorang manajer
 ur Company, yang
 McHohan Cooper and
 giatan eksplorasi dimulai
 ta ditanatangi! Feme-
 belumnya. PT Freeport

... sumber daya alam adalah (lebit dari) Rp 297 milyar. Sisanya, Rp 2,85 triliun untuk dana
 alokasi umum dan (lebit dari) Rp 238 milyar untuk bagi hasil dari pajak.
 Yang tadi diunggapkan baru sebatas sumber daya alam yang manfaatnya bisa langsung
 diambil. Masih terdapat sumber daya alam yang memerlukan upaya dan penanganan lebit
 serius hingga hasilnya dapat dirasakan, setidaknya untuk membuka lapangan
 kerja, seperti pantai dan penggunaan untuk pariwisata.
 Sayangnya, sepanjang 32 tahun Orde Baru, Irian Jaya dengan sumber daya alam berlimpah
 belum membuat penduduknya sejahtera. Sampai tahun 1999, jumlah penduduk miskin di
 provinsi ini tidak tangnung-tangnung, tak kurang dari 1.148.600 orang atau 53 persen dari
 jumlah seluruh penduduk. Kemiskinan absolut dijumpai di Kabupaten Paniai dan
 Jayawijaya, yakni 80 persen dari penduduk masing-masing kabupaten itu.
 Bagaimana rupa kemiskinan itu? Dalam sebulan, pengeluaran rata-rata per kapita
 penduduk Irian adalah Rp

... sumber daya alam adalah (lebit dari) Rp 297 milyar. Sisanya, Rp 2,85 triliun untuk dana
 alokasi umum dan (lebit dari) Rp 238 milyar untuk bagi hasil dari pajak.
 Yang tadi diunggapkan baru sebatas sumber daya alam yang manfaatnya bisa langsung
 diambil. Masih terdapat sumber daya alam yang memerlukan upaya dan penanganan lebit
 serius hingga hasilnya dapat dirasakan, setidaknya untuk membuka lapangan
 kerja, seperti pantai dan penggunaan untuk pariwisata.
 Sayangnya, sepanjang 32 tahun Orde Baru, Irian Jaya dengan sumber daya alam berlimpah
 belum membuat penduduknya sejahtera. Sampai tahun 1999, jumlah penduduk miskin di
 provinsi ini tidak tangnung-tangnung, tak kurang dari 1.148.600 orang atau 53 persen dari
 jumlah seluruh penduduk. Kemiskinan absolut dijumpai di Kabupaten Paniai dan
 Jayawijaya, yakni 80 persen dari penduduk masing-masing kabupaten itu.
 Bagaimana rupa kemiskinan itu? Dalam sebulan, pengeluaran rata-rata per kapita
 penduduk Irian adalah Rp

... sumber daya alam adalah (lebit dari) Rp 297 milyar. Sisanya, Rp 2,85 triliun untuk dana
 alokasi umum dan (lebit dari) Rp 238 milyar untuk bagi hasil dari pajak.
 Yang tadi diunggapkan baru sebatas sumber daya alam yang manfaatnya bisa langsung
 diambil. Masih terdapat sumber daya alam yang memerlukan upaya dan penanganan lebit
 serius hingga hasilnya dapat dirasakan, setidaknya untuk membuka lapangan
 kerja, seperti pantai dan penggunaan untuk pariwisata.
 Sayangnya, sepanjang 32 tahun Orde Baru, Irian Jaya dengan sumber daya alam berlimpah
 belum membuat penduduknya sejahtera. Sampai tahun 1999, jumlah penduduk miskin di
 provinsi ini tidak tangnung-tangnung, tak kurang dari 1.148.600 orang atau 53 persen dari
 jumlah seluruh penduduk. Kemiskinan absolut dijumpai di Kabupaten Paniai dan
 Jayawijaya, yakni 80 persen dari penduduk masing-masing kabupaten itu.
 Bagaimana rupa kemiskinan itu? Dalam sebulan, pengeluaran rata-rata per kapita
 penduduk Irian adalah Rp

... sumber daya alam adalah (lebit dari) Rp 297 milyar. Sisanya, Rp 2,85 triliun untuk dana
 alokasi umum dan (lebit dari) Rp 238 milyar untuk bagi hasil dari pajak.
 Yang tadi diunggapkan baru sebatas sumber daya alam yang manfaatnya bisa langsung
 diambil. Masih terdapat sumber daya alam yang memerlukan upaya dan penanganan lebit
 serius hingga hasilnya dapat dirasakan, setidaknya untuk membuka lapangan
 kerja, seperti pantai dan penggunaan untuk pariwisata.
 Sayangnya, sepanjang 32 tahun Orde Baru, Irian Jaya dengan sumber daya alam berlimpah
 belum membuat penduduknya sejahtera. Sampai tahun 1999, jumlah penduduk miskin di
 provinsi ini tidak tangnung-tangnung, tak kurang dari 1.148.600 orang atau 53 persen dari
 jumlah seluruh penduduk. Kemiskinan absolut dijumpai di Kabupaten Paniai dan
 Jayawijaya, yakni 80 persen dari penduduk masing-masing kabupaten itu.
 Bagaimana rupa kemiskinan itu? Dalam sebulan, pengeluaran rata-rata per kapita
 penduduk Irian adalah Rp

... sumber daya alam adalah (lebit dari) Rp 297 milyar. Sisanya, Rp 2,85 triliun untuk dana
 alokasi umum dan (lebit dari) Rp 238 milyar untuk bagi hasil dari pajak.
 Yang tadi diunggapkan baru sebatas sumber daya alam yang manfaatnya bisa langsung
 diambil. Masih terdapat sumber daya alam yang memerlukan upaya dan penanganan lebit
 serius hingga hasilnya dapat dirasakan, setidaknya untuk membuka lapangan
 kerja, seperti pantai dan penggunaan untuk pariwisata.
 Sayangnya, sepanjang 32 tahun Orde Baru, Irian Jaya dengan sumber daya alam berlimpah
 belum membuat penduduknya sejahtera. Sampai tahun 1999, jumlah penduduk miskin di
 provinsi ini tidak tangnung-tangnung, tak kurang dari 1.148.600 orang atau 53 persen dari
 jumlah seluruh penduduk. Kemiskinan absolut dijumpai di Kabupaten Paniai dan
 Jayawijaya, yakni 80 persen dari penduduk masing-masing kabupaten itu.
 Bagaimana rupa kemiskinan itu? Dalam sebulan, pengeluaran rata-rata per kapita
 penduduk Irian adalah Rp

Indonesia. Semakin lama masyarakat Papua menderita akibat berbagai kebijakan pusat semakin bulat dan mengkristal pula tekad untuk memerdekakan diri. Pada akhirnya, *issue* “kemerdekaan” tidak hanya dipandang sebagai wacana kultural atau protes ketidakpuasan terhadap kebijaksanaan pemerintah, namun telah bergeser menjadi agenda sentral perjuangan politik.

Tuntutan untuk merdeka ini mencapai klimaksnya sejak setahun terakhir dimulainya reformasi. Bendera Bintang Kejora (bendera kebangsaan Papua) telah dikibarkan di beberapa ibukota kabupaten di Papua dalam rentang waktu Juli 1998 hingga awal tahun 2000. Naiknya Habibie menjadi presiden ketiga Republik Indonesia tidak menyurutkan aksi-aksi demonstrasi di Papua, malah blunder politik yang dilakukan Habibie yakni pemberian persetujuan terhadap jajak pendapat di Timor Timur, yang berujung pada lepasnya Timor Timur dari RI, secara langsung semakin memacu pergolakan politik diberbagai wilayah RI termasuk di Papua. Selain itu gerakan kemerdekaan di Papua semakin menguat seiring dengan semakin cerah iklim keterbukaan politik, juga ditambah dengan adanya keyakinan bahwa dukungan internasional juga akan semakin menguat. Pada awal bulan Juli 1998 dan Oktober, terjadi serentetan demonstrasi di beberapa wilayah Papua. Demonstrasi-demonstrasi yang tidak sepenuhnya bisa dikatakan sebagai wujud demonstrasi damai telah menyebabkan terjadinya insiden penembakan demonstran oleh aparat keamanan di ibukota propinsi di Jayapura, dan di wilayah kabupaten Biak, penangkapan di Sorong dan Jayawijaya, hingga kerusuhan di Manokwari. Seorang mahasiswa dan seorang intel polisi meninggal di Jayapura. Tidak ada kejelasan jumlah korban jiwa dalam insiden di Biak, yang mana seorang telah dikabarkan meninggal di rumah sakit setempat dan dua orang lainnya meninggal sesaat setelah dilepas dari rumah tahanan.²

Ketegangan politik di Papua yang disulut oleh maraknya aksi Mahasiswa di Papua semakin diperburuk oleh masih eksisnya OPM (Organisasi Papua Merdeka) sebagai pelopor gerakan kemerdekaan dan anti Indonesia di Papua. Gerakan separatisme OPM ini secara radikal menuntut pemerintah RI untuk

² *Gatra*, 17 Juli 1999, hal.44

memberikan kemerdekaan kepada Papua. Isi dan corak perlawanan OPM berdasar pada semangat nasionalisme Papua yang dalam hal ini juga dicoba untuk disosialisasikan kepada sebagian masyarakat Papua yang masih terisolasi. Perjuangan oleh OPM dilakukan melalui cara diplomasi (Nasional maupun Internasional) maupun dengan cara kekerasan yakni menggelar kekuatan militer untuk berhadapan dengan kekuatan militer Indonesia. Dalam beberapa kasus, aktifitas gerilya yang dilakukan oleh OPM telah memaksa pemerintah RI untuk melakukan beberapa operasi militer termasuk melakukan pendakwaan dan penangkapan pada mereka yang terlibat dalam usaha pemberontakan, pengibaran bendera dan beberapa bentuk demonstrasi lainnya pada akhirnya menyebabkan berbagai penderitaan pada masyarakat sipil. Fenomena lain yang berkenaan dengan keberadaan OPM adalah pengembangan strategi stigmatisasi GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) oleh kelompok militer kepada semua orang yang menentang kebijaksanaan pemerintah. Telah banyak warga lokal yang bereaksi memprotes kebijaksanaan pemerintah tiba-tiba dikenai stigma OPM / GPK. Hal semacam inilah yang kerap membungkam keinginan masyarakat Papua untuk menyuarakan hak-haknya, tentu saja hal ini membuat warga lokal semakin tertekan dan menderita.

Berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer terhadap warga Papua segera mendapat reaksi keras dari dunia internasional. Pada tanggal 22 Mei 1998, Kongres Amerika Serikat secara resmi mengirimkan surat kepada presiden Habibie, dimana surat tersebut menyoroti tentang pelanggaran HAM di Indonesia dan desakan agar pemerintah RI memberikan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.³ Surat dari kongres AS ini selain memicu maraknya demonstrasi dan tindakan-tindakan separatis di Irian,⁴ juga pada kenyataannya telah meletakkan Indonesia pada posisi yang tertekan, hal ini disadari ketika sorotan AS mengenai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dilontarkan akan menjadi fokus perhatian Internasional dan mendorong publik internasional untuk

³ Surat dari kongres AS ditandatangani oleh 16 senator diantaranya adalah Robert F. Kennedy.

⁴ Gatra, 11 Juli 1998 hlm. 42

ikut-ikutan mengecam Indonesia, sehingga pada akhirnya Indonesia akan menjadi bulan-bulanan pihak-pihak yang anti Indonesia.

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan kompromi politik sebagai sebuah upaya rekonsiliasi antara pemerintah RI dengan Papua. Pada bulan oktober 1998 pemerintahan Habibie mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua,⁵ pencabutan status DOM ini juga menandai peralihan status anggota TNI menjadi penjaga keamanan di Papua. Jadi secara politis pencabutan DOM dan peralihan status anggota TNI ini diharapkan bisa menjauhkan kesan bahwa keberadaan militer di Papua hanya untuk memberangus pihak-pihak yang membangkang pemerintah pusat. Pada kesempatan lain, Habibie menyetujui usulan untuk mengadakan Dialog Nasional antara Pemerintah Pusat dengan perwakilan masyarakat Papua. Walaupun sempat tertunda beberapa kali namun akhirnya Dialog Nasional dapat dilaksanakan pada bulan Februari 1999.⁶ Dialog Nasional ini mempertemukan Presiden dengan perwakilan masyarakat Papua. dalam forum tersebut untuk pertama kalinya sejak integrasinya dengan RI, perwakilan masyarakat Papua menumpahkan isi hatinya kepada Presiden RI, B.J. Habibie yakni aspirasi "M" (Merdeka). Perwakilan masyarakat Irian menyatakan bahwa masyarakat Papua sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintah RI, penderitaan rakyat Papua selama 38 tahun sudah cukup menjadi alasan untuk tidak lagi berintegrasi dengan Indonesia. oleh karena itu, presiden diminta untuk mengakui kedaulatan sekaligus memberi kemerdekaan kepada Papua. Menanggapi tuntutan ini, Habibie hanya meminta kepada masyarakat Papua untuk merenungkan kembali tuntutannya tersebut.⁷

Forum Dialog nasional yang terjadi pada bulan Februari 1999 menjadi momen penting bagi kelanjutan proses penyelesaian konflik di Papua, hal ini disebabkan Dialog nasional masih menyisakan riak-riak kontroversi baik dikalangan pemerintah pusat maupun bagi masyarakat Papua secara umum.

⁵ Human Right Watch, "*Indonesia : Violence and Political Impasse In Papua*", <http://www.Reliefweb.Ini>

⁶ 26 Februari 1999, Dialog Nasional mempertemukan presiden RI dengan perwakilan masyarakat Irian Jaya yang disebut "Team 100" dan diketuai oleh Tom Beanal.

⁷ Theo P.A. Van den Broek and J. Budi Hermawan, *Memoria Passionis di Papua*, Jakarta, LSPP 2001, hlm.7

Tuntutan aspirasi "M" yang disampaikan dalam Dialog Nasional jelas sangat sulit dikabulkan oleh pemerintah RI. Namun dalam pembicaraan selanjutnya pemerintah RI menawarkan beberapa solusi kepada masyarakat Irian yakni adanya pemekaran wilayah Papua menjadi tiga bagian dan pemberian status "O" (Otonomi)⁸ kepada Provinsi Papua. Walaupun tawaran dari pemerintah pusat tersebut masih belum memuaskan hati masyarakat Papua, tapi setidaknya pemerintah pusat telah membuka jalan bagi kemungkinan terjadinya bargaining politik selanjutnya.

Mundurinya Habibie dari kursi kepresidenan RI yang kemudian memunculkan nama Abdurahman Wahid sebagai Presiden baru di Indonesia sebenarnya memunculkan harapan baru bagi masyarakat Papua dalam penyelesaian konflik di Papua. Tetapi para pendukung kemerdekaan Papua kembali memunculkan tuntutan untuk merdeka bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Papua 1 Desember 1999, selain tuntutan merdeka para pendukung gerakan kemerdekaan juga mengibarkan bendera Bintang Kejora di beberapa kota di Papua. Kondisi ini kontan saja kembali memicu ketegangan antara aparat pemerintah dengan massa pro kemerdekaan. Sempat terjadi beberapa insiden yang berkenaan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, dilaporkan terdapat beberapa korban tewas akibat bentrokan antara aparat keamanan dengan massa pro kemerdekaan.⁹

Untuk meredakan ketegangan yang terjadi di Papua, presiden Abdurahman Wahid melakukan kunjungan ke Papua. Pada kesempatan tersebut presiden meminta maaf atas pelanggaran HAM di Papua dan menyetujui pergantian nama Papua menjadi Papua.¹⁰ Sedangkan keinginan dan harapan sebagian rakyat Papua untuk merdeka secara tegas ditolak oleh presiden, pemerintah RI tetap bersikeras mempertahankan Papua sebagai wilayah Integral dari RI. Selanjutnya sebagai presiden pertama yang terpilih secara demokratis, presiden Abdurahman Wahid kemudian lebih mengupayakan pendekatan yang

⁸ *Ibid*, hlm. 13

⁹ *Kompas*, 3 Desember 2000.

¹⁰ Theo P.A. Van den Broek ofm, *Op.Cit.*, hlm. 64.

lebih bersifat dialogis ketimbang pendekatan militeristik dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di Papua. Beberapa langkah positif yang diusahakan oleh Gus Dur dalam usaha menata kembali keadaan di Papua sekaligus meredakan ketegangan politik yang terjadi adalah (1) Pengurangan jumlah personel militer di wilayah Papua yang bertujuan untuk menghilangkan trauma warga sipil Papua terhadap segala bentuk kekerasan yang pernah dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Indonesia. (2) Pergantian nama propinsi Irian Jaya menjadi propinsi Papua (3) Pembicaraan mengenai rencana pemberian otonomi khusus bagi Propinsi Papua. (4) Pengangkatan beberapa putra daerah sebagai pejabat tinggi negara ¹¹(5) Membuka dialog yang luas dalam rangka menampung aspirasi masyarakat.

Dinamika konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Papua sejak terintegrasinya Papua kedalam wilayah Republik Indonesia merupakan fenomena yang sangat menarik untuk terus diperhatikan. Proses tarik ulur dalam bargain politik antara pemerintah RI dengan rakyat papua terus bergerak mengikuti perkembangan politik di Indonesia pada umumnya. Keinginan kuat Indonesia untuk mempertahankan Papua sebagai bagian integral dari RI telah melahirkan sejumlah kebijaksanaan kontroversial dalam sejarah integrasi Papua ke tubuh NKRI. "Pengeksporan" armada militer di Papua berbuntut pada penciptaan birokrasi militer yang bertugas dalam rangka mempertahankan kesatuan RI sehingga mereka melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukannya. Sementara itu pelaksanaan transmigrasi sebagai program asimilasi antara penduduk pendatang dengan warga lokal tidak berhasil dicapai. Para penduduk pendatang cenderung bergerak mendominasi diberbagai sektor kehidupan. Sedangkan penduduk asli memperoleh perlakuan yang diskriminatif dari birokrasi sipil maupun militer. Kenyataan ini yang membuat penduduk asli menjadi termarginalisasikan, padahal sebagai pemegang hak adat seharusnya penduduk asli bisa menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan SDA ditanah kelahirannya. Lama-kelamaan keadaan ini menumbuhkan kekecewaan yang mendalam terhadap

¹¹ Freddy Numberi, putra asli Papua, (Gubernur Irian Jaya 1997-1999) diangkat menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam Kabinet Reformasi, oleh Presiden Abdurahman Wahid.

kebijaksanaan pemerintah pusat yang dinilai diskriminatif bagi warga lokal. Sikap dan perasaan kecewa ini kemudian mengikis dan menghapus semangat “ke-Indonesian” warga Papua. sebaliknya hal ini ternyata menggugah *sense of identity* sebagian besar masyarakat Papua dalam bentuk nasionalisme Papua. Menguatnya semangat nasionalisme Papua telah membawa masyarakat Papua pada sebuah keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Dinamika dari berbagai peristiwa / konflik politik yang terjadi dikawasan Papua sepanjang tahun 1998 hingga tahun 2001 inilah yang menjadi ujung pangkal dari ketertarikan penulis untuk mendalami kajian ini dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“Dinamika konflik politik di Papua 1998-2001
(Sebuah Tinjauan Terhadap Faktor Yang Meningkatkan Gerakan
Kemerdekaan Papua)”**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah, perlu kiranya ditentukan suatu batasan atau ruang lingkup permasalahan . Hal ini berguna untuk memfokuskan permasalahan yang hendak dibahas sehingga tidak terjadi kekaburan makna dari tujuan penulisan, sehingga penulisan lebih bisa mengarah pada pokok permasalahan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Sutrisno Hadi :

“Sekali suatu pokok permasalahan ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok permasalahan tersebut. Bagi penyelidik sendiri penegasan ini akan menjadi pedoman kerja , dan bagi orang lain kepada siapa laporan research itu hendak disajikan atau diserahkan, penegasan selalu berfungsi mencegah kerancuan pengertian dan kekaburan wilayah permasalahan.”¹²

Dalam melakukan pembatasan ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penulis, yaitu mengenai pembatasan waktu dan pembatasan materi. Sesuai dengan judul diatas, maka penulis lebih memfokuskan bahasan pada rentang waktu 1998 hingga 2001. Dengan asumsi bahwa sejak turunnya presiden suharto pada mei 1998 pergolakan politik di Papua memanas kembali, hal ini

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hal. 56.

ditandai oleh semakin meningkatnya aksi demonstrasi mahasiswa Irian menuntut kemerdekaan Irian kepada pemerintah RI. Selain itu aksi separatisme yang dilakukan oleh OPM juga telah memicu ketegangan di wilayah Papua. Hingga tahun 2001 situasi dan kondisi di wilayah Papua masih terus bergolak, ini menandakan bahwa masih belum tercapai sebuah kesepakatan yang memuaskan bagi rakyat Papua maupun bagi Indonesia.

Dari segi materi, penulis lebih menekankan pada alasan-alasan apa saja yang telah menjadi dasar bagi para pendukung gerakan kemerdekaan Papua yang meningkatkan aksinya dalam melancarkan tuntutan memisahkan diri kepada pemerintah RI sejak turunnya presiden Suharto. Tulisan ini juga membahas berbagai upaya dan aksi-aksi yang dilakukan oleh pendukung gerakan kemerdekaan Papua sepanjang tahun 1998 hingga 2001. Selain itu akan disinggung pula reaksi dari pemerintah RI dalam memberikan kebijakan-kebijakan sebagai upaya terhadap penyelesaian konflik tersebut.

1.3 Problematika

Perumusan masalah yang jelas dan tepat akan memberikan arah dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Sehingga penulisan akan terfokus pada permasalahan dan topik yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan dan didukung oleh data-data yang sesuai dengan topik yang dibahas. Sutrisno Hadi mengemukakan :

“ Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang dilalui dengan jalan mengatasinya”¹³

David H. Everson, Ph.D mengatakan dalam penelitian ilmu politik terdapat permasalahan-permasalahan yakni ; “(1) *practical difficulties of acces to the data of political sciences*, (2) *difficulties related to the kinds or generalizations which political scientist are likely to be able to make*, and (3)

¹³ Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, hlm.56

difficulties related to the fact that political scientist as scientist cannot tell us which values to prefer in guiding our policy recommendations and political evaluations"¹⁴

Dalam penelitian, masalah merupakan landasan atau dasar untuk menentukan unsur penelitian lainnya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa problematika adalah suatu persoalan yang disodorkan untuk dibahas dan dipecahkan, sehingga pada akhirnya dengan ditunjang data-data yang cukup dan analisa yang tajam, permasalahan tersebut dapat terungkap.

Papua terintegrasi dalam wilayah NKRI melalui persetujuan New York yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada 15 Agustus 1962. Persetujuan ini disahkan oleh Majelis Umum PBB. Kedudukan Indonesia atas wilayah Papua semakin kuat setelah PBB mencatat hasil penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Walaupun telah terintegrasi dalam wilayah RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat, masih banyak terjadi konflik-konflik vertikal antara masyarakat dengan Pemerintah pusat yang lama-kelamaan memunculkan benih-benih separatisme pada masyarakat Irian. Pada awalnya faktor utama yang mendorong munculnya benih separatisme di Irian adalah bertolak pada usaha pemerintah RI dalam menguasai Irian yang tidak hanya menggunakan cara diplomasi saja tapi juga melalui pendekatan militer, hal ini tentunya menumbuhkan persepsi dikalangan penduduk asli bahwa Indonesia merupakan "The New Colonial Masters". Faktor penting lainnya yang menjadi pendorong bagi tumbuhnya benih separatisme adalah masuknya pendatang dari daerah lain secara perlahan telah memarginalkan putra daerah. Kejadian-kejadian tersebut segera menimbulkan situasi yang memburuk yakni munculnya kesenjangan maupun ketegangan sosial yang berimbas pada bangkitnya kembali sikap "anti asing" yang kemudian berubah menjadi pemberontakan-pemberontakan.¹⁵ Perkembangan situasi dan kondisi di Papua dari tahun ketahun tidak pernah lepas dari konflik berkepanjangan. Tindakan represif yang dilakukan oleh militer

¹⁴ David H. Everson dan Joann Preparad Paine, *An Introduction to Systematic Political Science*, The Dorsey Press, 1973, hal. 8

¹⁵ Ikrar Nusa Bhakti, *Loc. Cit.*

Indonesia untuk memadamkan pemberontakan maupun pergolakan di Irian menyulut reaksi keras baik dari warga lokal maupun kecaman dari dunia internasional.

Dimulainya era keterbukaan politik selepas tumbanganya Rezim Orde Baru pada pertengahan 1998, telah memberikan banyak perubahan sikap masyarakat Irian. Masyarakat Irian lebih berani menyampaikan keinginan dan protes kepada pemerintahan Indonesia. Gerakan-gerakan menentang kebijakan pemerintah mulai sering dilontarkan oleh masyarakat Irian. Kemudian lebih daripada itu masyarakat Irian berani memandang merdeka atau memisahkan diri dari RI merupakan salah satu jalan terbaik yang dapat diambil bagi Papua. Keinginan untuk memisahkan diri dari RI ini tentunya mendapat reaksi dari pemerintah RI yang tidak menginginkan Papua lepas dari wilayahnya. Yang perlu dikhawatirkan adalah jika pemerintah pusat gagal memberikan kompromi politik yang bisa memuaskan masyarakat Irian maka konflik yang lebih besar akan terjadi dan hal ini akan menimbulkan penderitaan bagi rakyat Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, tulisan ini mencoba untuk membuat suatu explanasi terhadap fenomena konflik di Irian sehingga menjadi jelas dan dapat dimengerti. Fenomena konflik yang dimaksud dapat diformulasikan dalam suatu pertanyaan utama yang akan dijawab dalam tulisan ini yaitu:

Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong bagi rakyat Irian untuk memisahkan diri dari Wilayah NKRI ?

1.4 Kerangka Dasar Teori

Dalam upaya untuk memecahkan suatu permasalahan yang bersifat ilmiah, sangat diperlukan adanya suatu teori yang relevan terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Garwin Mc. Cain dan Edwin Segal mendefinisikan teori sebagai :

“serangkaian statemen yang saling berkaitan, yang terdiri dari: (1) kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang menunjuk pada konsep-konsep dasar teori, (2) kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain, (3) kalimat-

kalimat yang menghubungkan beberapa statemen teoritis itu dengan sekumpulan kemungkinan objek pengamatan empiris.¹⁶

Untuk dapat mendiskripsikan, menjelaskan, dan meramalkan perilaku dalam Hubungan Internasional, seorang ilmuwan harus menunjukkan ketelitian dan melakukan analisa. Ia harus memilih bidang yang hendak dikaji, menetapkan batas ruang lingkupnya, menentukan tingkat analisa mana penelitian hendak dilakukan, dan pendekatan serta metode apa yang akan dipakai untuk mengkoordinasi keseluruhan proses analisa tersebut.¹⁷

Skripsi ini berusaha menjelaskan fenomena konflik politik yang terjadi dikawasan Papua dalam rentang waktu 1998 sampai tahun 2001. Tulisan ini juga mencoba menganalisa secara mendalam tuntutan, kepentingan dan kebutuhan masyarakat Papua dalam mencari sebuah penyelesaian konflik berkepanjangan tersebut. Pengertian konflik itu sendiri menurut Albert F. Eldridge adalah:

“Suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham, dan kepentingan diantara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbentuk non fisik, namun bisa berkembang menjadi benturan fisik. Konflik bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (violence) bisa pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (non violent).”¹⁸

Sementara itu Achmad Fedyani Saifuddin, dalam tulisannya mendefinisikan konflik sebagai: “sebuah pertentangan yang bersifat langsung yang ditandai dengan interaksi timbal balik diantara pihak-pihak yang bertentangan, selain itu, pertentangan juga dilakukan atas dasar kesadaran pada masing-masing pihak bahwa mereka saling berbeda atau berlawanan”¹⁹.

Sedangkan menurut beberapa ahli lainnya menjelaskan bahwa konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju kearah kesepakatan (konsensus). Selain itu, masyarakat tak mungkin terintegrasi secara permanen dengan mengandalkan kekuasaan

¹⁶ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta 1990, hal. 217.

¹⁷ *Ibid*, hal. 186.

¹⁸ R. Eep Saefullah Fatah, *Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi*, Prisma No.8, Agustus 1994, LP3ES, Jakarta, hal.46.

¹⁹ Achmad Fedyani Saifuddin, *“Konflik dan Integrasi : Perbedaan Faham dalam Agama Islam”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hal.7

paksaan dari kelompok yang dominan. Konflik tidak selalu bernuansa politik atau berimplikasi politik, akan tetapi apabila suatu konflik telah melibatkan pemerintah atau lembaga-lembaga politik maka konflik tersebut termasuk konflik politik. Secara sempit konflik politik dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik.²⁰

Ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah pusat telah menimbulkan sebuah konflik politik vertikal, dengan asumsi bahwa konflik politik yang sudah berlangsung lama ini mengetengahkan adanya pertentangan antara pemerintah Indonesia dengan golongan elite politik Papua yang menyeret kepentingan rakyat Papua. Jika konflik politik ini tidak ditangani secara serius, maka konflik politik cenderung bergerak menjadi konflik politik yang bersifat negatif, karena akan mengganggu eksistensi/stabilitas politik di kawasan Papua pada khususnya serta Indonesia pada umumnya.

1.5. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan gejala atau peristiwa yang terjadi. Hipotesis merupakan sesuatu yang sangat berguna bagi sebuah penelitian. Karena tanpa hipotesis tidak ada yang menjadi acuan, dan tentunya akan sulit dicari, fakta-fakta yang ingin dikumpulkan dan akan sukar menentukan mana data yang relevan dan tidak relevan. Menurut Sutrisno Hadi definisi dari hipotesis adalah:

“Dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga salah, dia akan ditolak kalau salah dan akan diterima jika fakta membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu akan tergantung pada hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan.”²¹

²⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, P.T.Gramedia Media Sarana Indonesia, Jakarta, 1990, hal.149-151.

²¹ Sutrisno Hadi, *Op.Cit.*, hal.36

Sedangkan definisi hipotesis menurut Moh. Nasir adalah :

“Hipotesis tidak lain adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan yang ingin kita cari atau yang ingin kita pelajari. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks.”²²

Konflik politik antara masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia selama lebih dari 30 tahun telah menimbulkan banyak kerugian (korban) baik jiwa maupun materiil yang tak terhitung lagi jumlahnya²³. Konflik politik diawali oleh proses integrasi Papua kedalam NKRI, yang ternyata masih menyisakan banyak persoalan. Sebagian masyarakat Papua menganggap bahwa proses integrasi tersebut bukan keinginan murni dari masyarakat Papua, akan tetapi lebih merupakan hasil konspirasi politik yang dilakukan oleh Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan PBB. Usaha-usaha untuk keluar dari bagian NKRI sebenarnya telah dimulai sejak awal integrasinya dengan Indonesia.

Aspirasi atau keinginan untuk merdeka memang telah menjadi sebuah wacana yang meluas di Papua. Namun makna “merdeka” sering diartikan berbeda oleh kelompok-kelompok masyarakat Papua. Di kalangan elite politiknya merdeka diartikan sebagai bentuk pemisahan diri dari Indonesia dan menjadi suatu entitas negara-bangsa sendiri. Sementara di kalangan rakyat awam, aspirasi merdeka lebih dipahami sebagai suatu gerakan “mistik” untuk memperoleh suatu perubahan ajaib yang tiba-tiba dari suatu keadaan yang miskin, menderita, dan penuh penindasan menjadi suatu keadaan yang menyenangkan, membebaskan, dan penuh kemakmuran.²⁴ Masih belum berkembang suatu wacana tentang pentingnya proses dan kerja keras dari seluruh rakyat Papua, bahwa kemerdekaan membutuhkan suatu proses yang panjang dan bukan sesuatu yang dapat diperoleh dalam waktu sekejap.

²² Richard Snyder, dalam Abu Bakar Eby Hara, Jurnal Ilmu Politik 9, P.T. Gramedia, Jakarta, hal.17

²³ Sayadi, Aceh Jakarta Papua, YAPPIKA, Jakarta, 2001, hal.100

²⁴ Kompas, 22 Januari 2001

Kenyataan politik di Papua ini oleh pemerintah, DPR, maupun aparat keamanan dipandang semata-mata sebagai suatu gerakan separatisme. Penilaian ini lebih banyak disebabkan karena ekspresi politik masyarakat Papua yang dimanifestasikan dalam kata “Merdeka”, pengibaran bendera Bintang Kejora, dan perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Oleh karena itu kecenderungan untuk mendekati masalah ini dari sudut pandang Nasionalisme yang sempit menjadi dominan. Pada akhirnya aparat keamanan lebih banyak berperan daripada kepemimpinan sipil baik pemerintah daerah maupun pusat. Hasilnya adalah muncul suatu tindak kekerasan yang sering kali menjurus pada pelanggaran-pelanggaran HAM. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat lebih didasarkan pada pendekatan kekuasaan yang pada akhirnya cenderung sering merugikan kepentingan masyarakat lokal. Dan inilah yang mengawali lahirnya sebuah jurang ketimpangan sosial antara warga asli dengan pendatang yang ujung-ujungnya dapat memunculkan konflik vertikal daerah melawan pusat.

Hipotesa dibuat dengan berusaha melihat hubungan antara kebijakan-kebijakan masa lalu yang telah diambil oleh pemerintah pusat (yang diterapkan di Papua), dengan munculnya keterbukaan politik serta meningkatnya aksi-aksi/gerakan kemerdekaan di Papua. Kontruksi dari hipotesa dalam tulisan ini adalah :

“faktor yang menyebabkan munculnya keinginan masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI adalah adanya akumulasi kekecewaan masyarakat Papua terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat yang diterapkan di Papua yang dipandang dapat merugikan masyarakat asli Papua. Sementara itu, terjadinya pergantian rezim yang mendorong adanya keterbukaan politik (demokrasi) serta adanya dukungan internasional juga menjadi faktor pemicu lainnya yang secara nyata telah meningkatkan aksi/gerakan kemerdekaan Papua.”

I.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah, metodologi sangat diperlukan agar penulisan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Menurut The Liang Gie metode penelitian adalah:

“Cara atau pola yang berulang kali. Sehingga menjadi pola untuk mencari pengetahuan tentang suatu obyek. Pada ujung awalnya ini

merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data sedangkan pada ujung akhirnya merupakan cara atau langkah untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai gejala tersebut.²⁵

Berdasarkan pada pengertian diatas, penulis dalam penelitiannya menggunakan metode sebagai berikut :

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini penelitian diadakan dalam bentuk observasi tidak langsung. Data yang dipakai sebagai bahan analisa dalam penulisan ini berasal dari data sekunder. Yaitu dengan cara studi kepustakaan, yakni menggali bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan studi ini. Bahan-bahan tersebut meliputi buku-buku, majalah, lembaran dokumen dan surat kabar. Agar data yang diperoleh dapat melingkupi permasalahan, maka diadakan seleksi atasnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecenderungan menerima data begitu saja. Adapun tempat-tempat yang direncanakan dan representatif untuk dikunjungi antara lain:

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
3. Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies di Jakarta

1.6.2 Metode Analisa Data

Dalam karya-karya ilmiah yang berusaha meneliti berbagai *setting* sosial dimana data-data yang didapat adalah data-data yang tidak dapat diukur maka penelitian tersebut bersifat kualitatif. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pemikiran **deduktif**, karena tinjauannya lebih berfokus pada sejarah politik di Indonesia yang sudah berjalan. Menurut Sutrisno Hadi :

“ Prinsip deduktif adalah apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis, berlaku juga pada semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu.”²⁶

²⁵ The Liang Gie, *Ilmu Politik : Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan Dan Metodologi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hal. 97.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, hal. 42

Pada tahap pemikiran deduktif, digunakan saat fakta-fakta khusus itu berusaha ditarik kedalam abstraksi yang lebih tinggi yaitu dengan melihat berbagai faktor penyebab meningkatnya gerakan kemerdekaan di Papua. Yang juga diharapkan dapat membangun obyektifitas berpikir kita semua dalam memahami tuntutan “M” yang disampaikan masyarakat Papua.

1.7 Pendekatan

Pendekatan (*approach*) adalah penggunaan suatu kriteria tertentu untuk menyelidiki suatu ilmu. Sebagai usaha untuk mendekati permasalahan dengan pertimbangan keterbatasan dan spesifikasi keilmuan. Menurut **The Liang Gie**, pendekatan adalah keseluruhan sikap, sudut pandang, ukuran pangkal duga dan kerangka dasar pemikiran yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran dan memahami pengetahuan yang teratur dan bulat mengenai sasaran yang ditelaah itu.²⁷

Untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi, maka dalam penulisan ini diperlukan suatu pendekatan yang sesuai dengan permasalahan. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan sejarah politik (*Political – History Approach*). Menurut Charles Eisenmann, Pendekatan Sejarah Politik adalah :

“ Suatu laporan terakhir, penggambaran berbagai macam kenyataan politik secara kronologis, suasana kelembagaan dalam kehidupan negara (masyarakat politik), perbedaan kebijaksanaan politik internal, atau dalam hubungan beberapa negara (masyarakat), kebijaksanaan luar negeri dan internasional”²⁸

Pendekatan Sejarah Politik akan membawa kita kedalam suatu asumsi dasar bahwa fenomena politik yang sedang terjadi pada saat ini di Papua dilatar belakangi oleh berbagai kejadian dimasa lalu. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan fenomena munculnya tuntutan kemerdekaan bangsa Papua yang muncul sepanjang proses integrasinya kedalam wilayah Indonesia dan merupakan sebuah proses sejarah yang terus muncul sebagai wujud rasa kebangsaan rakyat Papua.

²⁷ The Liang Gie, *Op.Cit.* hal. 59



BAB II

GAMBARAN UMUM PAPUA

II.1 Latar Belakang dan Letak Geografis Papua

Papua (West Papua) yang juga pernah dikenal dengan nama Irian Barat, merupakan provinsi paling timur di Indonesia. Secara geografis Papua yang memiliki luas ± 1600 mil persegi, terletak di beberapa ratus mil sebelah utara Australia., di sebelah utara berbatasan dengan laut Pasifik, di sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea, di sebelah selatan berbatasan dengan laut Arafuru, dan di sebelah barat berbatasan dengan sebagian laut Pasifik dan sebagian propinsi Maluku. Jika di lihat dari letak astronomisnya propinsi Daerah Tingkat I Papua berada pada garis meridian: sebelah utara $0^{\circ}19'LS$ dan $45^{\circ}LS$ sebelah selatan, antara garis bujur $130^{\circ}45$ BT sebelah barat dan $141^{\circ}48$ sebelah timur.¹

Batas timur wilayah Papua merupakan suatu “batas” yang sengaja di buat untuk menetapkan perbatasan antara wilayah jajahan Belanda dengan wilayah jajahan/kekuasaan negara-negara Eropa lainnya. Adanya “batas buatan” ini sebenarnya berhubungan dengan sejarah Papua, yang mana dalam sejarahnya wilayah ini telah mengalami beberapa kali pendudukan oleh bangsa asing sejak pertama kali “ditemukan” oleh bangsa Spanyol sampai dengan bergabungnya Papua kedalam NKRI melalui PEPERA tahun '62.

II.2 Papua, Awal dan Sejarah Sebuah Nama

Sejarah awal yang menggambarkan adanya hubungan antara Papua dengan Indonesia adalah kemahsyuran dan kejayaan kerajaan Sriwijaya yang kemudian di gantikan/diteruskan oleh kerajaan Majapahit, yang mana kondisi ini telah mendorong para kepala daerah yang mempunyai kepentingan perdagangan di perairan kepulauan Indonesia untuk mempersatukan diri dengan negara majapahit.

¹ Tuhana Taufik Andrianto, “*Mengapa Papua Bergolak?*”, Gama Global Media, Yogyakarta, 2001, hal. 6

Demikian juga kepala daerah Maluku yang mengakui kedaulatan Majapahit atas daerah-daerah kekuasaan mereka yang antara lain meliputi sebagian wilayah di Irian. Kenyataan ini semakin diperkuat oleh adanya syair dalam kitab Nagarakertagama gubahan empu Prapanca (1365) yang menyebutkan beberapa nama daerah, yang kemudian diyakini terletak di wilayah Papua, sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Majapahit.²

Akan tetapi dalam sebuah buku yang berjudul "*Entdeckungsgeschichte von Neu Guinea*" dinyatakan bahwa bangsa Spanyol adalah yang pertama kali menjejakkan kaki di daratan Papua. Alvaro de Saavedra, diutus oleh Gubernur Spanyol di Tidore berlayar ke Mexico dan mendarat di pantai utara Irian pada pertengahan 1529. Kemudian pada tahun 1545, orang Spanyol lainnya, Ynigo Ortiz de Retes juga mendarat di Irian dan mengadakan suatu upacara kecil dan menyatakan pulau yang dijejaknya ini sebagai milik raja Spanyol serta menamakannya Nueva Guinea.³ Nama Papua sendiri diperkenalkan pertama kali oleh pelaut Portugis, Anthonio D'arbreu yang mengunjungi pantai Irian pada 1551.⁴ Kata Papua sepertinya berasal dari kata bahasa melayu "Pua-pua" yang kurang lebih artinya keriting. Mengenai asal nama Irian, lebih populer setelah wilayah ini bergabung dengan NKRI, konon diperkenalkan oleh Presiden Soekarno sebagai singkatan dari "Ikut Republik Indonesia Anti Nederland". Akan tetapi ada pendapat bahwa "Irian" berasal dari bahasa Biak yakni "Iryan" yang berarti "Sinar matahari yang menghalau kabut di laut".

II.3 Papua di Masa Kolonialisasi Belanda

Keberhasilan Belanda "mengusir" Spanyol dari wilayah Tidore dan perairan Maluku secara langsung telah memberikan jalan masuk bagi Belanda untuk memiliki/menguasai berbagai wilayah kekuasaan Tidore termasuk Irian. Usaha Belanda untuk menguasai Papua secara jelas terlihat dengan dibangunnya benteng militer didaratan Irian pada tahun 1828. Bersamaan dengan peresmian

² *Ibid.*, hal.3

³ Lili Hasanuddin, "*Suara dari Papua*", YAPPIKA-Jakarta, 2001, hal.41

⁴ Decky Natalis Pigay, "*Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*", Pustaka Sinar Harapan, 2000, hal.108

benteng militer tersebut, Belanda juga mengklaim bahwa daratan Irian merupakan wilayah Tidore sehingga Belanda mempunyai kedaulatan atas wilayah Irian (Tidore merupakan wilayah jajahan Belanda).⁵

Papua dibawah kekuasaan Belanda bernama Nederland Nieuw Guinea, dengan segala peraturan ketata-negaraan atau sistem pemerintahan yang ditentukan oleh ratu Belanda. Beberapa peraturan tentang: ketatanegaraan, hak-hak penduduk, kekuasaan dan tanggung jawab Gubernur, anggaran keuangan, pembagian wilayah pemerintahan dan daerah otonom, pendidikan, kesehatan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemakmuran rakyat termuat dalam Surat keputusan Ratu Belanda yang bernama *Besluit Bewindsregeling Nieuw Guinea*. Pasal I Besluit mengatur penyelenggaraan pemerintahan umum Nieuw Guinea oleh Gubernur Nieuw Guinea atas nama Ratu Belanda. Atas dasar hal tersebut, status wilayah Nieuw Guinea berubah dari wilayah Neolandschap menjadi *Zelfbesturend Landschap*.⁶ Perubahan status ini dimaksudkan agar Belanda bisa menguasai/memiliki kedaulatan yang seluas-luasnya terhadap wilayah Nieuw Guinea. Kemudian Belanda juga berusaha bekerja sama dengan pemerintah Australia untuk menjadikan seluruh wilayah Irian (termasuk Papua New Guinea) sebagai satu kesatuan yang lepas dari lingkungan NKRI. Sikap Australia untuk bekerja sama dengan Belanda ini dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan bahwa Papua dan PNG secara Strategis amatlah penting bagi pertahanan dan keamanan Australia. Wilayah ini boleh dikatakan sebagai “tameng” bagi Australia untuk membendung pasukan Jepang masuk ke Australia.

Pada tahun 1961, Belanda memprakarsai dibentuknya Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea) yang merupakan sebuah Quasi Parlemen bagi “negara Papua”, yang beranggotakan 28 orang. Bersama pemerintah Belanda Nieuw Guinea Raad membentuk Komite Nasional Papua, yang diberikan kewenangan untuk merumuskan berbagai kebijakan politik untuk masa depan “negara Papua. Komite Nasional Papua selanjutnya merumuskan Manifesto Politik yang antara lain berisi penentuan “Bintang kejora” sebagai Bendera kebangsaan Papua, “Hai

⁵ Tuhana Taufik Andrianto., *Op. Cit.* , hlm. 6

⁶ *Ibid*, hal.11

Tanahku Papua” sebagai lagu kebangsaan, “Gulden” sebagai mata uang serta atribut kenegaraan lain termasuk Korps Tentara Sukarelawan Papua yaitu “*Papua Vrijwilege Korps (PVK)*”.⁷

Keterlibatan pemerintah Belanda dalam “memobilisasi” usaha pembentukan negara Papua semakin membuat gerah pemerintah Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendapatkan kembali Nieuw Guinea kedalam NKRI. Situasi ini membuat konflik politik antara Indonesia dengan Belanda semakin meruncing. Setelah berkali-kali melewati perundingan yang alot, presiden Soekarno melakukan “move” politik yakni mencetuskan Tri Komando Rakyat (TriKora), sebuah manifesto politik untuk mendapatkan/merebut pulau Cendrawasih dari tangan Belanda baik melalui perang berkuah darah maupun diplomasi panggung politik. Pada akhirnya “peluncuran” TriKora menjadi sebuah momentum politik yang begitu penting bagi Indonesia, sebab dengan dilancarkannya TriKora Indonesia dapat merebut kembali Papua dari Belanda.

II.4 Papua Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

II.4.1. Papua dan Proses Integrasi 1962-1969

Konflik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda dalam memperebutkan Papua mulai memanas ketika cara-cara militer mulai digunakan. Hal ini terjadi karena usaha-usaha penyelesaian konflik melalui meja perundingan selalu gagal. Pada tahun 1961 melalui TriKora, pemerintah Indonesia berhasil mendesak Belanda untuk kembali duduk dalam suatu meja perundingan di mana kemudian Indonesia dan Belanda menandatangani “Persetujuan New York (New York Agreement)” pada tanggal 15 Agustus 1962. Persetujuan ini dicatat oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi pada 11 september 1962, no. 1752 (XVII). Persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Belanda tersebut berisi beberapa poin penting yang menentukan masa depan rakyat Papua, yaitu:⁸

⁷ Laporan Hasil Konggres Papua, *Mari Kita Meluruskan Sejarah Papua Barat*, Sekretariat Presidium Dewan Papua, Jayapura, 2000, hal. 29

⁸ Tuhana Taufiq Andrianto, *Op.Cit.*, hal. 19.

- Apabila PBB telah membenarkan persetujuan atau perjanjian itu melalui Rapat Umum, maka Belanda segera menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada UNTEA.
- Terhitung tanggal 1 Mei 1963 UNTEA sebagai pemikul tanggung jawab administrasi pemerintah Papua menyerahkannya kepada Indonesia.
- Pada akhir tahun 1969, dibawah pengawasan Sekjen PBB diadakan Act of Free Choice dimana rakyat Papua dapat menentukan nasibnya sendiri ataukah bergabung dengan Indonesia. Indonesia dalam rentang waktu tersebut akan mengembangkan/membangun kebersamaan rakyat Papua, sehingga di tahun 1969 rakyat Papua telah siap menentukan sendiri status negerinya.

Kemudian pada 1 Oktober 1962, pemerintah Belanda menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada UNTEA-United Nations Temporary Executive Authority (pemerintah sementara PBB) dan pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkannya kepada Pemerintah Indonesia.

Sebagai wujud pelaksanaan isi kesepakatan New York 1962, pemerintah Indonesia di bawah pengawasan PBB melaksanakan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat). Pelaksanaan proses penentuan pendapat tersebut dimulai pada tanggal 14 Juli hingga berakhir pada tanggal 2 Agustus 1969. Peristiwa tersebut dilaksanakan di delapan kota di Papua mewakili berbagai golongan dan kelompok, disaksikan oleh utusan PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz, seorang Duta Besar dari Bolivia untuk PBB. Utusan PBB ini tiba dengan didampingi oleh tiga orang staf dan dibantu oleh Mr. Sudjarwo Tjondronegoro seorang pembantu khusus Menteri Luar Negeri Indonesia untuk urusan Irian Jaya.

Proses PEPERA dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah, diikuti oleh penduduk Papua sejumlah 809.337 orang ditambah anggota Dewan Musyawarah PEPERA sebanyak 1025 orang. Selain wakil dari PBB, pelaksanaan PEPERA juga disaksikan oleh Duta Besar dari Thailand, Belanda, Australia, Jerman Barat, Selandia Baru dan Burma.⁹ Hasil pelaksanaan PEPERA menunjukkan bahwa secara aklamasi rakyat Papua memutuskan untuk bergabung dengan Negara

⁹ *Ibid.*

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan hasil tersebut maka secara sah rakyat Papua telah menyatakan bergabung kedalam wilayah RI.

II.4.2. Papua dalam Wajah Pembangunan RI

Pada tanggal 15 Agustus 1969 sebagian besar rakyat Papua yang berpartisipasi dalam PEPERA tersebut menyatakan setuju Papua bergabung dengan NKRI.¹⁰ Secara riil, proses ini hanya dimengerti oleh orang-orang Papua yang tinggal di pantai-pantai dan di pulau-pulau, serta di pos-pos tertentu di daerah pedalaman. Karena secara riil pula, orang-orang inilah yang secara “intensif” berinteraksi dengan para *zending* dan misionaris Belanda. Walaupun kritik, protes, kecaman maupun keberatan datang dari berbagai kalangan, hasil dari pelaksanaan PEPERA 1969, secara resmi telah memenangkan Indonesia atas kepemilikannya terhadap tanah Papua. Hasil PEPERA ini kemudian dicatat dalam resolusi PBB No. 2504 (XXIV), tanggal 19 November 1969. Peristiwa yang menjadi titik balik bagi proses integrasi Papua, karena sejak tanggal diterbitkannya resolusi tersebut, secara yuridis Papua telah dibawah kekuasaan dari NKRI.

Babak baru yang dimulai oleh pemerintah Indonesia terhadap “hak pengelolaan” atas tanah Papua adalah dengan membuka “pintu” tanah Papua bagi penduduk Indonesia lainnya (yang datang bersama kelompok militer) untuk membuka lahan baru sambil mengeksploitasi kekayaan alam Papua yang sangat melimpah. “Pengeksporan” penduduk luar dan kelompok militer dalam jumlah yang besar secara otomatis mengubah wajah Papua. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Papua secara perlahan namun pasti mulai berubah mengikuti pengaruh budaya Indonesia (Jawa) yang dibawa para pendatang yang oleh penduduk Papua disebut “amber”.

II.4.2.1. Kondisi Sosial Budaya

Letak geografis Papua sebagai provinsi paling timur di Indonesia, dipandang oleh para sejarawan dan ahli geografi sebagai suatu kelangsungan dari benua Australia yang letaknya di zona tropika atas dasar alam, tumbuh-tumbuhan

¹⁰ Lili Hasanuddin, (ed), *Suara Dari Papua*, YAPPIKA, Jakarta, 2001, hal. 54

dan faunanya. Pada jaman purba, Papua bertaut dengan benua Australia, kira-kira pada tempat yang sekarang merupakan selat Torres yang lebarnya ± 100 km. Pulau ini digolongkan pada gugusan melanesia, karena dihuni oleh sejenis bangsa negroid, berkulit hitam atau melanoderm.

Karakteristik kependudukan di Papua menunjukkan spesifikasi yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Papua dihuni oleh sekitar 320 suku dengan budaya dan bahasa daerah masing-masing. Beragamnya kebudayaan yang dimiliki Papua, menunjukkan keunikan karakteristik kependudukan masyarakat Papua. George Adi Tjondro, menunjukkan keberagaman kebudayaan di Papua dengan menyusun suatu typologi kebudayaan penduduk asli dengan menggunakan enam indikator pokok kebudayaan¹¹ yakni :

1. Indikator Bahasa, dimana jumlah bahasa yang ditemukan di Papua adalah 224 bahasa. Dan hanya 43 bahasa atau 19,5% terdiri dari bahasa-bahasa Austronesia (serumpun dengan bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia). Sedangkan 184 bahasa lainnya terdiri dari bahasa Non-Austronesia (sering disebut bahasa Papua) yang tidak mempunyai hubungan genetik dengan bahasa-bahasa diluar Papua.
2. Indikator Ekosistem, keragaman kebudayaan di Papua dipengaruhi oleh keragaman ekosistem. Masyarakat yang berdiam di daerah pegunungan, sering disebut "orang gunung", mempunyai karakteristik yang berbeda dengan mereka yang bertempat tinggal di daerah pantai. Sama halnya dengan daerah di Indonesia lainnya, masyarakat pantai Papua lebih dekat / mengenal informasi dan teknologi dibanding dengan "orang-orang gunung" di Papua.
3. Aspek-aspek kebudayaan kebendaan (material culture) yang utama, merupakan indikator yang didasarkan pada pola pangan pokok, pola pencaharian pokok, pola sandang dan pemukiman maupun pola teknologi angkutan.
4. Pola kepemimpinan, terdapat empat model kepemimpinan masyarakat asli Papua yakni: sistem "Big Men" yang dikenal di kalangan suku-suku

¹¹ Dr. George Junus Aditjondro, **Cahaya Bintang Kejora**, ELSAM, Jakarta, 2000, hal. 68.

pegunungan, sistem "Ondoafi" pada kalangan suku di sekitar Jayapura, sistem kepemimpinan pemimpin marga yang sangat egaliter di kalangan suku-suku di sekitar teluk Saerra, serta sistem "Raja" yang berlaku di daerah Fakfak dan sebagian kepulauan Raja Ampat.

5. Intensitas / lama / corak kontak dengan dunia luar, pandangan diri, kebudayaan kebendaan serta struktur sosial masyarakat asli Papua banyak dipengaruhi oleh lama, intensitas, dan bentuk kontak dengan dunia luar. Dalam hal ini masyarakat asli Papua dapat dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, suku-suku yang telah mempunyai kontak / hubungan dengan wilayah Indonesia Timur sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat, seperti suku-suku di sekitar Teluk Sairerra, Raja Ampat, Fakfak, dan pesisir Utara Jayapura. Kelompok kedua adalah suku-suku bangsa yang selain lingkaran perdagangan/pertukaran kulit kerang antara orang gunung dan orang pantai, yang mana kontak dengan dunia luar dimulai dengan para misionaris dan petugas-petugas kolonial Belanda. Seperti, sebagian suku-suku di pegunungan tengah serta di wilayah Papua bagian selatan. Kelompok ketiga adalah suku-suku yang baru berhubungan dengan dunia luar setelah integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia setelah 1963. Misalnya, suku-suku di daerah Mamberamo Hulu.
6. Agama dan Kepercayaan, terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Papua. Agama kristen menjadi agama mayoritas di Papua, sementara agama Islam, Hindu maupun agama lain hadir setelah berjalannya program transmigrasi di Papua. Walaupun demikian, dalam hati sebagian masyarakat asli Papua pandangan agama suku masih tetap dipertahankan. Terdapat beberapa kendala budaya yang menyulitkan agama-agama baru tersebut betul-betul diterima secara utuh, seperti larangan poligami (ditolak agama Kristen), haramnya babi (Islam), Totemisme (ditolak Kristen dan Islam), dsb.

Dengan mengacu pada indikator-indikator diatas struktur kebudayaan kebendaan maupun struktur sosial pada masyarakat asli Papua bersifat tidak statis,

tetapi akan terus berkembang dan menjadi hasil dari proses-proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus.

Sementara itu menurut Dr. La Pona¹², program transmigrasi nasional sebelum era reformasi, telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi struktur kebudayaan dan struktur sosial masyarakat Papua.¹³ Pada tahun 1961, jumlah penduduk Papua sebanyak 700.000 jiwa. Setelah sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk bertambah menjadi 2.233.875 jiwa. Lonjakan yang sangat besar ini, sangat mungkin terjadi karena terdapat penambahan jumlah penduduk dari adanya program transmigrasi nasional, migrasi lain, hasil perkawinan / asimilasi penduduk asli dengan pendatang maupun penambahan dari penduduk asli.

Dengan jumlah penduduk yang hanya satu persen penduduk Indonesia, dan tinggal pada wilayah seluas 3,5 kali luas pulau Jawa, Papua dengan kekayaan alam yang cukup besar telah menjadi daerah sasaran program transmigrasi yang paling potensial di Indonesia sebelum masa reformasi. Daerah ini kepadatan penduduknya, merupakan paling rendah di Indonesia. Masyarakat asli sebagian besar berada di kampung-kampung dengan jumlah penduduk sangat sedikit dan terpencar-pencar. Penduduk berkelompok dalam jumlah yang besar dan tertata baru bisa ditemukan di lokasi permukiman transmigrasi.

Kelompok transmigrasi berada di kampung sedangkan migran berada di perkotaan. Pertumbuhan penduduk dominan dipengaruhi oleh penduduk masuk (migrasi) antara 50.000–200.000 jiwa pertahun dibanding dengan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) yang hanya sekitar 25.000 orang.¹⁴ Komposisi penduduk di kampung-kampung tidak semuanya masyarakat asli, sebab kelompok masyarakat transmigran juga mulai menempatinnya. Karena telah terjadi proses migrasi keluar, migrasi masuk dan kelahiran (pertambahan) alami, maka jumlah pasti masyarakat transmigran di Papua menjadi kabur. Arus pendatang dari kota ke kampung ataupun sebaliknya juga telah mempengaruhi komposisi penduduk di

¹² Dr. La Pona adalah Dosen dan peneliti Pusat Studi Kependudukan Universitas Cendrawasih (Uncen), Jayapura.

¹³ *Kompas*, 4 November 2002

¹⁴ *Ibid.*

Papua. Migrasi penduduk antar daerah (migrasi Internal), penyebaran penduduk (transmigrasi), keberagaman suku-suku, bahasa, dan kedaerahan (adat istiadat) telah menyebabkan dinamika kependudukan menuju proses pembentukan masyarakat Papua yang majemuk, multi etnik, kultur, daerah, agama, maupun bahasa.

Selama proses integrasi Papua kedalam Indonesia kondisi sosial-budaya penduduk lokal kurang mendapat perhatian yang penuh dari pemerintah pusat, bahkan menunjukkan kecenderungan adanya upaya-upaya untuk menghambat perkembangan budaya lokal secara sistematis. Hal ini dipicu oleh adanya asumsi dari pemerintah Orde Baru bahwasannya kekayaan dan kedinamisan budaya lokal merupakan sebuah ancaman bagi proses integrasi Papua kedalam wilayah RI.¹⁵ Sehingga untuk memperkuat identitas rakyat Papua sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia maka mereka harus meninggalkan jati dirinya sebagai bangsa Papua yang memiliki kebudayaan sendiri. Untuk itu maka sepanjang proses integrasi warga Papua diintimidasi dan diteror agar meninggalkan kebudayaannya yang dianggap primitif dan tidak sesuai dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila. Salah satu peristiwa yang dapat dijadikan contoh mengenai proses penghambatan budaya lokal di Papua adalah kasus pembunuhan terhadap Arnold C.Ap, tokoh budayawan muda Papua pada tanggal 26 April 1984.¹⁶

II.4.2.2. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua sepanjang proses integrasinya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah memprihatinkan apabila dibandingkan dengan kekayaan alamnya yang melimpah ruah. Dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya seperti Jawa yang memiliki kekayaan alam jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Papua, kondisi sosial ekonomi rakyat Papua jauh tertinggal. Hingga tahun 1999 jumlah penduduk miskin di propinsi ini tidak tanggung-tanggung jumlahnya, yaitu sejumlah lebih dari 1.148.600 atau sekitar 53% dari jumlah keseluruhan penduduk Papua. Kemiskinan terparah dapat dijumpai di Kabupaten Paniai dan Jayawijaya, yakni sejumlah 80% dari

¹⁵ George Junus Aditjondro, *Op.Cit.*, Hal.107-108.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 140.

keseluruhan jumlah penduduk di daerah tersebut. Kemiskinan rakyat Papua dapat ditunjukkan dari angka pengeluaran rata-rata perkapita rakyat Papua yaitu sejumlah Rp 129.328,00. Pengeluaran terbesar dihabiskan untuk membeli makanan yang merupakan kebutuhan pokok. Angka pengeluaran rakyat Papua itu sendiri masih berada dibawah pengeluaran rata-rata perkapita nasional sejumlah Rp.148.906,00.¹⁷

Terdapat beberapa asumsi yang melandasi kegagalan program pembangunan di Papua yaitu; Pertama, akibat kebijakan ekonomi RI yang tidak berorientasi kepada rakyat Papua, melainkan hanya sebagai pelayan invansi kapital ke berbagai pelosok darat dan laut Papua. Hal tersebut nampak pada pola pembangunan yang dilakukan di Papua tidak didukung oleh kesiapan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia di Papua, sehingga berbagai program yang dilancarkan tidak mampu diimbangi oleh skill dan kemampuan yang memadai dari rakyat Papua sendiri. Kedua, kemiskinan itu terjadi karena tidak pernah dihargainya tehnik-tehnik bercocok tanam dan kepemilikan tanah rakyat Papua oleh pengambil keputusan di Jakarta. Artinya secara ekonomi rakyat Papua hanya sebagai obyek pembangunan bukan sebagai pihak yang ikut menentukan. Hal tersebut nampak dari kegagalan berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Papua.

Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang mengalami kegagalan dalam usahanya untuk mengentaskan kemiskinan di Papua adalah dilancarkannya program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program yang didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/1993 merupakan bagian dari gerakan nasional penanggulangan kemiskinan dengan upaya pemberian modal usaha. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan secara kelompok dan disertai oleh pendamping usaha yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk wilayah Papua program ini dilaksanakan di 141 desa di 6 kecamatan dan 5 kabupaten. Menurut Mubyarto sejak awal persiapan pelaksanaan IDT di Papua pada awal tahun 1994, para pengagas program memiliki keyakinan bahwasannya program tersebut akan

¹⁷ Kompas, 25 November, 2001.

mengalami kesulitan yang besar.¹⁸ Hal tersebut dikarenakan kondisi desa-desa di Papua secara ekologis dibagi dalam beberapa zona, yaitu: zona pegunungan, zona rawa sungai, dan zona pantai. Sehingga secara ekonomis pula perbedaan itu memunculkan kondisi kemiskinan yang beragam pula.

Pelaksanaan program pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Papua yang mengalami kegagalan adalah pelaksanaan program transmigrasi. Program ini pada awalnya tidak boleh bersifat egosentris tetapi harus berkaitan secara fungsional dengan kawasan lain yang ada disekitar. Berbagai kelompok etnis harus berbaur dalam kebhinnekaan dan penduduk lokal harus mendapat perhatian yang sama dengan kaum transmigran. Namun pada kenyataannya program tersebut gagal akibat munculnya kesenjangan sosial yang luas antara dua kelompok tersebut. Penduduk lokal yang memiliki skill lebih rendah dari penduduk pendatang sedikit demi sedikit mulai tergeser dari kehidupan ekonomi di Papua. Sehingga pada akhirnya yang muncul adalah adanya kesenjangan sosial diantara dua kelompok penduduk Papua tersebut.

II.4.2.3. Kondisi Sosial-Politik

Pasca pelaksanaan PEPERA, pandangan politik rakyat Papua mengalami perpecahan menjadi dua kelompok besar.¹⁹ Kelompok pertama adalah kelompok yang setuju dengan hasil dan proses PEPERA, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang menolak hasil dan proses PEPERA. Kelompok pertama yang umumnya berasal dari golongan elite masyarakat, beranggapan bahwa dengan bergabung dengan Indonesia maka kesejahteraan rakyat Papua akan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu sepanjang proses integrasi Papua kedalam Indonesia maka mereka secara aktif berperan dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasi pembangunan. Mereka umumnya menjadi "*Agent of Change*" bagi pelaksanaan pembangunan di seluruh pelosok Papua. Para pendukung integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia ini umumnya adalah para elit yang menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan daerah.

¹⁸ Tuhana Taufiq Andrianto, *Op. Cit.*, hal. 72.

¹⁹ Sayadi (ed), *Aceh, Jakarta, Papua*, Yappika, Jakarta, 2001, hal. 89.

Sementara itu kelompok kedua yang menganggap proses PEPERA sebagai suatu bentuk konspirasi politik antara PBB dan Indonesia untuk menipu rakyat Papua. Kelompok penentang integrasi ini kemudian menjadi aktor-aktor utama dalam setiap aksi-aksi perlawanan terhadap keberadaan pemerintah Indonesia di Papua. Usaha perlawanan diwujudkan dengan mendirikan Organisasi Papua Merdeka yang dalam setiap aksi-aksinya ditujukan untuk merongrong keberadaan bangsa Indonesia di Papua, baik itu berupa tindakan teror, intimidasi, operasi militer terhadap posisi-posisi TNI dan aksi-aksi lainnya yang bertujuan mengganggu keamanan di Papua.

Namun seiring dengan berjalannya proses pelaksanaan pembangunan di Papua kelompok pertama yang mendukung proses integrasi Papua ke dalam wilayah RI pecah menjadi dua kelompok.²⁰ Kelompok pertama adalah kelompok elit yang merasa diuntungkan dengan adanya pembangunan di Papua. Mereka umumnya adalah para elit yang menjadi *Broker* bagi kepentingan pemerintah RI di Papua. Sedangkan kelompok kedua adalah sebagian elit yang menganggap bahwasannya pembangunan di Papua telah memarginalkan dan memiskinkan penduduk asli. Bagi kelompok ini pembangunan telah menciptakan kesenjangan dan kemiskinan, ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di pihak masyarakat masyarakat asli. Kelompok ini berpendirian bahwasannya masyarakat asli Papua saat ini tidak memiliki akses partisipasi dalam proses politik dan pemerintahan, terasing dan menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Kelompok pro-kemerdekaan ini melihat bahwasannya sepanjang proses integrasi Papua kedalam wilayah Indonesia, aspirasi politik rakyat Papua telah dikediri dan dipecah belah oleh kekuatan Orde Baru. Bahkan untuk menduduki posisi di pemerintahan penduduk asli Papua harus melalui seleksi yang ketat, sedangkan penduduk pendatang mendapat kemudahan. Terkadang pula jabatan-jabatan strategis diisi oleh orang-orang yang didatangkan khusus oleh pemerintah

²⁰ *Ibid.*, hal.90.

pusat dari luar Papua.²¹ Hal-hal semacam inilah yang kemudian mendorong munculnya perasaan yang kuat untuk memisahkan diri dari NKRI.



²¹ Sayadi (ed), *Op.Cit.*, hal. 99.



BAB III

DINAMIKA KONFLIK POLITIK DI PAPUA

Pada pertengahan tahun 1998, tepatnya pada bulan Mei, kondisi politik di Indonesia terjadi perubahan yang signifikan dengan lengsernya Soeharto dari kursi kekuasaannya yang telah dipegang selama lebih dari 32 tahun. Pergantian tampuk kekuasaan tersebut berdampak dengan munculnya program Reformasi yang dicetuskan oleh kebanyakan elit yang menjadi pelopor gerakan rakyat dalam menumbangkan kekuasaan rezim Soeharto tersebut. Reformasi di segala bidang ini pada satu sisi memunculkan harapan baru mengenai kehidupan yang lebih baik dibandingkan pada masa Orde Baru. Namun disisi lain perubahan tersebut menimbulkan tanda tanya yang besar dikalangan rakyat yaitu apakah gerak pembaharuan yang ada benar-benar akan selamat sampai tujuan sesuai dengan keinginan rakyat ataukah sebaliknya. Masalah ini mengakibatkan kekhawatiran, sebab tanda-tanda kearah perbaikan belum nampak sedangkan masalah-masalah baru yang lebih pelik semakin bermunculan.

Salah satu bentuk masalah yang muncul pasca tumbangya Soeharto pada tahun 1998 adalah semakin meningkatnya tuntutan sebagian rakyat untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian rakyat ini merasa menemukan celah bagi dirinya untuk membebaskan diri dari wadah yang selama ini memenjarakan kebebasan mereka untuk berekspresi dan berkembang sebagaimana layaknya manusia yang sejati. Ancaman disintegrasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia tampak terkait dengan proses demokratisasi yang semakin terbuka dan liberal. Ikatan primordial seperti kesukuan, keagamaan, antar golongan telah dijadikan motif-motif yang mewarnai konflik kepentingan yang menimbulkan kerusuhan dan instabilitas.

III.1 Kronologi Meningkatnya Konflik Politik Di Papua

Fenomena meningkatnya tuntutan sebagian rakyat untuk membentuk negara sendiri terjadi pula di Papua. Propinsi yang terletak paling ujung timur mengalami dinamika politik yang hangat setelah tumbangya Soeharto, salah satu

tokoh yang berada dibalik proses penyatuan wilayah Papua Barat kedalam wilayah Indonesia. Menghangatnya kondisi politik di Papua tersebut merupakan wujud dari akumulasi kekecewaan rakyat Papua terhadap perlakuan pemerintah Indonesia semenjak tahun 1962 yang telah menyengsarakan rakyat Papua dalam bentuk berbagai ketidakadilan diberbagai bidang. Meningkatnya tuntutan untuk merdeka setelah tumbangnya rezim Orde Baru dikalangan rakyat Papua dapat kita telaah dalam bentuk kronologis peristiwa mulai tahun 1998 hingga tahun 2001.

III.1.1 Unjuk Rasa Berdarah Pada Tahun 1998.

Munculnya tuntutan untuk merdeka di kalangan rakyat Papua setelah pergantian kekuasaan nasional muncul pertama kali pada tanggal 2 Juli 1998, dengan dikibarkannya bendera tiga warna, yang dikenal dengan nama Bendera Bintang Kejora, di Menara Air Pelabuhan Biak. Aksi tersebut berawal dari penyampaian aspirasi kepada wakil-wakil rakyat di DPRD yang tidak mendapat tanggapan memuaskan. Gagal dalam menyampaikan aspirasinya massa kemudian berkumpul di Pelabuhan Biak dan mereka kemudian mengibarkan bendera Bintang Kejora dan menjaganya siang dan malam. Aksi ini kemudian berakhir dengan penyerbuan pasukan Brimob dan pasukan Batalyon 733 yang bertugas untuk menurunkan Bendera Bintang Kejora dari tempatnya berkibar. Penyerbuan pada pagi dini hari tersebut membuat sekitar 200 orang yang menjaga bendera tersebut bubar dan menelan korban jiwa sebanyak 24 orang akibat tembakan peluru karet dan tiga diantaranya luka parah.¹

Aksi yang lain muncul di Jayapura beberapa hari kemudian. Aksi ini berupa unjuk rasa dan mimbar bebas yang dilakukan di halaman kampus Universitas Cendrawasih. Aksi ini berlangsung damai, andaikan insiden pengeroyokan Sertu Dadang, seorang intel polisi yang mengawasi pelaksanaan unjuk rasa, tidak terjadi. Selang sepuluh menit kemudian pasukan keamanan bersenjata M-16 memblokir kampus dan melepaskan tembakan. Aksi ini menelan

¹ *Gatra*, 18 Juli 1998.

dua korban, yaitu Steven Suripati yang meninggal akibat tembakan di kepala dan Korena Onem yang terkena tembakan di lutut.²

Pengibaran bendera Bintang Kejora bukan hanya terjadi di Biak, tetapi juga meluas mulai Jayapura, Sorong hingga Wamena. Di kota-kota ini kebanyakan aksi ditujukan untuk menuntut diadakannya Referendum bagi rakyat Papua. Salah satu aksi yang menarik terjadi di Wamena dimana seorang bekas Camat Kurima bernama Yan Manuel Menai memimpin aksi massa berjumlah 400 orang didepan gedung DPRD Jayawijaya. Aksi demo menuntut pelaksanaan Referendum itu juga melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora selama sehari penuh dan baru diturunkan ketika pendekatan persuasif yang dilakukan berhasil membujuk bekas camat itu untuk membubarkan aksinya.³

Menurut Yeddi Nando Rum gerakan menuntut referendum muncul akibat berkembangnya kabar bahwa seorang anggota Senat Amerika Serikat, Christoper Smith, memberikan surat kepada Presiden Habibie, yang isinya pemerintah Amerika Serikat meminta agar pemerintah Indonesia untuk memberikan kebebasan kepada rakyat Timor Timur dan Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.⁴ Hal senada juga disampaikan oleh Francisco Fernandes Da Silva, Ketua Forum Studi Timor Timur, yang menyatakan bahwasannya surat dari senator Amerika Serikat itu memang memicu semakin meningkatnya gerakan rakyat untuk memisahkan diri dari wilayah RI. Menurut Da Silva surat tersebut menunjukkan bahwasannya tujuan utama Amerika Serikat adalah Papua, sedangkan Timor Timur hanyalah batu loncatan. Strategi tersebut menurut beliau didasarkan pada fungsi strategis Papua bagi Amerika Serikat, yang selain cocok untuk pangkalan militer juga kaya akan sumber daya alam, terutama emas dan tembaga. Apalagi salah satu perusahaan tambang terbesar di Amerika Serikat yaitu Freeport memiliki saham yang cukup besar di Papua.

Suasana Papua yang semakin memanas di pertengahan tahun 1998 tersebut sangat disesalkan oleh banyak pihak. Robert Mondasir, Eksekutif Daerah

² *Gatra*, 11 Juli 1998.

³ *Gatra*, 18 Juli 1998.

⁴ Tuhana Taufiq Andrianto, *Mengapa Papua Bergolak?*, Gama Global Media, Yogyakarta, 2001, hal. 149.

WALHI untuk wilayah Papua sangat menyesalkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam mengendalikan unjuk rasa sehingga banyak menimbulkan korban jiwa di kalangan rakyat sipil. Panglima Kodam Trikora, Mayor Jenderal Amir Sembiring, juga menyesalkan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Papua.⁵ Aparat keamanan sendiri meminta para pengunjuk rasa untuk berdialog dalam rambu-rambu yang telah ditetapkan berdasarkan konstitusi di Indonesia. Sebab menurut mereka diluar garis yang telah ditetapkan gerakan-gerakan tersebut dianggap sebagai tindakan Makar. DPRD sendiri juga enggan menerima para pengunjuk rasa selama tuntutan yang diajukan tetap mengenai pemisahan Papua dari wilayah RI.

III.1.2 Perkembangan Gerakan Aspirasi Merdeka Pada Tahun 1999

Aksi-aksi yang dilakukan oleh rakyat Papua terhadap usaha-usaha untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin meningkat pada era tahun 1999. Salah satu peristiwa penting adalah diadakannya dialog antara 100 orang utusan masyarakat Papua dengan Presiden B.J Habibie pada tanggal 26 Februari 1999 di Istana Merdeka di Jakarta.⁶ Tim 100 yang dipimpin oleh Tom Beanal, yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Suku Amungme (LEMASA) ini pada intinya menyatakan bahwasannya rakyat Papua sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah Indonesia. pernyataan ini didasarkan bahwasannya selama 38 tahun berintegrasi dengan Indonesia rakyat Papua mengalami banyak penderitaan dan mendapat perlakuan yang tidak adil apabila dibandingkan dengan saudara-saudara mereka di lain propinsi.

Oleh karena itu Presiden Habibie diminta oleh mereka untuk mengakui kemerdekaan rakyat Papua. Tom Beanal dalam pidatonya yang sebanyak dua lembar mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelesaian masalah Papua secepatnya, dan apabila tidak mampu diminta segera melaksanakan

⁵ *Ibid.*, hal. 150.

⁶ Theo P.A Van de Broek dan J. Budi Hermawan, *Memoria Passionis di Papua*, LSSP, Jakarta, 2001, hal. 7.

perundingan internasional antara pemerintah Indonesia, rakyat Papua Barat dan PBB selambat-lambatnya April 1999.

Dalam pertemuan itu Tom Beanal yang juga menjabat sebagai anggota Presidium Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyerahkan sejumlah dokumen hasil jajak pendapat di 13 Kabupaten di Papua kepada Presiden Habibie. Hasil jajak pendapat itu menunjukkan bahwasannya dari 13.755 angket yang disebar di Timika hanya sejumlah 2 orang yang menginginkan otonomi sedangkan selebihnya mendukung aspirasi kemerdekaan. Sedangkan di Fak-fak, dari 16.281 responden seluruhnya mendukung aspirasi kemerdekaan. Ultimatum Tom Beanal terhadap pemerintah Indonesia juga diakui oleh 12 utusan lainnya yang ditunjuk untuk mewakili FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Papua) yaitu forum yang dibentuk sebagai hasil kunjungan Tim Pencari Fakta DPR RI yang dipimpin oleh Abdul Gafur.

Pernyataan sikap para utusan rakyat Papua ini mengejutkan banyak pihak, terutama pihak pemerintah, karena pada rencana semula pertemuan ditujukan untuk mengadakan dialog dari hati ke hati mengenai kondisi rakyat Papua. Naskah pidato presiden sendiri yang telah dipersiapkan sebelumnya batal dibacakan dan Presiden Habibie meminta para utusan untuk merenungkan kembali aspirasi rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gubernur Papua, Freddy Numberi, yang ikut mengantar delegasi tersebut ke Istana Merdeka menepis bahwasannya aspirasi tersebut merupakan kehendak seluruh rakyat Papua. Menurut beliau aspirasi tersebut hanya keinginan sekelompok elit dan tidak dapat dijadikan dasar bahwasannya seluruh rakyat menghendaki merdeka dan memisahkan diri dari RI. Sementara itu menurut Dewi Fortuna Anwar, yang menjabat sebagai juru bicara Presiden Habibie, peristiwa tersebut merupakan sebuah bentuk ekspresi kekecewaan rakyat Papua yang telah menumpuk akibat perlakuan yang tidak adil selama pemerintahan Orde Baru.⁷

Setelah para delegasi kembali ke Papua, situasi di Propinsi tersebut mulai menghangat. Salah satu tokoh yang menjadi sorotan adalah Theys H. Eluay,

⁷ Tuhana Taufiq Andrianto, *Op. Cit.*, hal.154.

seorang kepala suku Danau Sentani. Tokoh Papua merdeka ini mengaku didukung oleh 1,8 juta warga pro kemerdekaan dari keseluruhan 2 juta penduduk Papua. Rumah Theys yang berada di kawasan Sentani dipermak menjadi dapur umum, majalah dinding yang penuh dengan foto dan pamflet. Theys sendiri tidak ikut serta dalam delegasi ke Jakarta karena dicekal oleh Kapolda dan Muspida. Ditambah lagi Theys baru saja di bebaskan dari tahanan Polres Jayapura pada tanggal 22 Oktober 1998 karena diduga menghasut dan menggalang aksi pengibaran bendera Bintang Kejora.⁸ Pada upacara peringatan hari ulang tahunnya yang ke-62 pada tanggal 12 November 1999, Theys dikukuhkan sebagai pemimpin bangsa Papua pada acara yang dihadiri oleh sekitar 3.000 orang tersebut Theys menyerukan agar pada tanggal 1 Desember 1999 bendera Bintang Kejora dikibarkan di seluruh Papua.

Tepat pada tanggal 1 Desember 1999 seruan Theys H. Eluay tersebut benar-benar dilaksanakan oleh seluruh warga Papua, terutama mereka yang mendukung kemerdekaan. Dimana pada tanggal tersebut dianggap oleh seluruh rakyat Papua pendukung kemerdekaan sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua. Pada tanggal tersebut diberbagai tempat di tanah Papua dikibarkan bendera Bintang Kejora, kecuali di Biak. tempat-tempat tersebut antara lain:⁹

1. Jayapura, dimana aksi yang dipimpin oleh Theys H. Eluay itu dipusatkan di Taman Imbi dan berjalan secara damai. Pengibaran bendera Bintang Kejora dilakukan pada pukul 04.30 WIT setelah bendera Merah Putih dikibarkan terlebih dahulu. Dalam aksi ini Theys membacakan 7 tuntutan rakyat Papua yang salah satunya berisi tuntutan untuk merdeka.
2. Sentani, dimana aksi diadakan di lapangan Sepakbola Sentani. Aksi dimulai pukul 6.30 WIT dengan pemimpin upacara Dominggus Yafifi dan inspektur upacara Sefnat Ohee. Bendera Bintang Kejora mulai dikibarkan pada pukul 7.15 WIT setelah bendera Merah Putih dikibarkan.
3. Merauke, dimana upacara diadakan di Lapangan Pemda Merauke pada pukul 09.00 WIT.

⁸ Gamma, 7 Maret 1999.

⁹ Theo P.A Van de Broek dan J. Budi Hermawan, *Op. Cit.*, hal.56.

4. Sorong, pengibaran bendera Bintang Kejora dilakukan pada pukul 10.35 WIT
5. Wamena, pengibaran bendera Bintang Kejora dilakukan di Bakondini pada pukul 07.20 WIT karena Bupati David Hubi tidak mengizinkan upacara dilakukan di Wamena
6. Fak-fak, pengibaran bendera Bintang Kejora dilaksanakan pada pukul 05.00 WIT dengan didahului dengan perundingan yang alot dengan DPRD II. Upacara tersebut dipimpin oleh Constantinus Bauw .
7. Serui, upacara dilakukan di Lapangan Trikora dipimpin oleh ketua LMA Yapen Waropen M.Y Tanawani, dimana bendera Bintang Kejoradikibarkan pada pukul 09.15 WIT dan diturunkan pada pukul 17.30 WIT.
8. Nabire, upacara pengibaran bendera Bintang Kejora dilakukan pada pukul 10.40 WIT dipimpin oleh ketua LMA Nabire, Menase Sayori. Dalam upacara tersebut juga dibacakan pidato politik yang isinya: (1) Menolak hasil Pepera 1969 karena tidak sesuai dengan asas Demokrasi dan melanggar HAM rakyat Papua, (2) Meminta pemerintah meninjau status Propinsi Papua serta mengadili Soeharto beserta para Jenderal yang terlibat dalam DOM di Papua, (3) menuntut pemerintah Indonesia untuk mengakui kemerdekaan bangsa Papua yang telah dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 1961 serta segera mengusut semua pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
9. Manokwari, upacara dilaksanakan di Lapangan Doreri dipimpin oleh Abraham Ramar. Pengibaran bendera Bintang Kejora dilakukan pada pukul 09.00 WIT dan diturunkan pada pukul 17.30 WIT.
10. Puncak Jaya, upacara pengibaran bendera Bintang Kejora dipimpin oleh Anton Tabuni (anggota tim 100) dan dikibarkan hingga tanggal 5 Desember 1999, penurunan bendera diikuti dengan pesta adat.

Semakin menguatnya aspirasi rakyat Papua untuk memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan persuasif yang bersifat kompromis dan persuasif. Salah satu langkah yang diambil oleh Presiden Abdurrahman Wahid, yang terpilih hasil Pemilu 1999, adalah dengan mengunjungi Papua pada tanggal 31 Desember

1999¹⁰. Dalam kunjungannya ke Papua tersebut Presiden atas nama pemerintah meminta maaf atas pelanggaran HAM di Papua dan menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Namun dalam kesempatan itu juga Presiden Abdurrahman Wahid dengan tegas menolak permintaan rakyat Papua untuk merdeka tetapi pemerintah Indonesia tetap membuka kesempatan untuk berdialog dengan seluruh komponen di Papua.

III.1.3 Pelaksanaan Kongres Rakyat Papua

Pada kurun waktu tahun 2000 aspirasi rakyat Papua untuk merdeka telah mendapatkan angin segar dengan diadakannya Kongres Rakyat Papua pada tanggal 29 Mei 2000 hingga tanggal 4 Juni 2000. Kongres yang dibuka oleh Ketua Umum Presidium Dewan Papua Theys H. Eluay di Gedung Cendrawasih tersebut dihadiri secara resmi oleh 501 utusan dari 14 daerah kabupaten di seluruh Papua.

Kongres itu menghasilkan sejumlah resolusi penting, antara lain:¹¹

1. Bangsa Papua mengklaim dirinya telah berdaulat sebagai bangsa dan negara sejak tanggal 1 Desember 1961.
2. Kongres menolak hasil New York Agreement 1962 yang dianggap cacat hukum dan cacat moral.
3. Bangsa Papua juga menolak hasil Pepera karena dianggap telah berlangsung dibawah tekanan, intimidasi dan diwarnai kekerasan oleh militer, karena itu Kongres menuntut PBB untuk mencabut resolusi PBB No. 2504 tanggal 19 Desember 1969.
4. Kongres menuntut Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan PBB harus mengakui hak politik dan kedulatan bangsa Papua.
5. Berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlangsung di Papua akibat konspirasi politik internasional yang melibatkan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan PBB harus diusut tuntas dan pelakunya harus diadili di peradilan Internasional.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 64.

¹¹ Laporan Hasil Konggres Papua, *Mari Kita Meluruskan Sejarah Papua Barat*, Sekretariat Presidium Dewan Papua, Jayapura, 2000, hal. 48.

6. Konggres mendesak PBB, Amerika Serikat dan Belanda agar meninjau kembali keterlibatan mereka dalam proses aneksasi Indonesia atas Papua Barat dan memberi batas penyampaian hasil yang jujur, adil dan benar hingga 1 Desember 2000.

Konggres tersebut juga melahirkan tujuh ketetapan, yaitu: pertama, Tap mengenai tata tertib konggres, kedua, Tap mengenai pimpinan sidang, ketiga, Tap mengenai keanggotaan panel Papua, Ketua dan Wakil Ketua Presidium Dewan Papua beserta anggotanya, keempat, Tap mengenai pelurusan sejarah Papua, kelima, Tap mengenai agenda-agenda politik, keenam, Tap mengenai konsolidasi komponen perjuangan dan ketujuh, Tap mengenai hak-hak dasar rakyat Papua.¹²

Pada konggres tersebut juga diberikan mandat sepenuhnya kepada Presidium Dewan Papua untuk:¹³

1. Memperjuangkan pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan Papua Barat serta pengusutan dan pengadilan para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat.
2. Segera membentuk tim independen yang akan melakukan damai dengan Indonesia dan Belanda di bawah pengawasan PBB untuk suatu referendum pengakuan kedaulatan rakyat dan bangsa Papua.
3. Mengupayakan sumber-sumber yang tersedia di tanah Papua dan tidak bersifat mengikat untuk membiayai pencapaian tujuan perjuangan.
4. Melalui Panel Konggres II, rakyat Papua Barat memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presidium Dewan Papua.
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagaimana termaktub diatas pada tanggal 1 Desember 2000.

Bagi para pendukung kemerdekaan keberhasilan pelaksanaan Konggres tersebut merupakan langkah maju dalam mewujudkan cita-cita rakyat Papua untuk merdeka, karena Konggres tersebut dianggap sudah mendapat legitimasi dari seluruh rakyat Papua. Menurut Thaha Al Hamid Konggres Rakyat Papua

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

tersebut merupakan satu-satunya lembaga politik tertinggi bagi rakyat Papua. Menurut para penggagas pelaksanaan Konggres yang telah sekitar enam bulan melakukan konsolidasi dan sosialisasi, keberhasilan ini merupakan kulminasi dari sebuah usaha yang sistematis yang dilakukan oleh seluruh pejuang kemerdekaan bangsa Papua.

Namun bagi pemerintah RI, pelaksanaan Konggres Rakyat Papua tersebut merupakan tindakan makar yang mengancam stabilitas negara Indonesia. Pemerintah Indonesia secara resmi menolak serta tidak mengakui hasil Konggres tersebut. Pelaksanaan Konggres itu sendiri merupakan tindakan yang menohok pemerintahan Gus Dur, yang sempat secara pribadi akan memberikan sumbangan dana pada panitia konggres. Gus Dur sendiri secara pribadi merasa dibohongi karena beliau yang telah mengizinkan pelaksanaan Konggres tersebut. Dalam jumpa pers di Istana Negara, Gus Dur menyatakan bahwasanya panitia Konggres telah membohongi dirinya karena panitia telah menjamin bahwasannya tidak akan ada warga asing yang hadir didalam acara tersebut dan semua warga Papua berhak ikut serta dalam Konggres. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwasannya terdapat peninjau yang merupakan warga asing dan kelompok-kelompok warga Papua yang pro-Indonesia dilarang hadir di acara tersebut.¹⁴

Berbagai bentuk tanggapan mengenai pelaksanaan Konggres Rakyat Papua tersebut juga bermunculan. Ketua DPR Akbar Tanjung, Ketua Fraksi Reformasi Hatta Rajasa dan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Taufiqurrahman meminta presiden untuk bertindak tegas terhadap pernyataan pemisahan Propinsi Papua dari Republik Indonesia. Akbar Tanjung bahkan mengungkapkan bahwa Presiden tidak perlu ragu untuk menggunakan TNI dalam usaha menjaga keutuhan wilayah RI.¹⁵

Paska pelaksanaan Konggres Rakyat kondisi politik di Papua semakin memanas. Rakyat Papua semakin tidak terkendali dalam mengekspresikan semangat nasionalismenya yang haus akan makna merdeka. Kerusuhan dan berbagai bentuk kekerasan lainnya semakin tidak terbendung. Pertikaian

¹⁴ **Gamma**, 7 Juni 2000.

¹⁵ **Kompas**, 5 Juni 2000.

seringkali terjadi melibatkan rakyat pendukung kemerdekaan dengan TNI maupun Polri. Bahkan kekerasan terhadap warga pendatang menunjukkan gejala yang meningkat. Beberapa peristiwa yang menghangatkan kondisi politik di Papua paska pelaksanaan Kongres antara lain.¹⁶

1. pada tanggal 22 Agustus 2000, kerusuhan terjadi di Sorong akibat bentrokan antara aparat keamanan melawan satgas Papua setelah pengibaran bendera Bintang Kejora di depan gereja Immanuel Boswesen. Kerusuhan itu mengakibatkan 3 orang tewas dan 5 luka-luka.
2. pada tanggal 5 September 2000 kota Manokwari dilanda kerusuhan yang dipicu oleh adanya bentrokan antara Brimob melawan satgas Papua yang mempertahankan berkibarnya bendera Bintang Kejora. Dalam peristiwa tersebut seorang warga mengalami luka-luka.
3. pada tanggal 6 Oktober 2000 kerusuhan terjadi di Wamena yang berawal dari bentrokan antara Brimob melawan satgas Papua yang menolak penurunan bendera Bintang Kejora. Kerusuhan itu berakibat puluhan rumah dibakar dan dijarah. Diperkirakan sekitar 40 orang tewas dalam kejadian tersebut.
4. pada tanggal 11 Oktober 2000 diadakan kesepakatan antara Bupati Jayawijaya, Kapolres, Komandan Kodim, Panel Papua, Presidium Papua, dan satgas Papua di Wamena. Dalam peristiwa tersebut, Kapolda Papua Barat Brigjen (Pol) SY Wenas menyatakan bahwa sebelum tanggal 1 Desember 2000 bendera Bintang Kejora akan diturunkan dari seluruh Papua.
5. pada tanggal 18 Oktober 2000 dua orang guru yang lolos dari penjagaan massa di Tiom menyatakan bahwasannya di Wamena sekitar 65 warga pendatang dikurung oleh warga lokal dan diancam dibunuh apabila bendera Bintang Kejora diturunkan oleh aparat keamanan atau oleh anggota Presidium Dewan Papua.
6. tanggal 4 November 2000 kota Merauke dilanda kerusuhan yang mengakibatkan 4 orang tewas dan 14 lainnya mengalami luka-luka. Kerusuhan sendiri diawali oleh perkelahian antara dua kelompok pemuda, yang berlanjut

¹⁶ Kompas, 3 Desember 2000.

- dengan penyerbuan, penjarahan, penganiayaan terhadap warga pendatang dan penurunan bendera Merah putih oleh satgas Papua.
7. tanggal 11 November 2000 kerusuhan melanda pasar Abepura, Jayapura, akibat pertikaian suku Wamena dengan warga pendatang asal Makassar yang mengakibatkan 11 orang luka ringan.
 8. tanggal 28 November 2000 Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua Thaha Al Hamid ditangkap dengan tuduhan melakukan tindakan Makar.
 9. tanggal 29 November 2000 Ketua Presidium Dewan Papua Theys H Eluay dan Pendeta Herman Awom, moderator Presidium Dewan Papua ditangkap dengan tuduhan yang sama.
 10. tanggal 2 Desember 2000 insiden terjadi pada peringatan ke-39 Hari Papua Merdeka di Merauke. Kejadian tersebut berawal dari diturunkannya bendera Merah Putih dan dikibarkannya bendera Bintang Kejora oleh sekelompok warga pro-kemerdekaan di lapangan Pemda Merauke. Korban jiwa tercatat sejumlah 8 orang tewas dan 5 luka-luka.

Penangkapan Theys H. Eluay beserta empat orang pimpinan teras PDP pada tanggal 28-29 November 1999 ternyata malah menimbulkan konflik diantara para pejabat pemerintahan Indonesia. Konflik muncul ketika Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan telah meminta Kapolda Papua S.Y Wenas untuk menanggukhan penahanan Theys dan kawan-kawan yang ternyata malah ditanggapi dingin oleh para bawahannya. Tanggapan dingin berasal dari para Menteri yang berada dalam komando Menteri Politik Sosial dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan Kapolri, S. Bimantoro meminta Kapolda Papua untuk meneruskan berkas pemeriksaan Theys H Eluay beserta kawan-kawannya ke Kejaksaan. Menurut sebagian pejabat pemerintahan, termasuk para wakil rakyat yang duduk di DPR maupun MPR, pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut merupakan suatu bentuk intervensi.

III.1.4 Meninggalnya Theys H. Eluay

Kondisi politik di Propinsi Papua semakin memanas ketika pada tanggal 10 November 2001 terdengar kabar penculikan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua, Theys H Eluay. Berita semakin mengejutkan ketika pada keesokan harinya

Theys ditemukan meninggal dalam kendaraan pribadinya.¹⁷ Theys H Eluay kemudian dikebumikan pada tanggal 17 November 2001 di desa kelahirannya Sentani diiringi tangisan para pendukungnya.¹⁸

Kematian Theys ini sangat mengejutkan semua pihak, terutama bangsa Papua yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Kematian Theys ini juga semakin memperkeruh permasalahan antara pemerintah Indonesia dengan bangsa Papua. Apalagi dalam kurun waktu terakhir ini, ketika rakyat Papua sedang gencar-gencarnya menuntut kemerdekaannya dari Indonesia, Theys merupakan sosok yang dijadikan simbol perjuangan oleh bangsa Papua yang sedang rindu akan kebebasan sejati. Theys secara pribadi dikenal sebagai sosok yang moderat, karena bersedia dan dapat berdialog dengan pemerintah Indonesia, dan pada batas-batas merupakan tokoh yang dapat mempersatukan beragam gerakan atau organisasi kemerdekaan bangsa Papua.

Pembunuhan Theys semakin menyulitkan serta menyudutkan pemerintah dalam usahanya untuk meredam konflik di Papua. Kematian tokoh yang getol memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua ini semakin meningkatkan rasa tidak percaya di kalangan rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Rakyat Papua semakin menyangsikan kemauan baik pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakan politik berupa pemberian otonomi khusus untuk Papua yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2002. Dengan kata lain menjelang pemberian status otonomi khusus, rakyat Papua telah diberikan rasa sangsi dan keraguan terhadap niat tulus pemerintah Indonesia. Kematian Theys semakin memperburuk citra pemerintah Indonesia apabila tidak segera diusut secara tuntas dan transparan mengenai siapa tokoh dan motif yang ada di belakang fenomena tersebut.

III.2 Organisasi Papua Merdeka Dan Sepak Terjangnya

Semangat bangsa Papua untuk menuntut kemerdekaan kepada pemerintah Indonesia memang secara gencar muncul pada tahun 1998 setelah tumbanganya

¹⁷ Kompas, 11 November 2001

¹⁸ Kompas, 18 November 2001.

rezim Soeharto. Namun perlawanan terhadap keberadaan pemerintah Indonesia di tanah Papua sudah cukup lama dilakukan oleh beberapa kelompok rakyat Papua yang anti Indonesia. Perlawanan tersebut telah dilakukan jauh sebelum tanah Papua bergabung ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Perlawanan tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lebih dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Nama Organisasi Papua Merdeka pada awalnya merupakan gelar yang dikenalkan oleh pemerintah Indonesia beserta perangkat keamanannya untuk menyebut setiap organisasi atau faksi baik di Papua maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putri Papua yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah ini pertama kali muncul di Manokwari pada tahun 1964 setelah munculnya organisasi yang menamakan dirinya sebagai Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat. Pada saat pemerintah RI mulai melakukan tindakan tegas terhadap organisasi-organisasi yang dinyatakan terlarang di Papua, nama tersebut semakin dikenal, terutama setelah pemerintah melakukan penangkapan terhadap pimpinan OPM Terianus Aronggear (SE) dan kawan-kawan. Nama OPM semakin terkenal saat meletusnya pemberontakan senjata yang dipimpin oleh Permenas Ferry Awom pada tahun 1965 di Manokwari, serta berbagai pemberontakan atau aksi militer sporadis di berbagai daerah lainnya di Papua.

III.2.1 Cikal Bakal Lahirnya OPM

OPM pada awalnya terdiri dari dua faksi utama. Pertama, organisasi atau faksi yang didirikan oleh Aser Demotekay pada tahun 1963 di Jayapura.¹⁹ Faksi ini bergerak dibawah tanah. Pada awal mula munculnya organisasi ini mengambil jalan kooperatif dengan pemerintah Indonesia dan memiliki ideologi perjuangan yang bersifat Cargo dan bercirikan spiritual, yaitu suatu gerakan yang berideologi campuran antara agama adat dan agama kristen. Gerakan pimpinan Aser Demotekay ini baru muncul ke permukaan pada tahun 1970 setelah selesainya pelaksanaan Pepera.

¹⁹ Tuhana Taufiq Andrianto, *Op.Cit.*, hal. 120

Bentuk perjuangan yang dilaksanakan oleh Aser Demotekay bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat dengan bentuk kooperatif dengan pemerintah Indonesia. Secara terang-terangan Aser Demotekay meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengakui kedaulatan Papua Barat sesuai dengan janji Alkitab, janji leluhur Papua dan janji Tanah Papua bahwa bangsa yang terakhir terbentuk dan menuju akhir jaman adalah bangsa Papua Barat.

Gerakan sangat aktif dalam proses perekrutan anggota. Aser Demotekay beserta anak-anak binaannya seperti Jacob Pray aktif membina para pengikutnya di Kabupaten Jayapura terutama di Kecamatan Pantai Timur, Pantai Barat, Depapare dan Genyem. Dalam membina massa pengikutnya mereka selalu memberikan pengarahan-pengarahan yang berkaitan dengan agama, adat-istiadat/gerakan cargo, dan melarang tindakan radikal dalam mencapai tujuan kemerdekaan Papua Barat. Untuk menangkis tindakan dari pihak keamanan, Aser Demotekay sengaja tidak mengungkapkan nama-nama para pengikutnya. Hal tersebut terungkap ketika setiap kali Aser Demotekay ditangkap dan diinterogasi pihak keamanan, dia selalu menyatakan bahwa perbuatan-perbuatannya hanya dilakukan oleh dirinya secara pribadi.

Organisasi pimpinan Aser Demotekay ini masih bersifat sederhana dan lemah. Hal ini disebabkan karena organisasi ini merupakan bentuk gerakan *Cargo Cult*²⁰ versi baru dan sangat tergantung pada pimpinan. Sehingga bila Demotekay berada dalam kondisi statis maka gerakan ini terhenti pula secara sendirinya, baik dalam proses pengkaderan maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya dalam memperjuangkan cita-cita gerakan. Selain itu gerakan ini tidak memiliki perencanaan yang matang dalam setiap aksi-aksi yang dilakukan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga hanya berupa pengarahan-pengarahan, penyampaian pesan-pesan, serta harapan-harapan dan dilakukan secara temporer sesuai dengan kesempatan dan kebutuhan. Pesan-pesan yang disampaikan pada umumnya merupakan pesan

²⁰ Suatu bentuk entitas kesadaran sosial yang diekspresikan dalam suatu hubungan magis antara manusia dengan kekuatan gaib atau suatu harapan mesianis yang kerap disimbolisasikan dengan datangnya "Ratu Adil" yang wujudnya berbeda dalam persepsi kelompok atau suku yang satu dengan yang lain. Lihat dalam **Kompas**, 22 Januari 2001.

sederhana yaitu agar rakyat bersabar dalam menempuh perjuangan menuju pembebasan Papua Barat. Namun Aser Demotekay sendiri tetap menjalin hubungan dengan setiap komponen perjuangan baik yang berada di pedalaman Papua maupun di luar negeri.

Pada prinsipnya terdapat dua alasan utama yang dijadikan landasan bagi Aser Demotekay dalam mendirikan OPM, yaitu:²¹

1. melandaskan diri pada pesan-pesan spiritual bahwa pada masa akan datang Papua harus mencapai kemerdekaannya sebagai bangsa yang terakhir dan menuju kepada akhir zaman.
2. Sebagai bangsa Papua yang persoalannya masih dipersengketakan oleh Belanda dan RI tanpa melibatkan bangsa Papua sendiri, maka bangsa Papua harus diberikan kesempatan untuk merdeka lepas dari Indonesia dan untuk itu kemerdekaan bangsa Papua harus dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia.

Faksi yang kedua adalah OPM pimpinan Terianus Aronggear (SE) yang didirikan di Manokwari tahun 1964. Pada mulanya faksi ini bergerak dibawah tanah untuk menyusun kekuatan melawan pemerintah Indonesia baik secara politik maupun secara militer. Terianus Aronggear (SE) menamakan gerakannya sebagai "Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat". Organisasi ini kemudian lebih dikenal sebagai OPM. Faksi ini lebih terorganisir secara rapi dibandingkan faksi terdahulu. Susunan Kepemimpinan OPM ini sebagai berikut:²²

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Ketua Umum | : Terianus Aronggear (SE) |
| 2. Ketua I | : Melkianus Horota |
| 3. Ketua II | : Kaleb Taran |
| 4. Ketua III | : Melkianus Watofa |
| 5. Sekretaris | : Hendrik Joku |
| 6. Bendahara | : Korinus Krey |
| 7. Penghubung | : A.G Samaduda |
| 8. Logistik | : Go Siem San |
| 9. Panglima Perang | : Permenas Ferry Awom |

²¹ Tuhana Taufiq Andrianto, *Op.Cit.*, hal. 123

²² *Ibid.*, hal. 124

- 10. Wakil Panglima Perang I : Julianus Wanma
- 11. Wakil Panglima Perang II : Geradus Wompere
- 12. Komandan Sektor Militer I : J. Arumisore
- 13. Komandan Sektor Militer II : Simson Wanma
- 14. Komandan Sektor Militer III : A. Wabdaron
- 15. Komandan Sektor Militer IV : G. Boseran
- 16. Kepala Polisi : J. Rumbobiar

Sebagai Ketua Umum organisasi Terianus Aronggear (SE) kemudian menyusun suatu dokumen perjuangan yang niatnya akan diselundupkan ke PBB. Dokumen ditujukan untuk menanyakan kembali status Papua dan meminta PBB untuk meninjau kembali hasil Persetujuan New York 15 Agustus 1962. Menurutny persetujuan itu tidak adil karena tidak melibatkan wakil bangsa Papua dalam perundingan mewakili pihak yang disengketakan. Dokumen itu juga berisi suatu rancangan tentang kemerdekaan negara Papua Barat dengan disertai susunan kabinetnya. Dokumen juga berisi permintaan agar PBB segera membuka sidang umum untuk membahas kembali masalah Papua, serta memberikan dukungan atas kemerdekaan bangsa Papua Barat sebagai suatu bangsa dan negara yang berdaulat dan berdiri sendiri. Adapun susunan kabinet yang dibentuk oleh faksi pimpinan Terianus Aronggear (SE) adalah sebagai berikut.²³

- Presiden : Markus Kaisiepo
- Wakil Presiden : Nicolaas Jouwe
- Menteri Luar Negeri : Terianus Aronggear (SE)
- Menteri Perdagangan : Herman Womsiwor
- Menteri Perkonomian : Kaleb Taran
- Menteri Kehutanan : Melkianus Horota
- Menteri Pendidikan : Melkianus Watofa
- Panglima Perang : Permenes Ferry Awom.

Tetapi dokumen itu gagal diselundupkan karena pada tanggal 12 Mei Terianus Aronggear (SE) ditangkap di Biak sewaktu hendak melewati wilayah

²³ *Ibid.*, hal. 125

Papua New Guinea. Terianus Aronggear (SE) kemudian dikirim kembali ke Manokwari dan ditahan guna menjalani pemeriksaan oleh pihak keamanan. Setelah penangkapan itu, pihak OPM kemudian melancarkan pemberontakan bersenjata dibawah pimpinan Permenas Ferry Awom pada tanggal 28 Juli 1965 di Manokwari. Pemberontakan ini dilakukan oleh sekitar 400 pasukan bersenjata campuran yang menyerang asrama Yonif 641 Cendrawasih I di Arfai. Semenjak saat itu perjuangan OPM dilakukan dengan perjuangan bersenjata melawan aparat keamanan/TNI dalam bentuk gangguan-gangguan keamanan serta bentuk-bentuk teror-teror lainnya.

III.2.2 Penyebab Munculnya OPM

Gerakan OPM pada dasarnya kurang mendapat perhatian dari masyarakat maupun pers selama tidak melakukan tindakan kekerasan. Namun menurut pihak keamanan OPM tetap beroperasi dan menimbulkan gangguan-gangguan keamanan yang terwujud dalam berbagai kasus kekerasan yang banyak memakan korban jiwa. Semenjak tahun 1963 pemberontakan OPM terus menerus mengancam keamanan dan kestabilan Propinsi Papua. Menurut Djopari berdasarkan wawancara dengan tokoh-tokoh OPM didalam maupun luar negeri terdapat beberapa hal yang menyebabkan timbulnya Pemberontakan OPM, yaitu:²⁴

1. Rasa nasionalis Papua, yaitu rasa senasib dan seperjuangan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara Papua Barat.
2. Hendak meningkatkan dan mewujudkan janji Belanda yang tidak sempat direalisasikan akibat integrasi dengan Indonesia secara paksa dan tidak adil.
3. Persetujuan politik antara Belanda dan Indonesia yang melahirkan Persetujuan New York 1962 tidak melibatkan wakil bangsa Papua sebagai pihak yang dipersengketakan.
4. Latar belakang sejarah yang berbeda antara rakyat Papua Barat dengan rakyat Indonesia.

²⁴ *Ibid.*, hal.127-128

5. Adanya perbedaan sosial, politik maupun ekonomi diantara rakyat Papua Barat dengan rakyat Indonesia.
6. Eksploitasi kekayaan alam Papua oleh bangsa Indonesia secara besar-besaran tidak diimbangi dengan usaha untuk memperbaiki taraf hidup rakyat Papua Barat.
7. Represi yang ditujukan kepada rakyat Papua oleh pemerintah Indonesia semenjak Integrasi hingga saat ini.
8. Hendak diwujudkannya cita-cita dari gerakan Cargo, yaitu suatu bangsa dan negara Papua Barat yang makmur di akhir zaman.

III.2.3 Kiprah OPM Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Papua

OPM pada dasarnya merupakan sebuah organisasi yang bertujuan menyadarkan bangsa Papua Barat dari tidur panjangnya akibat tekanan pihak-pihak yang mengeksploitasi dan memeras demi pribadi maupun golongannya tanpa mengindahkan segi-segi kemanusiaan yang sejati. Jalan yang ditempuh oleh kebanyakan kelompok-kelompok OPM tersebut adalah dengan melakukan gangguan-gangguan keamanan terhadap fasilitas-fasilitas milik bangsa Indonesia maupun kaum pendatang yang dianggap telah mengeksploitasi kekayaan alam tanah Papua. Gangguan-gangguan keamanan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa tidak aman terhadap para pendatang yang dianggap telah mencuri kekayaan dan menyengsarakan bangsa Papua.

OPM sendiri terdiri dari kelompok-kelompok yang tersebar di seluruh penjuru pedalaman Papua. Kelompok-kelompok OPM itu antara lain:²⁵

1. Kelompok Hans Bomay di perbatasan Kerom dengan PNG

Kelompok ini banyak menimbulkan ketakutan masyarakat yang tinggal di wilayah Kerom, terutama masyarakat transmigran yang tinggal didaerah Arso. Beberapa kali transmigran Arso dibunuh secara sadis. Pada tahun 1999 kelompok ini melakukan peristiwa yang mengegegerkan, yaitu:

- membunuh empat karyawan PTP II Arso pada tanggal 5 Mei 1999.

²⁵ Theo P.A Van de Broek dan J. Budi Hermawan, *Op.Cit.*, hal.90-92.

- menyandera 11 orang dan baru dibebaskan pada tanggal 2 Juni 1999. Penyerahan sandera dilakukan di wilayah Papua New Guinea, dimana kemudian sandera kemudian dikirim untuk dikarantina.
2. Kelompok Mathias Wenda di Vanimo, PNG
Berbeda dengan kelompok Hans Bomay, kelompok ini tidak melakukan tindakan membunuh atau menyandera. Mereka cenderung melakukan tindakan dialog dengan pihak Kodam Trikora. Mathias Wenda merupakan Panglima Tertinggi OPM/TPN (Tentara Pembebasan Nasional) yang berpusat di Vanimo Papua New Guinea.
 3. Kelompok Willem Onde di Kabupaten Merauke
Pada bulan April 1997 kelompok ini menyerahkan diri kepada pihak keamanan di Mindiptana. Mereka menyerahkan senjata dan diberi perumahan di Mindiptana, walaupun demikian sang pemimpin lebih memilih menetap di Merauke. Kelompok ini terkadang masih melakukan teror terhadap warga pendatang.
 4. Kelompok Tadeus Yogi di Paniai
Kelompok ini sudah beroperasi sejak 1982. Sebagian rakyat Papua menganggap kelompok ini merupakan kepanjangan tangan TNI untuk melakukan pengacauan dan berbagai tindakan teror lainnya. Tindakan TNI untuk memeralat kelompok ini ditujukan untuk tetap mempertahankan status DOM di Papua, terutama di daerah Paniai.
 5. Kelompok Kelly Kwalik di Pegunungan Tengah
Kelly Kwalik merupakan Panglima OPM/TPN Komando Daerah Operasi III Nenangawi Pegunungan Tengah. Nama Kelly Kwalik sangat terkenal dengan peristiwa penyanderaan di wilayah Mapenduma diawal tahun 1996 yang menyita perhatian masyarakat di dalam dan luar negeri. Kendati jarang muncul secara terbuka dalam berbagai pertemuan resmi, Kelly menjadi lambang perjuangan banyak orang (lebih-lebih yang berasal dari suku Amungme). Namanya disebut-sebut berkaitan dengan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Timika pada tanggal 10 November 1999 dan pengangkatan Theys H.

Eluay sebagai Kepala Suku Besar Masyarakat Papua pada tanggal 12 November 1999.

6. Kelompok Paulus Kaladana dan Karel Uropkulin di Pegunungan Bintang

Kedua kelompok OPM ini bergerak di wilayah Pegunungan Bintang. Meski tidak banyak muncul di tengah masyarakat sepanjang 1999, keberadaannya tidak dapat dianggap remeh. Mereka kerap kali menjadi alat bagi aparat keamanan dalam untuk mempengaruhi masyarakat. Dalam isu kemerdekaan keamanan Papua dan penyerangan oleh pihak OPM ke Oksibil, misalnya, ternyata hanya merupakan cara TNI untuk mengintimidasi masyarakat. Tentu saja masyarakat takut dengan berita-berita yang tampak akurat tersebut, bahkan masyarakat dibikin tegang dengan berbagai kejadian, yang sebenarnya hanya rekayasa.

Selain menempuh jalan kekerasan, OPM juga secara aktif mencari dukungan dari dunia internasional dalam mewujudkan cita-cita perjuangannya. Pencarian dukungan ke luar negeri mulai dilakukan semenjak tahun 1951 ketika Papua Barat masih berada dalam sengketa antara Belanda dan RI. Pencarian dukungan dilakukan untuk terutama untuk mencari dukungan politik selain mencari dukungan persenjataan atau bantuan militer. Perjuangan politik di luar negeri didasarkan pada tiga alasan sebagai berikut:²⁶

1. Rakyat Papua menolak masuknya Indonesia yang dianggap sebagai negara Ekspansionis.
2. Secara geografis maupun etnologis rakyat Papua tidak termasuk dalam Indonesia.
3. Rakyat Papua menolak Paternalisme Indonesia dan sadar diri menurut haknya yang utama atas tanah airnya sendiri.

Bertolak dari ketiga alasan tersebut maka para pejuang OPM melakukan perjuangan politik di luar negeri dengan menggunakan dua asumsi; pertama, bahwasannya dunia tidak mengetahui permasalahan utama bangsa Papua, dan yang kedua, adanya informasi sepihak dari Belanda maupun Indonesia mengenai

²⁶ Tuhana Tufik Andrianto, *Op.Cit.*, hal. 144

masalah bangsa Papua yang perlu dijelaskan kembali secara fair. Sehingga sangat memungkinkan bagi OPM untuk menarik simpati dunia internasional dengan menjadikan isu-isu seperti eksploitasi, kolonialisasi dan pelanggaran HAM untuk menggalang kekuatan di luar negeri dalam usahanya melawan pemerintah RI.

Pada tanggal 16 Januari 1951 OPM mengirimkan untuk pertama kali delegasinya ke Belanda untuk meminta bantuan. Delegasi ini dipimpin oleh Johan Ariks, sekretaris Nicolaas Jouwe dan dua orang anggota yaitu Markus Kaisiepo dan Abdullah Arfan. Merekalah yang menandatangani suatu pernyataan terdiri dari 16 pasal yang intinya menolak Indonesia dan meminta pemerintah Belanda untuk memerintah dan memimpin Papua hingga mencapai kemerdekaannya. Selain di Belanda perjuangan OPM di luar negeri juga dilakukan di Jepang oleh Herman Worsiwor. Jaringan OPM di luar negeri kemudian semakin meluas ke beberapa negara Eropa dan sangat berorientasi kepada barat. Hingga kemudian perjuangan OPM tersebut mendapat dukungan dari beberapa akademisi senior beraliran Marxis di Universitas Stockholm, Swedia.

Selain di benua Eropa perjuangan OPM di luar negeri juga meluas hingga di benua Afrika. Pusat perjuangan OPM di Afrika berada di Dakkar, Senegal yang didirikan pada tahun 1976 dengan dukungan penuh dari Presiden Senegal, Senghor. OPM juga mendirikan markas perjuangannya di negara tetangganya yang sama-sama berumpun Melanesia yaitu Papua New Guinea, walaupun sebagian rakyat PNG tidak menyetujui perjuangan OPM tersebut. Di Australia OPM melakukan hubungan erat dengan Fretilin. Kerjasama dilakukan dengan dimotori oleh Andreas Ajamiseba di pihak OPM dan Ramos Horta di pihak Fretilin. Mereka yang sama-sama anti Indonesia, bekerjasama dalam mencari dukungan dana dan politik dari dunia Internasional.

III.3 Usaha-Usaha Pemerintah Indonesia Dalam Meredam Gejolak Politik Dan Keamanan di Papua

Pada dasarnya, jauh hari sebelum tuntutan kemerdekaan dari bangsa Papua muncul, pemerintah Indonesia telah menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan yang ditujukan guna meredam aksi-aksi yang bertujuan untuk

mendirikan negara Papua merdeka. Namun pada kenyataannya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia sendiri malah menimbulkan kesenjangan yang luas diantara rakyat Papua sendiri. Menurut Tuhana Taufiq Andrianto terdapat dua pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi geliat aksi-aksi bersenjata yang dilancarkan oleh OPM pada masa Orde Baru yang ternyata malah menimbulkan konflik yang luas di kemudian hari, yaitu:²⁷

1. Pendekatan Keamanan, yakni dengan meningkatkan tugas-tugas intelijen guna menangkal setiap gerakan politik maupun bersenjata yang dilakukan oleh pihak OPM maupun kelompok-kelompok bangsa Papua lainnya yang menuntut pengakuan kedaulatan dari pemerintah Indonesia. Salah satu wujud dari pendekatan ini adalah dengan dijadikannya Papua sebagai Daerah Operasi Militer sebagai usaha untuk mengawasi secara ketat munculnya kekuatan-kekuatan rakyat Papua yang bertujuan memisahkan diri dari wilayah Indonesia.
2. Pendekatan Kesejahteraan, yakni dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang menyeluruh hingga ke pelosok pedalaman Papua.

Namun ternyata kedua pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru tersebut mengalami kegagalan karena sepanjang kurun waktu pelaksanaan DOM di Papua gangguan-gangguan keamanan yang dilakukan oleh OPM tetap saja muncul dan menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Bahkan ketika rezim Orba tersebut runtuh aspirasi rakyat Papua untuk merdeka semakin mengental dalam bentuk aksi-aksi yang semakin giat dilakukan di seluruh pelosok Papua.

Pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk sebagai salah satu wujud pelaksanaan amanat Reformasi ternyata pada gilirannya kurang mampu mengatasi masalah-masalah di Papua. Solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintahan baru tersebut masih menunjukkan konsep yang umum, yang mencerminkan hubungan antara pusat dan daerah secara nasional, belum pada pelaksanaan konsep khusus yang berkaitan dengan kasus separatisme di Papua. Solusi yang ditawarkan oleh

²⁷ *Ibid.*

pemerintah Indonesia dalam meredam potensi konflik di Papua Barat antara lain:²⁸

1. Pengambilan pendapatan yang lebih besar oleh daerah.
2. Pemberian otonomi yang luas melalui UU No. 22 tahun 1999.
3. Pemberian jabatan yang lebih banyak kepada penduduk asli Papua.
4. Melakukan pemekaran wilayah Papua menjadi tiga propinsi.
5. Membuka dialog yang luas dalam rangka menampung aspirasi masyarakat.

²⁸ Sayadi (ed), *Aceh, Jakarta, Papua*, Yappika, Jakarta, 2001, hal.116.

**BAB IV****SEBAB-SEBAB MENINGKATNYA
GERAKAN KEMERDEKAAN DI PAPUA**

Keinginan rakyat Papua untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri merupakan tuntutan yang telah menggema sejak awal integrasi wilayah Papua Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia semakin meluas semenjak runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Tercatat semenjak bulan Juli 1998 hingga November 2001 (meninggalnya Theys H. Eluay), bendera Bintang Kejora telah dikibarkan di hampir seluruh pelosok Papua. Sepanjang kurun waktu tersebut jatuhnya korban jiwa seakan tidak terhitung jumlahnya. Kerusuhan dan teror yang terus meningkat, yang berimbas pada ketidakstabilan kondisi politik dan keamanan di Papua, ditambah dengan tidak tanggapnya pemerintah dalam menerapkan manajemen konflik yang tepat semakin memperuncing permasalahan bangsa Papua.

Berbagai pendapat telah dikemukakan dalam mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang ada di Papua. Berbagai bentuk upaya guna mencari akar konflik telah banyak diusahakan oleh berbagai pihak, baik dari pihak pihak pemerintah maupun pihak-pihak lain yang peduli terhadap masalah di Papua. Pendekatan secara persuasif dan dialogis juga telah ditempuh oleh pemerintah untuk meredam gejolak rakyat Papua dalam menuntut kemerdekaan. Bahkan pendekatan keamanan, diwujudkan dalam bentuk pemberian status DOM kepada Papua, yang dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto telah gagal meredam aksi-aksi brutal OPM. Namun pada kenyataannya semangat nasionalisme bangsa Papua tidak dapat begitu saja dimatikan, bahkan oleh derasnya laju pembangunan dan modernisasi disegala bidang yang menjadi program pemerintah ORBA.

Ketidakadilan, eksploitasi, kesewenang-wenangan dan represi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dianggap sebagai pemicu meningkatnya tuntutan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Namun secara lebih

gambang penulis menyajikan empat alasan mengapa aksi-aksi gerakan kemerdekaan di Papua semakin meningkat pada masa reformasi, yaitu:

1. Internal History
2. Ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat
3. Pergantian kekuasaan nasional/Reformasi
4. Dukungan masyarakat internasional

IV.1 Internal History

Alasan kesejarahan ini merupakan alasan yang banyak digunakan oleh bangsa Papua Barat dalam menuntut pemisahan wilayah Papua dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh rakyat Papua menganggap bahwasannya sejarah bangsa mereka berbeda dengan sejarah bangsa Indonesia pada umumnya. Terdapat beberapa fakta yang mendasari munculnya asumsi diatas, yaitu:¹

1. *Nederlandsch Nieuw Guinea* (Papua Barat) tidak termasuk dalam Hindia Belanda berdasarkan deklarasi Batavia tanggal 7 Maret 1910. Berdasarkan deklarasi tersebut wilayah Hindia Belanda adalah Aceh sampai dengan Maluku, sedangkan wilayah Papua Barat berada langsung dibawah pengawasan pemerintah Belanda di Nederland.
2. Tokoh-tokoh Papua terutama kaum mudanya, tidak pernah terlibat dalam pergerakan bangsa Indonesia yang menuntut kemerdekaannya dari Belanda, yang dimulai tahun 1908 dengan berdirinya Budi Utomo hingga mencapai puncaknya pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dalam peristiwa sejarah tersebut pemuda-pemuda Papua tidak ada satupun yang turut serta didalamnya.
3. Perbedaan secara fisik dan budaya diantara kebanyakan bangsa Indonesia dengan bangsa Papua. Perbedaan ini secara tegas diakui oleh Mohammad Hatta dalam mempertimbangkan batas-batas wilayah Indonesia menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam pernyataannya Hatta menegaskan

¹ Sayadi (ed), *Aceh, Jakarta, Papua*, Yappika, Jakarta, 2001, hal.92-94

bahwasannya bangsa Papua merupakan ras Negroid, dan berumpun bangsa Melanesia, maka hendaknya mereka dibiarkan untuk menentukan nasibnya sendiri.

4. Rakyat Papua merasa tidak ikut ambil bagian dalam proses Proklamasi 17 Agustus 1945. Papua Barat baru menjadi perhatian pemerintah Indonesia setelah tiga tahun merdeka dari Belanda. Untuk menarik wilayah Papua kedalam wilayah RI sejak tahun 1948 pemerintah Indonesia telah mengembangkan propaganda dan memasukkan infiltran ke dalam wilayah Papua Barat. Pendapat ini ditunjukkan dengan adanya fakta-fakta pembuangan tokoh-tokoh Indonesia ke daerah Sentani dan Boven Digul.

Ketika pada tahun 1948 Indonesia mulai melakukan upaya-upaya untuk merebut Papua Barat maka semenjak tahun tersebut pula Belanda telah mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Hal ini dibuktikan dengan:² (1) berdirinya partai-partai politik, (2) pada tahun 1957 dibentuk Dewan Distrik yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di masing-masing distrik, (3) sejak tahun 1960 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (Nieuw Guinea Raad), (4) diproklamasikannya kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Desember 1961.

Proklamasi kemerdekaan bangsa Papua Barat atas penjajahan Belanda telah dipersiapkan dan melalui proses yang panjang. Hal ini nampak dari dibentuknya Dewan Distrik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu perangkat lainnya telah dibentuk, antara lain: memiliki bendera nasional: Bintang Kejora; lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua; dasar negara: Kasih; lambang negara: Burung Cendrawasih; dan 149 pasal Undang-Undang Dasar. Kemerdekaan tersebut dalam pandangan orang Papua telah mewujudkan program dekolonisasi dari PBB bagi daerah-daerah di wilayah pasifik, termasuk Papua Barat yang belum merdeka sebelumnya. Akan tetapi kemerdekaan itu sendiri tidak berlangsung lama karena pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengumumkan seruan Trikora yang berisi: (1) gagalkan pembentukan negara

² *Ibid.*

boneka Papua buatan kolonial Belanda, (2) kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia, (3) bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Namun sekitar dua bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Februari 1962 Nieuw Guinea Raad mendeklarasikan prosedur-prosedur penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua Barat. Berbagai kelompok dalam Nieuw Guinea Raad kemudian menuntut diadakannya referendum untuk melihat aspirasi rakyat Papua Barat pada tahun 1963 dengan bantuan korps Perdamaian PBB. Tetapi ternyata kemudian pemerintah Belanda malah mengalihkan administrasi pemerintahan Papua Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), suatu badan PBB yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan sengketa wilayah Papua Barat, pada tanggal 1 Mei 1962. Menurut beberapa tokoh kemerdekaan Papua Barat pada saat itu, TNI di bawah komando Korps Perdamaian PBB memaksa pimpinan-pimpinan Papua untuk menandatangani pernyataan mencabut kembali deklarasi hak menentukan nasib sendiri, bahkan kemudian melakukan penangkapan dan penyiksaan orang-orang Papua yang mengorganisir demonstrasi menuntut plebisit kepada pihak PBB.

Pada tanggal 15 Agustus 1962 diadakan pertemuan di New York, Amerika Serikat yang ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan antara Belanda dan RI mengenai masalah Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut Belanda berhasil dipaksa untuk menandatangani isi perjanjian yang kemudian lebih dikenal dengan nama New York Agreement 1962. UNTEA kemudian menyerahkan administrasi pemerintahan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Dan bersamaan dengan itu Nieuw Guinea Raad dibubarkan digantikan dengan DPRD. Pada tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 pemerintah Indonesia mengadakan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) dibawah pengawasan PBB. Utusan PBB Ortiz Sans bertugas mengawasi secara langsung pelaksanaan PEPERA, yang ditujukan untuk menentukan pendapat rakyat Papua, apakah terus berintegrasi kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ataukah mendirikan negara sendiri. Pelaksanaan PEPERA ternyata menghasilkan keputusan bahwasannya sebagian besar rakyat Papua bersedia untuk bergabung ke dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia. hasil PEPERA ini kemudian disahkan pada tanggal 19 November 1969 melalui Resolusi PBB nomor 2504.³

Namun dimata sebagian besar rakyat Papua yang menginginkan kemerdekaan, proses bergabungnya wilayah Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil konspirasi politik diantara Indonesia dan Amerika Serikat yang menggunakan PBB sebagai alat untuk melegitimasi persekongkolan itu. New York Agreement sendiri menurut mereka tidak memberi tempat yang memadai bagi prosedur-prosedur penentuan nasib sendiri yang dikehendaki oleh masyarakat Papua dan dideklarasikan oleh Nieuw Guinea Raad yang harus diimplementasikan dalam plebisit ataupun "*Act Of Free Choice*". Padahal sebagian masyarakat Papua percaya bahwasannya persyaratan yang dideklarasikan pada tanggal 16 Februari 1962 mendapat perhatian yang layak dalam perjanjian New York, tetapi tidak dilaksanakan atau diterapkan dalam PEPERA. Pelaksanaan PEPERA tidak menjalankan azas *One Man One Vote* seperti yang disyaratkan dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya proses pelaksanaan penentuan pendapat berada di bawah pengawasan secara ketat oleh pihak TNI. Hal ini nampak dari jumlah wakil-wakil yang telah ditentukan sebanyak 1.026 orang, kurang lebih hanya 20% atau 200 orang yang memilih.⁴ Pemilihan juga tidak berlangsung secara bebas sebagaimana disebutkan dalam pasal XVII, XVIII dan XXII dari New York Agreement. PBB juga tidak berperan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut. Bahkan wakil PBB sendiri Ortiz Sanz juga menyatakan keberatan atas hasil pelaksanaan PEPERA.

Dari berbagai argumen diatas nampak bahwasannya berdasarkan segi sejarah rakyat Papua menolak bergabung dengan Indonesia. Segala proses pengintegrasian wilayah Papua Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut sebagian besar rakyat Papua adalah hasil rekayasa politik yang bersifat membodohi rakyat Papua. Oleh karena itu wajar kiranya bila tuntutan untuk merdeka tetap ada sepanjang sejarah bangsa Papua.

³ *Ibid.*

⁴ Sayadi (ed), *Op. Cit.*, hal. 97.

Selain alasan diatas, keinginan rakyat Papua untuk merdeka juga dipicu oleh adanya kepercayaan *Cargo Cult* yang hidup dikalangan rakyat Papua secara turun temurun. *Cargo Cult* yaitu suatu sistem kepercayaan yang berwujud harapan mesianis yang seringkali disimbolkan mengenai datangnya Ratu Adil yang bentuknya berbeda dalam persepsi masing-masing kelompok suku di Papua. Kepercayaan ini tumbuh subur sepanjang sejarah kebudayaan rakyat Papua, dimana hampir dalam setiap perlawanan yang muncul di Papua menjadikan sistem kepercayaan ini sebagai inspirasi untuk menggalang kekuatan. Salah satu pemberontakan rakyat Papua menentang pemerintah RI yang diinspirasi oleh kepercayaan ini adalah perlawanan yang dipimpin oleh Alex Degey di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 1977.⁵ Pemberontakan ini memberikan janji kepada para pengikutnya bahwasannya apabila Papua berhasil merdeka maka akan dibangun terowongan bawah tanah dari pegunungan tengah hingga Jayapura, dimana nantinya semua kebutuhan penduduk Papua akan disalurkan melalui terowongan ini. Dalam bentuk yang modern para elit intelektual Papua dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua menjadikan sistim kepercayaan ini untuk menarik simpati rakyat Papua agar mendukung aspirasi merdeka dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IV.2 Ketidakadilan Yang Menimpa Rakyat Papua

Perlakuan yang tidak adil merupakan masalah yang sering kali dikeluhkan oleh bangsa Papua selama lebih dari 38 tahun mereka berintegrasi dengan Indonesia. Kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan sosial yang tajam di Papua sepanjang kurun waktu 1962-2001 menunjukkan bahwa rakyat Papua telah diperlakukan tidak adil oleh pemerintah RI. Faktor inilah yang semakin menguatkan keberatan bangsa Papua atas integrasi wilayah Tanah Papua ke dalam wilayah RI, selain masalah sejarah yang telah diungkapkan terdahulu. Terdapat empat aspek yang dianggap oleh sebagian besar bangsa Papua sebagai sebuah bentuk ketidakadilan, antara lain:

- Eksploitasi Sumber Daya Alam

⁵ Kompas, 22 Januari 2001

- Dominasi Kaum Pendatang
- Kekerasan dan Penindasan Budaya
- Kekerasan Militer

Keempat aspek ketidakadilan tersebut yang dijadikan alasan bagi semakin meningkatnya tuntutan untuk memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IV.2.1 Eksploitasi Sumber Daya Alam

Suatu daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah hampir dapat dipastikan akan menjadi magnet bagi berbagai kepentingan. Termasuk kepentingan kaum kapitalis yang terselubung dalam bentuk kepentingan negara untuk menjalankan roda perekonomian. Pengeksploitasian kekayaan alam demi keberlangsungan negara nampak secara nyata di Papua, yang notabene merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Bumi Papua dengan ketinggian 3.000 meter dari permukaan laut menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Tanah Papua mengandung tembaga, emas, nikel, batubara dan logam dasar lainnya. Kekayaan alam di tanah Papua ditemukan pertama kali pada tahun 1936 oleh seorang geolog asal Belanda, Jean Jacques Dozy, berupa gunung bijih tembaga berkadar tinggi yang kemudian dikenal sebagai daerah Ertsberg. Temuan hebat dari wilayah yang tak dikenal itu baru ditindaklanjuti pada tahun 1960 oleh seorang manajer eksplorasi dari perusahaan Freeport Sulphur Company yang sekarang bernama Freeport-McRoran Cooper and Gold. Pada bulan Desember 1967, kegiatan eksplorasi pertama kali dilakukan setelah kontrak karya pertama ditandatangani pada Juli 1967 antara pemerintah Indonesia dengan pihak PT Freeport.⁶

Cadangan tembaga di daerah ini memang tidak berumur panjang, tetapi pada tahun 1988 tambang tembaga kedua kembali ditemukan dengan jumlah cadangan tembaga dan emas yang tidak kalah besar dari tambang yang pertama. Tambang Grasberg ini kemudian menjadi tambang yang memiliki cadangan tembaga terbesar ketiga di dunia, sekaligus tambang yang memiliki cadangan

⁶ PT Freeport Indonesia menjadi perusahaan bermodal asing pertama di Indonesia. Lihat dalam **Kompas**, 25 November 2001

emas terbesar di dunia. Pada saat ini eksploitasi tembaga dan emas oleh PT Freeport Indonesia di areal seluas 202.000 hektar itu memasuki kontrak karya kedua, yang ditandatangani tahun 1991. Produksi dari tambang ini kurang lebih 200.000 ton batu tambang perhari, sementara depositnya seberat 2,5 milyar ton batu tambang yang masih bisa bertahan hingga 35 tahun kedepan. Selain PT Freeport yang sudah sering dikenal, kini ada beberapa perusahaan lainnya yang ikut mengeksplorasi kekayaan alam di Papua. Eksplorasi itu antara lain dilakukan di Kabupaten Paniai, Yapen Waropen, Jayapura, Jayawijaya, Fakfak dan Sorong. Salah satu yang terbesar adalah di Kabupaten Sorong berupa ladang migas yang pada tahun 2000 menghasilkan sekitar 1,8 juta bbls minyak bumi dan hampir 500 ribu mscf gas bumi.⁷

Kekayaan alam lain di tanah Papua adalah kekayaan hasil Hutan. Hutan Irian yang luasnya 96% dari keseluruhan luas Papua,⁸ memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Areal hutan seluas 22 juta hektar atau sejumlah 54% dari keseluruhan luas hutan yang ada adalah hutan produksi. Produksi kayu bulat dan berbagai jenis olahannya sepanjang tahun 2000 hampir mencapai 1,5 juta meter kubik. Ini belum termasuk dengan hasil hutan yang diambil secara illegal di hutan-hutan non-produksi. Juga belum dihitung dengan jumlah hasil hutan ikutan lainnya seperti kulit masohi, rotan sagu, kayu gaharu, dan gambir. Selain dari tambang dan hasil hutan sektor perikanan di Papua juga menyumbangkan hasil yang besar. Untuk tahun 2000 saja produksi perikanan di Papua yang diusahakan oleh 56.000 keluarga telah mencapai 206.000 ton atau senilai Rp 11 trilyun.⁹

Pertanyaan kemudian yang muncul adalah mengapa dengan kekayaan alam sedemikian besar rakyat Papua tetap dalam kondisi yang memprihatinkan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan kondisi tersebut. Pertama, eksploitasi SDA telah menampilkan suatu ketidakadilan berdasarkan fakta-fakta bahwa masyarakat Papua, sebagai pemegang hak adat atas SDA tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, padahal semua konsekuensi negatif yang

⁷ *Ibid.*

⁸ Luas tanah Papua sejumlah 421.981 kilometer persegi.

⁹ *Ibid.*

muncul sudah pasti akan dipikul oleh rakyat Papua. Dalam berbagai kasus pengambilalihan tanah rakyat untuk berbagai keperluan pembangunan telah mengakibatkan hilangnya sumber-sumber ekonomi keluarga. Rakyat Papua yang tinggal di pedalaman kehilangan binatang buruan, rusaknya ekosistem lokal dan hilangnya sagu, yang merupakan bahan makanan tradisional, yang kesemuanya itu merupakan sumber yang mendukung kehidupan penduduk lokal yang cenderung masih tradisional. Penambangan juga menimbulkan kerusakan alam, seperti hilangnya Moluska (TSK) yang menjadi sumber protein rakyat pedalaman. Eksploitasi sumber daya laut seperti yang terjadi di Biak, Sorong, Fakfak dan Merauke telah merusak ekosistem laut dan populasi ikan. Sehingga masyarakat lokal yang masih bergantung pada teknologi perikanan tradisional makin sulit untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya laut bagi kesejahteraannya.

Kedua, eksploitasi kekayaan alam di Papua dilakukan dengan berdasarkan pada ideologi pembangunan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat Papua, melalui langkah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan dukungan stabilitas politik dan keamanan yang tinggi pula. Namun pada kenyataannya ideologi pembangunan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu bentuk program pembangunan yang hanya mengejar kemajuan material atau fisik dengan memakai indikator ekonomi, telah menempatkan masyarakat Papua pada posisi yang marginal. Di Papua, pembangunan yang dilakukan juga lebih banyak ditujukan pada eksploitasi sumber daya alam, seperti tanah, hutan, tambang, dan laut untuk kepentingan umum yang kurang jelas maksudnya, sedangkan masyarakat Papua yang secara turun temurun merupakan pemegang hak adat atas seluruh sumber daya alam yang dieksploitasi tersebut justru kurang mendapat perhatian yang layak dari pemerintah. Sementara itu agen-agen pembangunan yang mengeksploitasi SDA justru tidak memberikan pengakuan yang layak terhadap hak-hak rakyat Papua dan tidak memikirkan alternatif pemecahan terhadap kondisi rakyat Papua yang tertinggal dengan saudara-saudara mereka di propinsi lainnya.

Selain itu eksploitasi yang dilakukan oleh para investor dengan fasilitasi pemerintah berlangsung secara cepat disatu pihak, sementara itu persiapan sosial

muncul sudah pasti akan dipikul oleh rakyat Papua. Dalam berbagai kasus pengambilalihan tanah rakyat untuk berbagai keperluan pembangunan telah mengakibatkan hilangnya sumber-sumber ekonomi keluarga. Rakyat Papua yang tinggal di pedalaman kehilangan binatang buruan, rusaknya ekosistem lokal dan hilangnya sagu, yang merupakan bahan makanan tradisional, yang kesemuanya itu merupakan sumber yang mendukung kehidupan penduduk lokal yang cenderung masih tradisional. Penambangan juga menimbulkan kerusakan alam, seperti hilangnya Moluska (TSK) yang menjadi sumber protein rakyat pedalaman. Eksploitasi sumber daya laut seperti yang terjadi di Biak, Sorong, Fakfak dan Merauke telah merusak ekosistem laut dan populasi ikan. Sehingga masyarakat lokal yang masih bergantung pada teknologi perikanan tradisional makin sulit untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya laut bagi kesejahteraannya.

Kedua, eksploitasi kekayaan alam di Papua dilakukan dengan berdasarkan pada ideologi pembangunan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat Papua, melalui langkah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan dukungan stabilitas politik dan keamanan yang tinggi pula. Namun pada kenyataannya ideologi pembangunan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu bentuk program pembangunan yang hanya mengejar kemajuan material atau fisik dengan memakai indikator ekonomi, telah menempatkan masyarakat Papua pada posisi yang marginal. Di Papua, pembangunan yang dilakukan juga lebih banyak ditujukan pada eksploitasi sumber daya alam, seperti tanah, hutan, tambang, dan laut untuk kepentingan umum yang kurang jelas maksudnya, sedangkan masyarakat Papua yang secara turun temurun merupakan pemegang hak adat atas seluruh sumber daya alam yang dieksploitasi tersebut justru kurang mendapat perhatian yang layak dari pemerintah. Sementara itu agen-agen pembangunan yang mengeksploitasi SDA justru tidak memberikan pengakuan yang layak terhadap hak-hak rakyat Papua dan tidak memikirkan alternatif pemecahan terhadap kondisi rakyat Papua yang tertinggal dengan saudara-saudara mereka di propinsi lainnya.

Selain itu eksploitasi yang dilakukan oleh para investor dengan fasilitasi pemerintah berlangsung secara cepat disatu pihak, sementara itu persiapan sosial

yang dapat membantu menyiapkan dan memfasilitasi penduduk asli agar dapat mengakses program-program atau proyek-proyek yang berhubungan dengan pengelolaan SDA tidak terjadi. Dengan kata lain pertumbuhan modernisasi di segala bidang tidak bisa dinikmati oleh rakyat Papua karena pemerintah tidak menyiapkan perangkat-perangkat yang tepat untuk membina, melatih dan memberi kesempatan kepada penduduk lokal agar dapat mengikuti gerak laju pertumbuhan lingkungannya. Akibatnya adalah rakyat Papua hanya mampu menjadi penonton dan semakin terasing di tanahnya sendiri. Rakyat Papua tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi bangsa dan semakin tertinggal dengan saudara-saudara sebaga dan setanah air yang tinggal di luar wilayah Papua.

IV.2.2 Dominasi Pendatang

Ketidakadilan yang dialami oleh bangsa Papua juga terlihat dari dominasi yang kuat dari kaum pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia maupun dari luar negeri dalam berbagai sektor kehidupan di Papua. Dominasi yang paling terlihat dalam bidang pemerintahan dimana rakyat asli Papua kurang dilibatkan dalam kegiatan pemerintahn berikut proses-proses politiknya. Posisi-posisi utama, yang berkenaan dengan pengambilan keputusan penting yang nantinya berhubungan dengan kehidupan rakyat di Papua, malah diberikan kepada orang-orang di luar Papua yang terkadang tidak mengetahui secara pasti kondisi dan kebutuhan rakyat Papua. Bahkan untuk jabatan camat seringkali pemerintah pusat mendatangkan pejabat dari Jawa yang secara kondisi politis maupun geografis memiliki perbedaan yang besar dengan daerah-daerah di Papua.¹⁰

Pemerintah pusat sendiri berdalih bahwasannya warga asli belum memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah menganggap bahwa bila kursi pemerintahan dipegang oleh warga asli Papua, maka jalannya pemerintahan daerah akan mengalami kekacauan dan tidak sesuai dengan arahan dari pusat. Program-program pembangunan yang telah diprogram oleh pemerintah pusat tidak akan dapat dilakukan secara cepat karena skill dan

¹⁰ Kompas, 22 Januari 2001.

pengetahuan rakyat asli Papua belum mampu mengejar ketertinggalan mereka dengan saudara-saudara mereka yang berasal dari luar Papua.

Tetapi bagi beberapa tokoh Papua yang telah mengecap pendidikan modern, alasan pemerintah itu hanyalah sebuah sandiwara belaka. Karena seharusnya pemerintah bukannya harus meninggalkan rakyat Papua karena tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai, melainkan harus memberikan solusi yang tepat untuk mensejajarkan kemampuan rakyat Papua agar tidak tertinggal oleh kemajuan pembangunan di daerah lain di luar Papua. Menurut berbagai kalangan alasan yang sebenarnya dari kondisi diatas adalah agar penduduk asli Papua tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kondisi rakyatnya yang miskin dan bodoh, serta tidak memiliki suara untuk membela hak-hak dan kekayaan alamnya yang dirampok oleh pemerintah pusat beserta para kapitalis asing.¹¹

Penggugatan terhadap kurangnya perhatian pemerintah terhadap peran penduduk asli Papua di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah datang dari berbagai kalangan, bahkan berasal dari tokoh-tokoh yang dulunya merupakan pendukung proses integrasi Papua Barat ke dalam RI. Salah seorang tokoh itu adalah J.A Dimara yang merupakan pejuang integrasi Papua Barat. Beliau menyatakan kekecewaannya karena pemerintah pusat telah melanggar kesepakatan dengan bangsa Papua usai dilaksanakannya PEPERA di tahun 1969, untuk memajukan tanah Papua Barat dengan memberikannya otonomi seluas-luasnya kepada rakyat Papua untuk membangun daerahnya sendiri dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Dominasi pendatang tidak hanya terjadi di bidang pemerintahan tetapi juga di bidang swasta. Pada kegiatan di sektor industri manufaktur yang memanfaatkan eksploitasi sumber daya alam, warga asli Papua jarang diikutsertakan secara menyeluruh dalam berbagai kegiatan produksi. Kalaupun ada mereka mayoritas hanya bekerja sebagai buruh kecil dan tidak memiliki peran yang penting. Kebanyakan pabrik-pabrik seperti pabrik Plywood, PT Wapoga,

¹¹ Sayadi, (ed), *Op. Cit.*, hal. 103.

¹² *Gatra*, 17 Juni 2000.

dan pabrik pengalengan ikan di Biak atau pabrik pengalengan ikan, PT Freeport Usaha Mina di Sorong, bahkan PT Freeport sendiri lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar Papua.¹³

Dominasi pendatang lainnya terjadi dalam bidang ekonomi. Dominasi pendatang dibidang ekonomi nampak semenjak dicanangkannya program Transmigrasi di Papua pada tahun 1967 dengan ditempatkannya 27 keluarga di Kumbe, Kabupaten Merauke. Sampai tahun 2000 tercatat warga transmigran di Papua mencapai 78.127 keluarga atau 303.323 jiwa dengan perincian penduduk luar Papua sejumlah 58.721 keluarga dan penduduk lokal sejumlah 19.406 keluarga.¹⁴ Semenjak saat itu hingga sekarang program Transmigrasi telah merubah wajah Papua menuju modernisasi yang dikontrol oleh pemerintah melalui pelaksanaan program pembangunan. Program ini pada awalnya tidak boleh bersifat egosentris tetapi harus berkaitan secara fungsional dengan kawasan lain yang ada disekitar. Berbagai kelompok etnis harus berbaur dalam kebhinnekaan dan penduduk lokal harus mendapat perhatian yang sama dengan kaum transmigran. Sehingga potensi munculnya konflik diantara dua kelompok dapat ditekan dan dikendalikan. Program ini terbukti mampu meningkatkan kondisi Propinsi Papua yang dulu tertinggal dengan Propinsi-propinsi lainnya. Datangnya kaum Transmigran telah memacu pertumbuhan ekonomi, membuka isolasi daerah yang dulunya sangat sulit dijangkau mengembangkan sarana dan prasaran transportasi, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan berbagai manfaat positif lainnya.

Namun pada kenyataannya program ini dianggap kurang memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat asli Papua. Menurut George Junus Aditjondro terdapat empat isu yang paling populer diantara para kritikus mengenai transmigrasi, yaitu Jawanisasi, Islamisasi, Militerisasi dan pengambilalihan tanah.¹⁵ Pengenalan istilah diatas disebabkan oleh distorsi yang muncul dilapangan akibat lebih dominannya masyarakat transmigran di bidang

¹³ Sayadi, (ed), *Op. Cit.*, hal. 105.

¹⁴ **Kompas**, 4 November 2002.

¹⁵ George Junus Aditjondro, *Cahaya Bintang Kejora*, ELSAM, Jakarta, 2000, hal. 238.

pertanian dan perdagangan. Menurut sebagian penduduk lokal warga pendatang telah menguasai semua aspek perekonomian di Papua melalui kelebihan sumber daya manusia mereka, sementara warga lokal yang sebagian hidup primitif tidak memiliki kemampuan yang seimbang. Sehingga yang terjadi adalah munculnya kesenjangan sosial diantara warga pendatang dengan warga lokal, dimana warga pendatang dengan kelebihan skill mampu hidup layak dari hasil kekayaan alam tanah Papua, sementara warga lokal hidup miskin dan tergantung kepada warga pendatang.

IV.2.3 Dominasi dan Penindasan Budaya

Dominasi dan kekerasan terhadap budaya lokal merupakan wujud dari usaha pemerintah dalam mengontrol suatu daerah agar berjalan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Penindasan terhadap budaya lokal dibutuhkan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dikemudian hari muncul disaat program-program yang telah dicanangkan mulai dilaksanakan. Kekerasan budaya dilakukan negara senantiasa diwujudkan dengan mengambil transkrip publik masyarakat dan mengontrolnya secara habis-habisan. Institusi-institusi masyarakat, sekolah-sekolah, agama dan ritual-ritual yang hidup dalam masyarakat kemudian dirampas dan dimaknai demi kepentingan negara.

Proses penindasan budaya di tanah Papua muncul semenjak datangnya para misionaris barat yang menyebarkan agama kristen. Kepercayaan kristen yang menyembah satu tuhan bertentangan secara frontal dengan kepercayaan lokal yang bersifat mistis. Proses akulturasi budaya tersebut berakibat pada hancurnya beberapa akar budaya. Akulturasi budaya tersebut disatu sisi menimbulkan dampak positif, hal itu nampak dari berkurangnya budaya kekerasan dalam kehidupan masyarakat lokal seperti pemenggalan kepala, kanibalisme dan perang suku.

Gelombang penindasan terhadap budaya lokal berikutnya muncul setelah proses integrasi rakyat Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui para petugas negara dan para transmigran yang didatangkan dari luar pulau. Sebagai agen-agen pemerintah mereka melihat dan mengukur budaya orang Papua dari sudut budaya, kepentingan dan ideologi pembangunan.

Sehingga yang terjadi adalah semua hal yang dianggap bertentangan dengan semangat pembangunan harus disingkirkan agar tidak menghambat kemajuan pembangunan. Salah satu yang dianggap penghambat bagi proses pembangunan adalah unsur-unsur budaya lokal.

Kekerasan budaya untuk melancarkan proses pembangunan nampak dengan dirubahnya dusun-dusun adat menjadi desa-desa seperti di pulau Jawa, perangkat adat digantikan dengan pengenalan program-program pembangunan seperti PKK, P-4 dan berbagai bentuk pengarahan lainnya. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa sehari-hari menggantikan bahasa daerah yang beraneka ragam. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar dalam setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah. Mereka diberi pengarahan untuk makan sesuai dengan pola empat sehat lima sempurna dengan nasi sebagai makanan pokok. Kebudayaan pertanian modern kemudian diperkenalkan, hutan-hutan adat kemudian diubah menjadi lahan-lahan pertanian, tambang-tambang dan kayu-kayunya ditebang untuk keperluan bangunan rumah-rumah di Pulau Jawa ataupun untuk keperluan ekspor.

Yang terjadi kemudian adalah warga asli Papua merasa dipinggirkan dari budaya mereka sendiri. Masyarakat lokal menjadi tidak bebas dalam mengekspresikan budaya lokal mereka sendiri. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari mereka harus membeli beras dan lauk-pauknya, karena sagu dan hewan-hewan ternak mulai berkurang akibat penebangan hutan-hutan. Pola pertanian yang dulu bersifat Subsistem/pertanian untuk kebutuhan keluarga petani sendiri dan cenderung primitif, kemudian dirubah dengan diperkenalkannya teknologi pertanian/Revolusi Hijau dimana kemudian dalam praktek di lapangan teknologi itu hanya dapat dikuasai oleh petani-petani transmigran yang telah memiliki skill lebih maju daripada penduduk lokal. Hal tersebut berakibat pada di monopolinya hasil-hasil pertanian oleh penduduk pendatang dan tersingkirnya hasil-hasil pertanian lokal seperti, ubi jalar dan sagu, sehingga penduduk lokal untuk memenuhi kebutuhan pokoknya harus membeli dengan uang. Padahal secara turun temurun mereka tidak mengenal penggunaan

uang sebagai alat pembayaran, sehingga secara otomatis penduduk lokal hidup miskin dan terbelakang.

Pada dasarnya program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah berhasil membawa Papua menuju kehidupan yang lebih modern. Namun pada kenyataannya pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwasannya konsep pembangunan yang bersifat sentralistis tersebut hanya berhasil membangun masyarakat dan wilayah Papua, bukan membangun masyarakat dan di wilayah Papua. Artinya bahwasannya pembangunan yang dilakukan tidak mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat Papua. Hal ini dikarenakan karena pembangunan itu tidak berakar pada nilai dan tradisi budaya dalam masyarakat. Sehingga wajar kiranya apabila bentuk perlawanan masyarakat Papua yang muncul menuntut kemerdekaan menggunakan konsep-konsep perjuangan yang berdasarkan pada kebudayaan lokal yang telah hidup secara turun temurun.

IV.2.4 Kekerasan Militer

Sepanjang masa integrasi Papua Barat ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap rakyat lokal merupakan bentuk ketidakadilan yang sering muncul di permukaan. Kekerasan terhadap rakyat Papua yang dilakukan oleh militer terjadi semenjak munculnya pemberontakan bersenjata pimpinan Permenas Ferry Awom di Manokwari tahun 1965.¹⁶ Pemberontakan tersebut kemudian dibalas dengan adanya operasi militer oleh pihak TNI. Pada masa itu pemerintah RI kemudian memperkenalkan lembaga Operasi Khusus (OPSUS) yang berfungsi melakukan penggalangan dan pembinaan berbagai perangkat yang diperlukan dalam pemantapan proses integrasi dengan Indonesia. Pembentukan OPSUS ditujukan untuk melakukan tindakan preventif berupa operasi intelijendan penahanan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai OPM sehingga pada saat PEPERA dilaksanakan tidak mengalami hambatan yang dapat mengganggu proses penentuan pendapat. Selain itu OPSUS mempunyai tugas untuk menyiapkan atau

¹⁶ Kompas, 22 januari 2001.

dapat mengarahkan para anggota Dewan Musyawarah PEPERA untuk membulatkan keputusannya agar Papua tetap bergabung dengan Indonesia.

Pasca pelaksanaan PEPERA, kekerasan militer berwujud pada pemberian status DOM (Daerah Operasi Militer) kepada Papua akibat banyaknya gangguan-gangguan keamanan yang dilakukan oleh OPM. Pihak militer sendiri terkadang seperti memberi ruang bagi OPM untuk berkembang menjadi besar. Bagi sebagian pengamat dengan adanya OPM, TNI memiliki keuntungan dengan semakin meningkatnya biaya operasional dilapangan. Selain itu dengan pelaksanaan DOM di Papua maka pihak TNI memiliki akses yang besar untuk melindungi kepentingan-kepentingan industri-industri asing yang ada di Papua, seperti PT Freeport.

Kekerasan militer di Papua meliputi beberapa bentuk, antara lain: intimidasi, teror, penyiksaan dan pembunuhan. Intimidasi, teror dan penyiksaan dilakukan berkenaan dengan pengambilalihan secara paksa hak-hak adat masyarakat Papua atas sumber daya alam demi keuntungan kaum kapitalis. Pada umumnya pengambilalihan itu dilakukan pada tanah-tanah adat atau hutan-hutan adat demi keperluan hutan produksi yang pengelolaannya menjadi hak pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH), transmigrasi, pertambangan, industri manufaktur dan pariwisata. Pembunuhan umumnya dilakukan oleh militer terhadap orang-orang militan yang memperjuangkan penegakan demokrasi, hukum, budaya maupun kemanusiaan termasuk tuduhan bergabung dengan OPM. Pembunuhan terhadap Theys H Eluay, Presiden PDP ditenggarai juga dilakukan oleh pihak militer.

IV.3 Pergantian Kekuasaan Nasional/Reformasi

Tumbangya Soeharto pada bulan Mei 1998 memunculkan sebuah era baru dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air di Indonesia. Sebagai sebuah era baru, Reformasi bagaikan pisau yang bermata dua. Di satu sisi, reformasi telah membat dan mengikis satu demi satu nilai adat dan tradisi Orde Baru guna melahirkan Indonesia baru yang lebih reformis, demokratis dan lebih harmonis. Pada sisi yang lain ternyata Reformasi yang digulirkan dengan semangat yang

mengebu-gebu tanpa disadari dan tanpa diduga malah melahirkan benih-benih disintegrasi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Benih-benih perpecahan didalam negeri dapat kita lihat dari semakin maraknya aksi tuntutan dari sebagian rakyat Indonesia untuk memisahkan diri. Tuntutan sebagian rakyat tersebut merupakan sebuah bentuk ungkapan kekesalan mereka terhadap berbagai bentuk kesenjangan dan ketidakadilan yang merupakan efek negatif dari pelaksanaan program pembangunan yang dilancarkan selama pemerintahan Soeharto. Program pembangunan yang berpegang pada prinsip Top Down tersebut ternyata dalam praktiknya telah mengabaikan unsur pemerataan dan cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan stabilitas keamanan yang mantap. Hal tersebut memunculkan ketimpangan antara kawasan timur dan barat, kesenjangan antar propinsi/daerah dan pembangunan yang "Jakarta Sentris" membuat daerah-daerah pinggiran di luar pulau Jawa semakin miskin dan tertinggal. Padahal pada umumnya daerah-daerah diluar pulau Jawa tersebut merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam yang dieksploitasi besar-besaran demi kepentingan negara.

Sehingga wajar kiranya ketika Soeharto sebagai simbol program pembangunan tersebut jatuh, rakyat disebagian daerah yang telah sekian lama memendam ketidakpuasan atas kondisinya menuntut kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebagai salah satu wilayah yang mengalami ketidakadilan sepanjang masa Orde Baru, fenomena reformasi merupakan media bagi sebagian rakyat Papua untuk menuntut kemerdekaan. Tuntutan kemerdekaan Papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri sudah cukup lama diperdengarkan oleh sebagian rakyat Papua yang tidak puas dengan proses integrasi. Namun dengan tumbanganya rezim Orde baru, tuntutan itu seakan mendapat angin segar untuk kembali di suarkan secara terang-terangan.

Aksi menuntut kemerdekaan dari wilayah RI pada era reformasi muncul pertama kali pada bulan Juli 1998, berupa aksi pengibaran bendera Bintang Kejora dan demonstrasi oleh mahasiswa. Semenjak peristiwa di bulan Juli 1998 tersebut rakyat Papua semakin gencar bergerak untuk menyuarakan aspirasi merdeka. Selain akibat jatuhnya rezim Orde Baru tuntutan merdeka dikalangan

rakyat Papua juga tidak terlepas dari berbagai peristiwa nasional yang mewarnai perkembangan Indonesia, seperti:¹⁷ (1) proses lepasnya Timor Timur, (2) pecahnya kerusuhan di Maluku, (3) meningkatnya kekerasan di Aceh akibat semakin menguatnya kekuatan militer anti Indonesia, (4) pelaksanaan Pemilu 1999 yang menghasilkan pemerintahan baru dibawah pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Selain itu berbagai pergumulan masyarakat dan pemerintah untuk melepaskan diri dari kuatnya pengaruh Orde Baru ikut mewarnai suasana sosial-politik di Papua.

Presiden Abdurrahman Wahid sendiri dalam berbagai kebijakannya dalam menangani permasalahan di Papua telah melakukan tindakan yang malah memicu keinginan rakyat Papua untuk melepaskan diri dari RI. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua tanpa persetujuan DPR, pemberian izin mengibarkan bendera Bintang Kejora dan pemberian dana bagi pelaksanaan Kongres Rakyat Papua. Wacana pemikiran yang disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan maksud menyelesaikan masalah di Papua melalui media dialog ditanggapi oleh sebagian rakyat Papua yang merindukan kemerdekaan Papua sebagai sebuah bentuk persetujuan Presiden terhadap keinginan merdeka sebagaimana yang pernah terjadi di Timor Timur.

IV.4 Dukungan Masyarakat Internasional

Konflik politik yang terus berkecamuk di Papua, telah mengundang reaksi keras dari masyarakat internasional. isu-isu yang berkembang adalah yang berkenaan dengan adanya kemungkinan-kemungkinan dilakukannya pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik politik di Papua. Lepasnya Timor Timur dari NKRI juga telah memunculkan anggapan publik internasional bahwa adalah mungkin Papua mendapatkan referendum seperti yang terjadi di Timor Timur. Untuk itu pada bulan Juli 1998, seorang anggota senat Amerika Serikat mengirimkan surat kepada presiden Habibie, yang isinya meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat

¹⁷ Theo P.A Van de Broek dan J. Budi Hermawan, *Memoria Passionis di Papua*, LSSP, Jakarta, 2001, hal.1.

Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Kondisi ini tidak hanya memicu munculnya gelombang unjuk rasa menuntut kemerdekaan Papua oleh masyarakat Papua sendiri, tapi juga telah memicu reaksi negara-negara lain untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia agar “memerdekakan” Papua.

Dukungan terhadap kemerdekaan Papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia datang dari berbagai negara yang tergabung dalam Forum Kepulauan Pasifik. Dalam pertemuan tingkat tinggi yang di laksanakan di Aiwo (Nauru), forum yang beranggotakan Australia, Selandia Baru dan 14 negara pulau di Pasifik ini mengeluarkan komunike bersama yang mendukung usaha pemberian otonomi khusus terhadap Papua oleh pemerintah Indonesia yang telah diajukan kepada DPR.¹⁸ Negara-negara tersebut juga mendesak semua pihak di Papua untuk melindungi dan mendukung hak-hak asasi manusia seluruh penduduk di Papua. Para pemimpin forum juga bersepakat untuk mengikuti terus perkembangan di Papua.

Masing-masing negara anggota Forum sendiri memiliki pandangan yang sedikit berbeda dalam menyingkapi permasalahan di Papua. Vanuatu, salah satu negara di kepulauan Pasifik, merupakan negara yang getol memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perdana Menteri Vanuatu, Edward Natapei, usai KTT tersebut menyatakan bahwasannya Vanuatu masih mendukung perjuangan rakyat Papua Barat untuk merdeka. Menurut beliau rakyat Papua Barat sendiri yang harus memutuskan arah yang hendak diambil dan rakyat Vanuatu akan siap memberikan bantuan apapun yang akan diminta oleh rakyat Papua Barat dalam mewujudkan cita-citanya.¹⁹

¹⁸ Kompas, 28 Agustus 2001.

¹⁹ *Ibid.*



BAB V

KESIMPULAN

Konflik politik yang terjadi di Papua sudah dimulai sejak adanya rencana pengintegrasian wilayah Papua ke dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di awal proses Integrasi tersebut diwarnai oleh adanya konflik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda dalam memperebutkan wilayah Papua. Papua yang memiliki luas ± 1600 mil persegi, memang layak untuk diperebutkan dengan pertimbangan bahwa selain memiliki sumber daya alam yang sedemikian besar, secara geopolitik daerah ini juga terletak pada posisi yang strategis bagi pertahanan dan keamanan Indonesia.

Setelah “resmi” terintegrasi dengan NKRI melalui kemenangan kontroversial dalam sebuah referendum atau yang lebih dikenal sebagai Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat), 1969, ternyata konflik politik di wilayah ini tetap bergulir seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi politik di Indonesia pada umumnya. Selama kurang lebih 35 tahun berintegrasi dengan Indonesia, telah terjadi serangkaian konflik politik di wilayah Papua. Berbagai kebijaksanaan yang dibuat pemerintah pusat dan dianggap merugikan masyarakat Papua menjadi sumber bagi munculnya konflik yang berkepanjangan. Kemudian kegagalan pusat dalam menyelesaikan konflik tersebut semakin menambah kekecewaan masyarakat Papua dan ini bermuara pada timbulnya gelombang protes bahkan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Semakin lama masyarakat Papua menderita akibat berbagai kebijakan pusat semakin bulat dan mengkrystal pula tekad untuk memerdekakan diri. Pada akhirnya, *issue* “kemerdekaan” tidak hanya dipandang sebagai wacana kultural atau protes ketidakpuasan terhadap kebijaksanaan pemerintah, namun telah bergeser menjadi agenda sentral perjuangan politik.

Dimulainya era reformasi menyusul tumbanganya rezim Orde Baru ternyata semakin meningkatkan gerakan-gerakan kemerdekaan di Papua. Kondisi Indonesia

yang lebih reformis, demokratis dan terbuka pada kenyataannya telah membuka keberanian rakyat Papua untuk lebih lantang menyuarakan aspirasinya. sementara itu ketidakadilan, eksploitasi, kesewenang-wenangan dan represi yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga dianggap sebagai pemicu meningkatnya tuntutan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Dinamika konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Papua sejak terintegrasinya Papua kedalam wilayah Republik Indonesia merupakan fenomena yang sangat menarik untuk terus diperhatikan. Keinginan kuat Indonesia untuk mempertahankan Papua sebagai bagian integral dari RI telah melahirkan sejumlah kebijaksanaan kontroversial dalam sejarah integrasi Papua ke tubuh NKRI. "Pengeksporan" armada militer di Papua berbuntut pada penciptaan birokrasi militer yang bertugas dalam rangka mempertahankan kesatuan RI sehingga mereka melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukannya. Sementara itu pelaksanaan transmigrasi sebagai program asimilasi antara penduduk pendatang dengan warga lokal tidak berhasil dicapai. Para penduduk pendatang cenderung bergerak mendominasi diberbagai sektor kehidupan. Sedangkan penduduk asli memperoleh perlakuan yang diskriminatif dari birokrasi sipil maupun militer. Kenyataan ini yang membuat penduduk asli menjadi termarginalisasikan, padahal sebagai pemegang hak adat seharusnya penduduk asli bisa menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan SDA ditanah kelahirannya. Lama-kelamaan keadaan ini menumbuhkan kekecewaan yang mendalam terhadap kebijaksanaan pemerintah pusat yang dinilai diskriminatif bagi warga lokal. Sikap dan perasaan kecewa ini kemudian mengikis dan menghapus semangat "ke-Indonesian" warga Papua. sebaliknya hal ini ternyata menggugah *sense of identity* sebagian besar masyarakat Papua dalam bentuk nasionalisme Papua. Menguatnya semangat nasionalisme Papua telah membawa masyarakat Papua pada sebuah keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Dari gambaran diatas dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar terdapat empat faktor utama yang secara signifikan telah menjadi jawaban atas

munculnya fenomena meningkatnya aksi-aksi gerakan kemerdekaan Papua dimasa reformasi yakni ;

1. **Masalah Internal history**, dimana rakyat Papua merasa sejarah bangsa, kondisi fisik dan budaya mereka berbeda dengan sejarah bangsa, fisik dan budaya Indonesia pada umumnya.
2. **Ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang sudah terakumulasi sejak lama.** Adanya asumsi tentang kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan sosial yang tajam di Papua sepanjang kurun waktu 1962-2001 telah dijadikan alasan bahwa rakyat Papua telah diperlakukan tidak adil oleh pemerintah RI.
3. **pergantian kekuasaan Nasional / reformasi**, yang telah membuka keran demokrasi dan iklim keterbukaan diseluruh wilayah Indonesia termasuk Papua.
4. **Adanya dukungan publik internasional**, dimana dukungan ini telah mengangkat moral dan kepercayaan diri rakyat Papua untuk terus berjuang melepaskan diri dari NKRI.

Daftar Pustaka

BUKU:

- Aditjondro, George Junus, 2000, *Cahaya Bintang Kejora*, Jakarta:ELSAM
- Andrianto, Tuhana Taufiq, 2001, *Mengapa Papua Bergolak?*, Yogyakarta:Gama Global Media
- Everson, David H. dan Joann Proparad Paine, 1973, *An Introduction to Systematic Political Science*, The Dorsey Press
- Hadi, Sutrisno, 1984, *Metodologi Research*, Yogyakarta:Fakultas Psikologi UGM
- Hasanuddin, Lili, (ed), 2001, "*Suara dari Papua*", Jakarta:YAPPIKA
- Mas'oe'd, Mohtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta:LP3ES
- Pigay, Decky Natalis, 2000, "*Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*", Jakarta:Pustaka Sinar Harapan
- Saifuddin, Achmad Fedyani, 1986, "*Konflik dan Integrasi:Perbedaan Faham dalam Agama Islam*", Jakarta:Rajawali Pers,
- Sayadi, (ed), 2001, *Aceh, Jakarta, Papua*, Jakarta :Yappika,
- Surbakti, Ramlan, 1990, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta:P.T.Gramedia Media Sarana Indonesia,
- The Liang Gie, 1987, *Ilmu Politik*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press
- Van de Broek, Theo P.A dan J. Budi Hermawan, 2001, *Memoria Passionis di Papua*, Jakarta:LSSP

MAJALAH DAN KORAN:

- Gatra**, 11 Juli 1998
- Gatra**, 18 Juli 1998
- Gamma**, 7 Maret 1999
- Gamma**, 7 Juni 2000
- Kompas**, 5 Juni 2000
- Kompas**, 3 Desember 2000

Gatra, 17 Juni 2000

Kompas, 22 Januari 2001

Kompas, 28 Agustus 2001

Kompas, 11 November 2001

Kompas, 18 November 2001

Kompas, 25 November 2001

Kompas, 4 November 2002

ARTIKEL DAN INTERNET

Bhakti, Ikrar Nusa, "*Aspek-aspek Internasional dalam Integrasi Nasional: Suatu Tinjauan Empiris Atas Kasus Irian Jaya*", dalam Analisis CSIS XXIII No.5, 1994

Eby Hara, Abu Bakar, Jurnal Ilmu Politik 9, P.T. Gramedia, Jakarta

Fatah, R. Eep Saefullah, *Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi*, Prisma No.8, Agustus 1994, LP3ES, Jakarta

Sekretariat Presidium Dewan Papua, 2000, Laporan Hasil Konggres Papua, *Mari Kita Meluruskan Sejarah Papua Barat*, Jayapura

Human Right Watch, "*Indonesia : Violence and Political Impasse In Papua*".
<http://www.Reliefweb.Int>





LAPORAN HASIL

KONGRES PAPUA

**MARI KITA MELURUSKAN
SEJARAH PAPUA BARAT**



Port Numbay (Jayapura)

29 Mei - 04 Juni 2000

RESOLUSI
KONGRES II
PAPUA BARAT

JEMBER

KETETAPAN
KONGRES PAPUA - 2000
NOMOR : III / KONGRES PAPUA II / 2000
Tentang

PENGUKUHAN KEANGGOTAAN PANEL
DAN PRESIDIUM DEWAN PAPUA

Syukur bagi Mu Tuhan

Kongres Papua, 29 Mei - 04 Juni 2000, setelah :

- Menimbang :
1. Bahwa Kongres Papua adalah Instansi tertinggi dalam pengambilan Keputusan Perjuangan Papua Barat;
 2. Karenanya Ketetapan Kongres bersifat mengikat bagi seluruh komponen perjuangan Papua Barat;
 3. Bahwa untuk merealisasikan amanat Kongres, perlu dikukuhkan Panel Papua sebagai badan musyawarah wakil-wakil rakyat bangsa Papua, serta Presidium Dewan Papua sebagai pelaksana mandat Kongres.
- Mengingat :
1. Deklarasi Universal PBB 10 Desember 1948 tentang Hak Azasi Manusia
 2. Alinea Pertama Pembukaan UUD Negara RI 1945;
 3. UU Negara RI Nomor : 9 Tahun 1999;
 4. Jawaban Presiden RI B.J. Habibie kepada Tim 100 pada Dialog Nasional, 26 Februari 1999 di Istana Merdeka Jakarta;
 5. Pandangan Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Irian Jaya di Gedung Negara Jayapura, 31 Desember 1999;
 6. Penegasan Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid, pada waktu :
 - a. Menerima Laporan pelaksanaan dan Hasil MUBES Papua 2000, 03 Maret 2000 di Bina Graha, Jakarta;
 - b. Menerima Ketua Presidium Dewan Papua Theys H. Eluay dan Ketua LMA Yapen Waropen M. Yusuf Tanawani, tanggal 02 April 2000;
 - c. Pertemuan dengan Presidium Dewan Papua dan Panitia Kongres Papua, tanggal 15 Mei 2000.
 7. Ketetapan Mubes Papua - 2000 dan Keputusan Presidium Dewan Papua Nomor : A.01/KEP-PDP/IV-2000, tanggal 10 April 2000 tentang Waktu, Tempat, Tema dan Sub Tema Kongres Papua II - 2000.
- Memperhatikan :
1. Ketetapan Musyawarah Besar Papua 2000 No : VI/MUBES PAPUA/2000 dan No : VII/MUBES PAPUA/2000;
 2. Hasil Sidang Pleno Presidium Dewan Papua, 16 - 19 April 2000;
 3. Usul keanggotaan Panel Papua dari daerah, region dan pilar;

4. Hasil Rapat Presidium Dewan Papua dengan Ketua-Ketua delegasi pada sesi sidang Pleno I Kongres Papua II – 2000;
5. Sikap politik, Aspirasi dan Pandangan serta usul-usul yang berkembang dalam Sidang Pleno I, III & V Kongres Papua II – 2000.

MENETAPKAN :

- Pertama* : Mengukuhkan 501 Anggota perwakilan masyarakat Papua dari 14 daerah, 3 region dan 10 pilar dalam wadah Panel Papua, sebagaimana tertera pada Lampiran kedua Ketetapan ini;
- Kedua* : Mengukuhkan Presidium Dewan Papua dengan komposisi : 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 3 Moderator, 26 Anggota, 1 Sekertaris Jenderal, 1 Wakil Sekertaris Jenderal serta 1 Mediator/Fasilitator, sebagaimana tercantum dalam Lampiran pertama Ketetapan ini.
- Ketiga* : Dengan pengukuhan ini, maka rakyat bangsa Papua melalui Kongres Papua II – 2000 memberikan Mandat dan kepercayaan penuh kepada Presidium Dewan Papua untuk melaksanakan amanat rakyat bangsa Papua menuju tercapainya cita-cita perjuangan, yakni pengakuan / pengembalian hak dan kedaulatan politik Papua Barat 1 Desember 1961 sebagai satu bangsa yang Merdeka, Berdaulat, Adil dan Bermartabat.
- Keempat* : ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Port Numbay
Pada Tanggal : 03 Juni 2000

PIMPINAN SIDANG
KONGRES PAPUA II – 2000

Thaha Moh. Alhamid
Ketua

Tt. Aronggear, SE
Wakil Ketua

Pdt. Herman Awom, S.Th
Sekretaris

Franzalbert Joku
Anggota

Decky Iwanggin, BA
Anggota

Dra. Fera Kambu
Anggota

Sam Manami Satya
Anggota

Adolof Fonataba
Anggota

KONGRES II
PAPUA BARAT

PDP / KONGRES / TAP- III / VI . 2000

Jayapura
29 Mei - 04 Juni 2000

PRESIDIUM DEWAN PAPUA

- ❖ KETUA : THEYS HIYO ELUAY
- ❖ WAKIL KETUA : TOM BEANAL
- ❖ MODERATOR : Dr. BENNY GLAY, Pdt.
- ❖ MODERATOR : FRANZALBERTH JOKU
- ❖ MODERATOR : Pdt. HERMAN AWOM, S.Th
- ❖ ANGGOTA :
 - Drs. ISACK AJOMI, MA
 - Drs. DON A.L. FLASSY, MA
 - Ny. BEATRIX KOIBUR RUMBINO
 - MOHAMMAD SAID SABUKU
 - MARTHINUS A. WERIMON
 - ANDY DENNY MANOBI
 - Pdt. KETTY YABANSABRA
 - LEONARD IMBIRI, S.Pd
 - JOHN S. MAMBOR, BA
 - ELIEZER AWOM
 - MELKLAS MANDOSIR
 - FRED SUEBU
 - YAKOB KASIMAT
 - HERMAN WAYOI
 - Dr. JOHN OTTO ONAWAME

bersambung

- ❖ ANGGOTA :
- YORRIS Th. RAWEYAI
 - Dr. WILHEM ZONGGONAUW
 - ISMAIL RAJA BAUW, MSc.
 - VICTOR KAISIEPO
 - CLEMENS RUNAWERY
 - FRED ATHABU, SH
 - Dr. NOACK NAWIPA, Pdt.
 - Pdt. OBETH KOMBA
 - Drs. XAVERIUS SONGMEN
 - BENNY YANTEWO

SEKRETARIAT DEWAN PAPUA

- ❖ SEKRETARIS JENDERAL : Thaha Mohammad Alhamid
- ❖ WAKIL SEKJEN : Agus A. Alua
- ❖ MEDIATOR DEWAN PAPUA : Drs. Willy Mandowen (FORERI)



KETETAPAN
KONGRES PAPUA - 2000
NOMOR : IV / KONGRES PAPUA II / 2000
Tentang

PELURUSAN SEJARAH PAPUA BARAT

Syukur bagi Mu Tuhan

Kongres Papua, 29 Mei - 04 Juni 2000, setelah :

- Menimbang :
1. Bahwa Kongres Papua adalah Instansi tertinggi dalam pengambilan Keputusan Perjuangan Papua Barat;
 2. Karenanya Ketetapan Kongres bersifat mengikat bagi seluruh komponen perjuangan Papua Barat;
 3. Bahwa Jalan sejarah adalah jalan kebenaran, sehingga pelurusan sejarah merupakan kearifan politik untuk meraih pengakuan serta pengembalian hak & kedaulatan politik bangsa Papua.
- Mengingat :
1. Deklarasi Universal PBB 10 Desember 1948 tentang Hak Azasi Manusia
 2. Alinea Pertama Pembukaan UUD Negara RI 1945;
 3. UU Negara RI Nomor : 9 Tahun 1999;
 4. Jawaban Presiden RI B.J. Habibie kepada Tim 100 pada Dialog Nasional, 26 Februari 1999 di Istana Merdeka Jakarta;
 5. Pandangan Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Irian Jaya di Gedung Negara Jayapura, 31 Desember 1999;
 6. Penegasan Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid, pada waktu :
 - a. Menerima Laporan pelaksanaan dan Hasil MUBES Papua 2000, 03 Maret 2000 di Bina Graha, Jakarta;
 - b. Menerima Ketua Presidium Dewan Papua Theys H. Eluay dan Ketua LMA Yapen Waropen M. Yusuf Tariawani, tanggal 02 April 2000;
 - c. Pertemuan dengan Presidium Dewan Papua dan Panitia Kongres Papua, tanggal 15 Mei 2000.
 7. Ketetapan Mubes Papua - 2000 dan Keputusan Presidium Dewan Papua Nomor : A.01/KEP-PDP/IV-2000, tanggal 10 April 2000 tentang Waktu, Tempat, Tema dan Sub Tema Kongres Papua II - 2000.
- Memperhatikan :
1. Rumusan Hasil Sidang Komisi I bidang Pelurusan Sejarah Papua Barat;
 2. Sikap politik, Aspirasi dan Pandangan serta usul-usul yang berkembang dalam Sidang Pleno IV Kongres Papua II - 2000.

MENETAPKAN :

- Pertama* : Materi Pelurusan Sejarah Papua Barat hasil sidang Komisi I sebagai kerangka dasar upaya Meluruskan Sejarah Papua Barat untuk mencapai pengakuan / pengembalian hak & kedaulatan Politik bangsa Papua Barat;
- Kedua* : Menugaskan Presidium Dewan Papua untuk melaksanakan Ketetapan ini secara konsisten, damai dan demokratis melalui dialog nasional dan Internasional.
- Ketiga* : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Port Numbay
Pada Tanggal : 03 Juni 2000

PIMPINAN SIDANG
KONGRES PAPUA II - 2000

Thaha Moh. Alhamid
Ketua

Tt. Aronggear, SE
Wakil Ketua

Pdt. Herman Awom, S.Th
Sekretaris

Franzalbert Joku
Anggota

Decky Iwanggin, BA
Anggota

Dra. Fera Kambu
Anggota

Sam Manami Satya
Anggota

Adolof Fonataba
Anggota

KONGRES PAPUA II – 2000

PELURUSAN SEJARAH PAPUA BARAT

Syukur Bagi-Mu Tuhan

Menimbang :

1. Bahwa adalah kewajiban bangsa Papua Barat untuk menegakkan, meluruskan dan melaksanakan hak kesejarahannya yang telah dibengkokkan dan dimanipulasi selama ini oleh pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-bangsa.
2. Bahwa pelurusan sejarah Papua Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa Papua Barat untuk memperoleh pengakuan dunia atas kedaulatan bangsa dan negara Papua Barat yang telah dinyatakan oleh Nieuw Guinea Raad pada tanggal 1 Desember 1961.

Memperhatikan :

1. Lembaran Negara Hindia Belanda, Bogor 19 Februari 1936 tentang pembagian daerah teritorial Hindia Belanda.
2. Piagam PBB tanggal 26 Juni 1945 pasal 73 bagian a dan b.
3. Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Azasi Manusia 10 Desember tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.
4. Deklarasi PBB tahun 1960 mengenai Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Rakyat Jajahan.
5. Manifest Komite Nasional Papua tanggal 19 Oktober 1961 tentang Kemerdekaan Papua.
6. Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea tahun 1961 No. 68 mengenai Bendera Negeri berdasarkan Nomor Register 362 dan 366 tentang Bendera.
7. Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea tahun 1961 No. 69 mengenai Lagu Kebangsaan Negeri.
8. Pernyataan Kemerdekaan bangsa Papua pada tanggal 1 Desember 1961, yang diikuti dengan usaha-usaha memperoleh pengakuan secara de-jure melalui pernyataan-pernyataan politik, pengibaran bendera Papua Barat oleh berbagai lapisan masyarakat di pedalaman, pesisir pantai dan perkotaan, diplomasi internasional, termasuk pula perjuangan para patriot Papua Barat di hutan belantara.

9. Alinea I Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
10. Surat Rahasia Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy kepada Pemerintah Belanda, c.q. Dr. J.E. de Quay, Perdana Menteri Belanda, tanggal 2 April 1962.
11. Pernyataan Resmi Tuan Nicholas Jouwe dalam Persidangan Komisi Gabungan Pemerintah RI dan Belanda yang membahas status politik nasib tanah, rakyat dan bangsa Niew-Guinea / Irian Barat tanggal 19 Juli 1950, yang diantaranya berisi penyesalannya atas campur tangan bangsa Indonesia yang dinilainya tidak berhak mengurus masalah status Papua Barat.

Memperhatikan juga :

1. Ketetapan Musyawarah Besar Papua No: III/MUBES PAPUA/2000 tanggal 26 Februari 2000, tentang Rumusan Hasil Sidang Komisi I Bidang Pelurusan Sejarah.
2. Pemandangan Umum Delegasi-delegasi Papua Barat dari ke-14 Kabupaten / Kotamadya Papua dan region-region Asia, Pasifik, Eropa serta Pilar-pilar, tanggal 31 Mei dan 1 Juni tahun 2000 dalam Kongres II Papua untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menetapkan :

1. Papua Barat sesungguhnya bukan bagian dari wilayah Republik Indonesia, karena
 - a. Secara historis Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda. Pada tanggal 24 Agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton Kaimana (Pantai Selatan tanah Papua) diproklamasikan penguasaan Papua Barat oleh Sri Baginda Raja Nederland.
 - b. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah.
 - c. Bangsa Papua tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928.
 - d. Dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa Perang Jepang di Saigon pada tanggal 12 Agustus 1945 Mohammad Hatta menegaskan bahwa "...*bangsa Papua adalah ras Negroid, bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri...*". Sementara Ir. Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.

- e. Papua Barat tidak termasuk di dalam daerah-daerah yang diproklamirkan sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
 - f. Dalam konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus 1949 – 2 November 1949 status Papua Barat (*Nederlands Nieuw Guinea*) secara eksplisit dinyatakan oleh Mohammad Hatta, Ketua Delegasi Indonesia, bahwa “... masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan karena bangsa Papua berhak menjadi bangsa yang merdeka ”.
2. Kehendak yang suci dan luhur bangsa Papua Barat untuk memiliki negaranya sendiri ternyata ditanggapi dengan tindakan aneksasi pemerintah Indonesia melalui pengomandoan Trikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Fakta bahwa Presiden Indonesia memerintahkan “... Gagalkan Pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda Kolonial...” sudah merupakan pengakuan eksplisit tentang adanya sebuah Negara.
 3. Trikora semakin memperuncing konflik antara Belanda dan Indonesia mengenai status politik tanah Papua Barat. Adanya perang dingin antara blok Barat dan blok Timur (komunis), dan semakin eratnya hubungan Indonesia dengan negara-negara blok Timur, sebagaimana yang tertera dalam surat Rahasia Presiden Amerika Serikat, J.F. Kennedy kepada Perdana Menteri Belanda, Dr.J.E. de Quay tanggal 2 April 1962, mengakibatkan Belanda tunduk pada tekanan politik Amerika Serikat untuk menandatangani persetujuan dengan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962. Persetujuan ini disebut dengan New York Agreement.
 4. New York Agreement adalah suatu kesepakatan yang tidak sah, baik secara yuridis maupun moral. Kesepakatan di New York itu dibuat untuk membicarakan status tanah dan nasib bangsa Papua, namun di dalam prosesnya tidak pernah melibatkan wakil-wakil resmi bangsa Papua Barat.
 5. Isi New York Agreement, termasuk pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua untuk memilih : (a) Apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia, atau (b) Apakah mereka ingin memutuskan hubungan mereka dengan Indonesia, tidak pernah dipersoalkan.
 6. Pasal XXII ayat 1 New York Agreement dengan jelas mengatur hak-hak bangsa Papua untuk bebas berbicara, bergerak, berkumpul dan bersidang. Hak-hak ini dipasung dan dimatikan, sehingga tidak pernah dapat dilaksanakan oleh bangsa Papua.

Semua organisasi sosial dan politik yang dibentuk sebelum 1963 dibubarkan dan dilarang untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya oleh pemerintah Indonesia melalui Dekrit Presiden R.I. tanggal 15 Mei 1963. New Guinea Raad yang adalah badan perwakilan rakyat tertinggi yang dipilih secara langsung oleh rakyat Papua melalui proses yang demokratis dibubarkan dan digantikan dengan DPRGR yang keanggotaannya tidak melalui suatu proses pemilihan yang demokratis, tetapi ditunjuk dan atau diangkat oleh penguasa pemerintah Indonesia.

7. Sejak 1 Mei 1963 pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan-pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua. Mereka berasal dari semua Kodam dan seluruh Angkatan TNI dan Polri. Akibatnya, hak-hak politik dan hak-hak azasi manusia Papua telah dilanggar secara brutal diluar batas-batas perikemanusiaan. Beberapa di antaranya adalah pembunuhan secara kilat, penguburan hidup-hidup, penembakan terhadap korban yang terlebih dahulu disuruh menggali kuburnya sendiri, pembunuhan ayah yang kemudian dagingnya dibakar dan dipaksakan untuk dimakan oleh istri dan anak-anaknya, pembunuhan dengan cara diikat dan ditenggelamkan ke dalam laut, dibuang dari helicopter, dicituk dari rumah dan tidak pernah kembali. Berbagai bentuk penyiksaan dilakukan terhadap bangsa Papua yang korbannya masih hidup sampai sekarang. Ada yang disiksa dengan cara memasukkan besi panas ke dalam lubang anus, digantung dengan kepala ke bawah dan disundut dengan api rokok, disetrum, diteror, dijempit malam hari, dan lain-lain. Para wanita juga mengalami perlakuan keji dan amoral. Pemerkosaan terjadi dimana-mana, termasuk pada anak wanita di bawah umur. Suami dan istri dipaksa bersetubuh di muka umum. Ada yang setelah diperkosa ditusuk alat kelaminnya dengan bayonet atau kayu. Selain itu, terjadi banyak penahanan tanpa proses peradilan terhadap mereka yang dicurigai menentang keinginan pemerintah Indonesia untuk memasukkan Papua Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Mereka juga membakar rumah-rumah rakyat, kebun-kebun masyarakat dirusak, serta bangunan-bangunan gereja dibakar dan dihancurkan. Mereka yang tidak berpengaruh, tidak dipaksa dengan cara kekerasan namun dibujuk dengan berbagai sogokan dalam bentuk uang, barang, jabatan maupun perempuan. Perbuatan-perbuatan keji dan biadab ini semakin memuncak menjelang pelaksanaan Pepera dan terus berlangsung sesudah Pepera. Tujuannya adalah untuk membungkam aspirasi murni dan kehendak bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri pada tahun 1969 dan seterusnya.
8. Pasal XVIII ayat d New York Agreement mengatur bahwa *"The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to participate in the act of selfdetermination to be carried out in accordance with international practice ..."*

Aturan ini berarti bahwa penentuan nasib sendiri harus dilakukan oleh setiap orang dewasa Papua pria dan wanita yang merupakan penduduk Papua pada saat penandatanganan New York Agreement. Hal ini tidak dilaksanakan.

Pertama, penentuan nasib sendiri dilakukan oleh suatu badan di tiap kabupaten yang disebut *Dewan Musyawarah Pepera* yang keanggotaannya langsung ditunjuk oleh penguasa pemerintah Indonesia. Dari 815.906 penduduk (*diperkirakan 600.000 orang dewasa laki-laki dan perempuan*) ditunjuk langsung hanya 1026 orang anggota Dewan Musyawarah Pepera. Dari ke-1026 orang tersebut ditunjuk hanya 175 orang untuk menyampaikan / membacakan ' teks ' pendapat yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia.

Kedua, masyarakat Papua yang ada di luar negeri, yang pada saat penandatanganan New York Agreement adalah penduduk Papua, tidak diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam penentuan nasib sendiri ini.

9. Tidak dilaksanakannya hak penentuan nasib sendiri sesuai Pasal XVIII ayat d New York Agreement, menurut pemerintah Indonesia, dikarenakan oleh tiga alasan: (1) keprimitifan penduduk untuk dapat melakukan pemilihan secara demokratis menurut praktek modern; (2) kesulitan transportasi; dan (3) faktor-faktor geografis. Alasan seperti ini tidak bisa diterima, sebab jauh sebelum itu pemilihan badan pengurus gereja dan keanggotaan New Guinea Raad dilakukan melalui cara-cara demokratis. Selain itu, hanya 2 tahun sesudah Pepera, yaitu pada tahun 1971, pemerintah Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum di Papua Barat dengan cara-cara demokrasi menurut praktek internasional.
10. Diserahkannya administrasi pelaksanaan Pepera kepada pemerintah Republik Indonesia, seperti yang diatur dalam New York Agreement, sesungguhnya adalah keputusan yang keliru dan merupakan sumber utama pelanggaran hak-hak politik dan hak-hak azasi manusia bangsa Papua. Seharusnya, sesuai dengan kebiasaan internasional, peranan itu harus dipegang oleh negara netral atau badan yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.
11. Keterlibatan pihak militer Republik Indonesia dalam pelaksanaan Pepera sangat dominan. Tidak saja bahwa militer Indonesia terlibat dalam intimidasi terhadap penduduk, tetapi militer terlibat dalam pengaturan pelaksanaan Pepera. Misalnya, Surat Rahasia Komandan Korem 172, Kolonel Blego Soemarto, No.: r-24/1969, Perihal: Pengamanan Pepera, tanggal 8 Mei 1969, yang ditujukan kepada Bupati Merauke selaku Anggota Muspida Kabupaten Merauke. Isi surat tersebut antara lain menyatakan : "... Apabila pada masa poling tersebut diperlukan adanya penggantian anggota DEMUS, penggantianannya supaya dilakukan jauh sebelum MUSYAWARAH PEPERA.

Apabila alasan-alasan secara wajar untuk penggantian itu tidak diperoleh, sedang di lain pihak dianggap mutlak bahwa anggota itu perlu diganti karena akan membahayakan kemenangan Pepera, harus berani mengambil cara yang tidak wajar untuk menyingkirkan anggota yang bersangkutan dari persidangan PEPERA sebelum dimulainya sidang DEMUS PEPERA."

Di bagian lain surat Komandan Korem 172 tersebut dinyatakan, bahwa "Sebagai kesimpulan dari surat saya ini adalah bahwa Pepera secara mutlak harus kita menangkan, baik secara wajar atau secara tidak wajar." Mengingat bahwa wilayah kerja Komandan Korem 172 termasuk pula kabupaten-kabupaten lain diluar Kabupaten Merauke, maka patut diduga keras surat rahasia yang isinya kurang lebih sama juga dikirimkan ke bupati-bupati yang lain.

12. Dan masih banyak lagi pelanggaran -- pelanggaran hak-hak politik dan hak-hak azasi manusia yang karena intensitasnya tidak memungkinkan untuk dilaporkan secara terinci dalam Rumusan Komisi Pelurusan Sejarah Papua Barat.

Merekomendasikan :

1. Mendesak Kongres II Papua Barat untuk menyatakan secara resmi dalam Resolusi bahwa adalah Tidak Sah semua klaim yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai status tanah Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena tidak memiliki bukti-bukti sejarah yang otentik, murni dan sejati.
2. Mendesak Konres II Papua Barat untuk menegaskan secara resmi dalam Resolusi bahwa bangsa Papua Barat telah sungguh-sungguh memiliki Kedaulatan sebagai suatu bangsa yang Merdeka sederajat dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi sejak tanggal : 1 Desember 1961.
3. Mendesak Kongres II Papua untuk menyatakan secara resmi dalam Resolusi bahwa rakyat Papua Barat secara tegas menolak New York Agreement karena ditetapkan secara sepihak melalui konspirasi politik pemerintah Amerika Serikat, Belanda, Indonesia dan Perserikatan Bangsa-bangsa. Perjanjian itu telah mengakibatkan hak-hak politik, kesejarahan dan hak-hak azasi manusia bangsa Papua dipasung dan dimatikan bahkan di bantai secara keji.
4. Mendesak Kongres II Papua untuk menyatakan secara resmi dalam Resolusi bahwa rakyat Papua Barat secara tegas menolak hasil-hasil Pepera 1969 karena dilakukan atas dasar New York Agreement yang cacat moral dan cacat hukum. Dilaksanakan dalam suasana penindasan di luar batas-batas perikemanusiaan,

peniadaan hak dan kebebasan berpendapat bangsa Papua, dan dilakukan dengan cara-cara yang represif dan tidak demokratis.

5. Mendesak Presidium Dewan Papua untuk meningkatkan upaya-upaya penyadaran publik, baik terhadap warga Papua sendiri, maupun warga negara Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya, mengenai semua bentuk pengingkaran sejarah dan pelanggaran hak-hak politik dan hak azasi manusia bangsa Papua.
6. Mendesak seluruh Panel Dewan Papua di dalam dan di luar negeri untuk terus melakukan upaya-upaya pengumpulan data dan informasi sejarah Papua Barat secara obyektif untuk semakin meningkatkan kekayaan kesejarahan kita sebagai suatu bangsa yang bermartabat dan merdeka.
7. Mendesak seluruh Panel Dewan Papua di dalam dan di luar negeri untuk terus melakukan upaya-upaya pengumpulan data otentik tentang pelanggaran hak-hak azasi bangsa Papua.
8. Mendesak seluruh Panel Pelurusan Sejarah Papua di dalam dan di luar negeri untuk membentuk sentra data dan informasi yang bertugas mengumpulkan dan mengolah data-data kesejarahan dan pelanggaran hak-hak politik serta hak-hak azasi manusia Papua.

Jayapura, 2 Juni 2000

KOMISI I: PELURUSAN SEJARAH PAPUA BARAT, KONGRES PAPUA

Pdt. NAS APASERAY
Ketua

MOSES WERROR
Wakil Ketua

Drs. M. L. WANAH, M.Si
Sekretaris

BENYAMIN HOOR
Wakil Sekretaris

Syukur Bagi-Mu Tuhan

Setelah melalui diskusi dan perdebatan politik, Komisi II bidang Agenda Politik merumuskan agenda politik perjuangan Papua sebagai berikut :

PERNYATAAN SIKAP POLITIK RAKYAT BANGSA PAPUA

*Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Kristus Isa Almasih dan Rohul Kudus serta para saksi Tuhan di tanah Papua.*

Kongres II Papua Barat – 2000 dengan berdasarkan :

1. Manifesto Politik Komite Nasional Papua 19 Oktober 1961.
2. Bangsa dan Negara Papua telah terbentuk dan berdiri pada 1 Desember 1961 di lengkapi Bendera Kebangsaan Papua "*Sang Pajjar atau Bintang Kejora*", Lagu Kebangsaan Papua "*Hai Tanahku Papua*", dan Mata uang Papua, "*Gulden*" serta atribut kenegaraan lainnya termasuk Korps Tentara Sukarelawan Papua "*Papua Vrijwilege Korps*" (PVK).
3. Berbagai Pernyataan sikap yang mengungkapkan Aspirasi Kemerdekaan Papua yang telah disampaikan kepada Pemerintah Indonesia dan dunia baik oleh Rakyat Bangsa Papua maupun pihak luar seperti halnya anggota Kongres Amerika Serikat dan badan-badan dunia lainnya. Puncaknya pada tanggal 26 Februari 1999 di Istana Merdeka Jakarta kepada Pemerintah Indonesia 100 orang wakil rakyat Papua menegaskan kehendak murni rakyat bangsa Papua untuk Merdeka, Berdaulat dan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pernyataan pengembalian Nama Papua menggantikan Irian (Barat/Jaya) oleh Presiden Republik Indonesia KH. Abdurrahman Wahid, tanggal 31 Desember 1999 memastikan pengakuan dan pengembalian identitas bangsa Papua.
5. Pernyataan tertulis Ketua Lembaga Adat Irian Jaya, Theys H Eluay selaku Pemimpin Papua secara berturut-turut pada:
 - a. Tanggal 1 Desember 1999 berisikan 7 (*tujuh*) tuntutan Papua sebagai Konkritisasi Deklarasi Port Numbay 12 November 1999;
 - b. Tanggal 1 Mei 2000 pada peringatan Hari Pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Papua;

1. Deklarasi Komite Nasional Pemuda Papua pada Kongres Pemuda ke-1, tanggal 23 - 26 Mei 2000 di Port Numbay, menuntut Papua harus melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Aspirasi dan kehendak seluruh Utusan dalam Panel dan Presidium Dewan Papua kepada Kongres Nasional II Papua 2000, tanggal 29 Mei, sampai dengan 3 Juni 2000.

Maka Rakyat Papua melalui Kongres Nasional II Papua 2000, Menyatakan :

Mengukuhkan hak, harkat, martabat dan harga diri bangsa Papua sebagai Ummat ciptaan Allah di atas Tanah Leluhur kami, Tanah Papua.

Merdeka ! Mulai hari ini Sabtu, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2000 tanah dan bangsa Papua kembali ke status politik semula, 1 Desember 1961 dengan memberlakukan secara resmi atribut-atribut kebangsaan dan kenegaraan Papua, yakni :

- Bendera Nasional : *"Sang Bintang Kejora"*
- Lagu Kebangsaan : *"Hai Tanahku Papua"*
- Nama Negara : *"Papua"*
- Lambang Negara : *"Burung Mambruk"*

Menerima dan mengukuhkan pemberlakuan hasil-hasil Kongres Nasional Papua Ke-1 dengan Manifesto Politik Bangsa Papua, tanggal 19 Oktober 1961 di Holandia (Jayapura / Port Numbay);

Memandatkan kepada Presidium Dewan Papua dalam Kongres II Papua Barat 2000, untuk segera menindak lanjuti hasil-hasil Kongres Nasional Papua Ke-1 tahun 1961; dan melaksanakan isi dari Keputusan Politik Kongres II Papua Barat tahun 2000.

Menetapkan dan Mengukuhkan Presidium Dewan Papua sebagai Badan Pelaksana perjuangan Bangsa dan Negara Papua Barat.

Kongres menetapkan Kepemimpinan Presidium Dewan Papua dari Kepemimpinan Kolektif menjadi Kepemimpinan Tunggal berbentuk Piramida yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, dibantu oleh Sekretariat Jenderal Dewan Papua.

Kongres menetapkan Negara Papua Berbentuk Republik.

Dengan tegas Kongres II Papua 2000, menetapkan bahwa pada Hari ini, Sabtu, Tanggal 3, Bulan Juni, Tahun 2000, kami menyatakan : Bendera Nasional Bangsa dan Negara Papua Barat adalah Bintang Fajar (Bintang Kejora) di kibarkan di seluruh Tanah Air Papua Barat sebagai tanah air yang Merdeka dan Berdaulat, serta Tidak dapat di turunkan lagi oleh pihak lain dari bangsa-bangsa beradab di muka bumi

Pernyataan Penolakan Status Politik Bangsa Papua dalam NKRI

A. Pernyataan Terima kasih

1. Kami Rakyat Bangsa Papua melalui Kongres II Papua Barat - 2000 menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah, Bangsa dan Negara Republik Indonesia atas kehidupan bersama selama kurang lebih 38 Tahun lamanya.
2. Kami Rakyat Bangsa Papua melalui Kongres II Papua Barat - 2000 menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Negara-Negara Merdeka dan Lembaga-lembaga Nasional Republik Indonesia maupun Internasional, yakni : Pemerintah dan Parlemen Kerajaan Belanda, Pemerintah dan Parlemen Papua New Guinea, Pemerintah dan Parlemen Australia, Pemerintah Swedia, Vanuatu, Nauru, Parlemen Uni Eropa, Kongres Amerika Serikat, Amnesty Internasional dan Robert Kennedy Foundation.

Ucapan Terima kasih yang sama di sampaikan pula kepada : Dewan Gereja-gereja Se dunia, Dewan Gereja-gereja Papua New Guinea dan Salomon Island, Konfrensi Gereja-gereja Pasifik, Dewan Gereja-gereja di Australia dan Belanda , Gereja-gereja dan Solidaritas Kaum Muslimin di Tanah Air Papua maupun di Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum, KONTRAS dan ELS-HAM baik di Tanah Papua maupun di Indonesia. Ucapan terima kasih yang sama pula di sampaikan kepada : Mahasiswa di seluruh Indonesia dan Solidaritas Paguyuban yang telah membantu memberikan Assylum / Perlindungan Politik kepada Orang-Orang Papua yang terlibat dalam Perjuangan Kemerdekaan Papua dan telah membela Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) bagi Perjuangan Rakyat Bangsa Papua dalam meraih kembali Hak politik atas Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa dan Negara Papua.

B. Pernyataan Penolakan Status Politik

Kami, rakyat Bangsa Papua melalui Kongres II Papua Barat - 2000 menyatakan dengan tegas bahwa kami Mengutuk keras dan karenanya harus dicabut :

1. Invasi Militer Indonesia melalui TRIKORA (Tri Komando Rakyat) 19 Desember 1961 yang telah dengan paksa dan kekerasan menganeksasi Hak Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat Bangsa dan Negara Papua, tanggal 1 Desember 1961.
2. Proses Perumusan dan Penanda-tanganan NEW YORK AGREEMENT tanggal, 15 Agustus 1962.
3. Aneksasi Papua ke dalam Kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tanggal 1 Mei 1963.

4. Methode, Proses dan Hasil Pelaksanaan PEPERA, tanggal, 14 Juli sampai dengan 02 Agustus 1969.
5. Kesepakatan Kontrak Karya PT. FREEPORT INDONESIA Inc. antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 April 1967.
6. Pengesahan hasil PEPERA oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi PBB No. 2504 / XXIV, tanggal 19 November 1969.
7. Semua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tentang Status politik Papua di dalam Negara Kesatuan RI yang akan dibuat oleh Pemerintah Indonesia.
8. Konspirasi Politik yang telah maupun yang akan di bangun antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah lainnya.
9. Semua Perjanjian dan Kesepakatan Nasional serta Internasional tentang Status Politik Papua Barat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1963 sampai dengan saat ini.
10. Menolak dengan tegas segala bentuk OTONOMI yang di tawarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada Rakyat dan Bangsa Papua.

REKOMENDASI-REKOMENDASI

Kami Rakyat Bangsa Papua melalui Kongres II Papua Barat - 2000 merekomendasikan kepada Presidium Dewan Papua untuk segera :

1. Meninjau kembali dan membatalkan isi NEW YORK AGREEMENT tanggal 15 Agustus 1962, serta Hasil Pepera yang dilaksanakan dari tanggal 14 Juli sampai dengan 02 Agustus 1969.
2. Menyatakan bahwa Rakyat Bangsa Papua, Merdeka dan berdaulat penuh di atas tanah leluhurnya, tanah air Papua Barat, mulai hari ini : Sabtu, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2000.
3. Mengibarkan Bendera Nasional Papua *Sang Bintang Fajar (Bintang Kejora)* terhitung mulai tanggal 03 Juni 2000 dan seterusnya serta tidak dapat diturunkan lagi oleh Bangsa lain di muka bumi.
4. Mengagendakan masalah tuntutan pengembalian Hak Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat Bangsa dan Negara Papua 1 Desember 1961 kepada PBB di NEW YORK.
5. Membentuk Tim Independen untuk Dialog Internasional dalam Proses pengembalian Hak Kemerdekaan dan Kedaulatan Negara Rakyat Bangsa Papua, termasuk bantuan Keamanan PBB.

Mewajibkan semua Badan Usaha yang beroperasi di tanah air Papua, serta seluruh Rakyat Papua di Dalam dan di Luar Negeri, juga penduduk di tanah Papua berkewajiban membayar Pajak untuk mendukung proses Perjuangan pengembalian Hak Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat Bangsa dan Negara Papua.

Menyusun kerangka KONSTITUSI Negara Republik Papua.

Menjamin Hak-Hak Sipil (*Property Right*) setiap orang yang berada di tanah air Papua khususnya Hak Hidup kaum Minoritas (Agama dan Etnis nonPapua) sejak Pernyataan ini di keluarkan dan ditetapkan.

Memfungsikan dan memberdayakan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Satuan Tugas (SATGAS) Papua dalam Pengendalian Pertahanan dan Keamanan Nasional Papua.

Merumuskan Bentuk Negara Republik Papua.

Menyelenggarakan DIALOG INTERNASIONAL yang melibatkan Pemerintah Negara RI, Pemerintah Kerajaan Belanda, Pemerintah Amerika Serikat dan PBB sebelum Bulan Agustus 2000.

Melaksanakan Butir-Butir Rekomendasi ini dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Terhadap Perjuangan Rakyat Bangsa Papua sampai dengan batas waktu 30 November 2000 dan Melaporkan serta Mempertanggung Jawabkan Pelaksanaan Rekomendasi Kongres II Papua Barat 2000, selambat-lambatnya Tanggal 1 Desember 2000.

Dirumuskan di : Port Numbay
Pada Tanggal : 02 Juni 2000

KOMISI II BIDANG AGENDA POLITIK

M. YUSUF TANAWANI
Ketua

SEFNATH OHEE
Wakil Ketua I

ALFARIS LA BAGO
Wakil Ketua II

DIAZ GWIJANGGE
Sekretaris I

CORNELES YANUARING
Sekretaris II

TIM PERUMUS KOMISI

CLEMENS RUNAWERI
Ketua

Drs. XAVERIUS T SONGMEN
Wakil Ketua

ALEXANDER DUWIT, SH.
Sekretaris

Dengan 17 orang anggota Tim Perumus Komisi II : Bidang Agenda Politik.

MANIFESTO HAK-HAK DASAR RAKYAT PAPUA

Syukur Bagi-Mu Tuhan

PENDAHULUAN

Sejak dan setelah jatuhnya pemerintahan *Soekarno* (1965) dan diganti oleh pemerintahan *Soeharto* (1967) di bawah slogan Orde Baru, tanah Papua sama sekali tertutup bagi dunia luar. Hasil Pepera (1969) yang curang telah merupakan suatu jangkar yang mempertahankan kekuasaan pemerintahan Indonesia dan memungkinkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mempraktekkan tekanan-tekanan fisik terhadap penduduk pribumi Papua dalam mempertahankan dan melebarkan kekuasaan militer yang sangat kejam dan keji. Tiga puluh delapan tahun lamanya, pemerintah dan militer Indonesia secara kejam melakukan tindakan-tindakan yang sangat bertentangan dengan Hak-hak Dasar Kemanusiaan orang Papua. Kekejamannya bukan saja terhadap soal-soal kemanusiaan tetapi juga termasuk perampokan kekayaan alamnya.

Indonesia berusaha merebut dan mempertahankan tanah Papua hanya karena potensi sumberdaya alam Papua Barat yang berlimpah-limpah. Kenyataan ini diperkuat dengan kata-kata seorang ahli strategi Indonesia yang juga orang terkuat *Soeharto*, Jenderal TNI Ali Murtopo yang bekerja keras demi merebut tanah Papua. Menjelang pelaksanaan Pepera-1969 Ali Murtopo mengatakan "*Jakarta samu sekali tidak tertarik dengan orang Papua, tapi hanya tertarik dengan wilayah Irian Barat*" (*Ottow J : INDONESIA AS A STATE, IS AN ACCIDENT OF THE DUTCH COLONIAL HISTORY, 1998, page 55*).

Era Reformasi merupakan suatu momentum politik yang membawa perubahan baru dimana Hak-hak Dasar, Demokrasi dan Hak-hak Azasi Manusia mulai dikembangkan kembali di seluruh Indonesia.

Berdasarkan tindakan pelanggaran Hak-hak Azasi Manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam hal ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang berlangsung secara sistematis dan rahasia selama hampir 38 tahun terhadap rakyat Papua Barat, maka Komisi IV setelah membahas dan berdiskusi tentang Hak-hak Dasar bangsa Papua, kami temukan berbagai puing-puing kehancuran yang bertebaran di atas tanah Papua sebagai hasil karya keji yang ditinggalkan oleh pemerintah Indonesia, yang

meliputi 4 bidang utama, yakni : (1). Bidang Ekonomi; (2). Bidang Sosial; (3). Bidang Budaya; (4). Bidang Sipil dan Politik.

Puing-puing kehancuran ini merupakan bukti kekejaman yang nyata dari neo-kolonialisme Indonesia yang masih terus berlangsung di tanah Papua sampai saat ini.

BIDANG EKONOMI

Bangsa Papua dikaruniai tanah dan alam yang kaya raya, namun rakyatnya hidup dalam kemiskinan struktural. Hutan, dusun dan laut merupakan pusat penerimaan sumber kehidupan bangsa Papua. Oleh sebab itu untuk menegakkan Hak-hak Dasar Politik Rakyat Papua melalui Bidang Ekonomi, maka bidang Ekonomi di Komisi IV merekomendasikan suatu Gagasan '*Intervensi*' Ekonomi sebagai alat untuk membangun kekuatan rakyat menuju Papua baru yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menolak penjajah dari tanah Papua. Gagasan intervensi dimaksud ialah :

A. Menggalang kekuatan ekonomi Rakyat menuju Papua Baru yang Merdeka, melalui Dewan Presidium Papua dan Lembaga Adat Masyarakat untuk :

1. Mengambilalih semua hasil alam yang ada di tanah Papua melalui konsultasi - renegosiasi dengan semua perusahaan-perusahaan raksasa yang menanamkan sahamnya untuk pengolahan : tambang, HPH, perikanan, gas bumi, flora dan fauna, dan lain-lain yang merupakan hak ulayat rakyat Papua.
2. PT. Freeport serta semua perusahaan raksasa yang sedang beroperasi bahkan yang berniat untuk beroperasi di tanah Papua harus mendapatkan persetujuan dari Lembaga Adat setempat dan harus bertanggungjawab untuk memperbaiki dan memungkinkan ekonomi rakyat Papua berkembang. Pembiayaan sosial untuk semua rakyat Papua di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan dan sandang, gaji dan lain-lain, termasuk membiayai suatu kurikulum pendidikan tentang Papuanisasi di sekolah-sekolah dalam muatan *local system* pendidikan di tanah Papua, mengakomodir seluruh perjuangan bangsa Papua menuju Papua Baru yang Merdeka.
3. Presidium Dewan Papua dengan dukungan Lembaga Masyarakat Adat harus melaksanakan semua tuntutan yang termaktub dalam point a dan b supaya ekonomi rakyat Papua menjadi kuat sebelum sang Fajar Keemasan muncul di ufuk Timur.

Kedua point ini harus menjadi agenda prioritas bagi Presidium Dewan Papua dengan dukungan Lembaga Adat, karena selama ini kekayaan orang Papua tidak pernah dinikmati sebagaimana mestinya oleh orang Papua selaku pemilik dan pewaris tanah Papua.

B. Solusi untuk permasalahan-permasalahan di atas:

1. Presidium Dewan Papua bersama Lembaga Adat harus menetapkan batas waktu kepada Pemerintah Republik Indonesia agar menghentikan campur tangan terhadap Sumber-sumber Daya Alam bangsa Papua, seperti : *Tambang PT. Free Port; Minyak di Sorong; HPH di seluruh tanah Papua serta Ikan dan hasil laut lainnya.*
2. Presidium Dewan Papua dan semua perusahaan-perusahaan asing yang menanam sahamnya di tanah Papua harus duduk bersama-sama untuk mencari satu solusi terbaik tentang 'kekuatan ekonomi' rakyat Papua menuju Papua Barat Merdeka.
3. Presidium Dewan Papua dan Lembaga Masyarakat Adat supaya segera menghentikan praktek jual-beli hak-hak tanah adat yang sama sekali tidak menolong masyarakat kecil yang miskin, bahkan merupakan proses pemiskinan. Di alam Papua Barat Pasca Kongres sampai Merdeka nanti, praktek jual-beli dari dan oleh orang asing harus didasarkan atas persetujuan dan peraturan dari orang Papua.

BIDANG SOSIAL

A. Pendidikan

Bantuan pendidikan '*loso dan moso*' yang dirusak oleh sistem pendidikan Indonesia dengan memasukkan model-model sekolah Negeri, Kurikulum sentralistik Indonesia yang tidak sesuai dengan budaya dan kondisi geografis tanah Papua serta Metode Pengajaran yang tidak sesuai dengan kondisi Masyarakat Papua. Pendidikan berpola Asrama yang sudah terbukti kualitasnya sejak zaman Belanda dihilangkan oleh pemerintahan Indonesia demi nasionalisasi sistem pendidikan Indonesia yang membuat orang Papua semakin kehilangan identitas. Demikian pula penghapusan status sekolah swasta (YPK dan YPPK, menyusul YAPIS) menjadi sekolah-sekolah negeri dan Inpres yang ternyata cuma mengejar target fisik / jumlah sekolah yang sekaligus menghancurkan proses dan mutu.

Jenis pendidikan sekolah kejuruan dihapus oleh pemerintah Indonesia misalnya Sekolah Gadis di Serui, Sorong dan Genyem, termasuk Sekolah Pendidikan Guru Agama Kristen dan Katolik, Sekolah Pelayaran, STM YPK Kotaraja, Sekolah Pertanian (landbouw) di Manokwari. Sistem dan kurikulum pendidikan Indonesia di tanah Papua harus dirobah secara total sebab sangat tidak sesuai/relevant dengan kepribadian bangsa Papua.

B. Kesehatan

Adanya program Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu usaha yang diatur secara rahasia dan sistematis untuk membatasi bertambahnya penduduk Papua. Selain itu, tempat-tempat pelacuran dan night-club juga diperluas di mana-mana di tanah Papua yang sebenarnya merupakan pusat-pusat penyebaran penyakit-penyakit kelamin yang sangat berbahaya terhadap orang Papua. Pelayanan seks secara komersial, seperti yang terjadi di Sarmi dan di Merauke, dilaksanakan dengan cara penukaran kayu gaharu. Pemasukkan minuman keras berbagai merek adalah juga bertujuan untuk merusak generasi muda Papua. Rumah-rumah Sakit yang pernah berkembang di tanah Papua sebelum masuknya Indonesia, ditutup dan mengakibatkan terjadinya permasalahan kesehatan di daerah-daerah.

C. Kependudukan

Program Transmigrasi banyak merugikan tanah-tanah adat masyarakat Papua. Disamping program Transmigrasi yang diatur oleh Negara, ada juga transmigran-transmigran spontan, gelap dan pengungsi yang berduyun-duyun memasuki dan menduduki tanah-tanah adat orang Papua tanpa menghormati hak-hak dasar atau hak-hak ulayat. Transmigrasi dengan Pola Trans-PIR dan Akad adalah contoh konspirasi Pemerintah dan Swasta Nasional Indonesia untuk memiskinkan rakyat Papua. Dengan pola transmigrasi, pemerintah Indonesia memaksa rakyat Papua meninggalkan kampung halaman dan tanah ulayatnya dengan dalih perbaikan hidup. Padahal secara sosio-politis model ini membuat orang Papua tercerabut dari basis ulayat dan meninggalkan hak-hak dasar atas tanah, hutan dan sumber daya alam. Kemudian oleh Negara diklaim sebagai kawasan tak bertuan. Sangat mengherankan, orang Papua yang mulanya hidup bebas di atas tanah dan hak-hak adatnya, dipaksa menjadi Trans-lokal, menjadi hamba dari pemodal asing dan kuli dari perusahaan PIR yang hakekatnya sama dengan kolonisasi.

B U D A Y A

Komisi IV mendesak Kongres Papua II dan Presidium Dewan Papua agar merekomendasikan pemakaian Bahasa Ibu (bahasa daerah suku-suku di Papua) dikembangkan supaya tidak musnah, tetapi juga supaya setiap anak Papua tidak mengalami krisis identitas dan bisa berdiri tegak di atas harkat budaya leluhurnya. Bahasa Melayu dengan dialek khas Papua dapat terus digunakan sebagai bahasa pengantar sementara (bahasa nasional bangsa Papua).

Kesenian yang meliputi keahlian mengukir dan lagu-lagu daerah serta busana dan tarian-tarian adat Papua supaya dilestarikan dan dipertahankan. Agama adat supaya digali dan dikembangkan kembali sebagaimana aslinya, disamping Agama Kristen (Protestan dan Katolik) serta Muslim di tanah Papua.

Makanan khas orang Papua (sagu dan ubi). Rumah adat suku-suku di tanah Papua harus menjadi model rancangan pembangunan perumahan atau fasilitas umum lainnya yang ada di 14 Kabupaten / Kotamadya. Pembangunannya harus sesuai dengan budaya dan motif dari daerah setempat. Contoh : Rumah Adat *Karwari* di Biak - Numfor, *Karapai* di Kamoro - Mimika dan lain-lain.

Hak-hak adat di seluruh tanah Papua harus dikembalikan kepada masyarakat adat setempat yang akan menjaga dan melestarikannya menuju Papua Baru yang Merdeka. Kami bangsa Papua akan tetap mempertahankan hak budaya bangsa kami lewat tanah, hutan dan laut untuk kepentingan adat itu sendiri dan menghadapkan ke PBB dengan rumah dan bangunan adatnya.

Bahwa kami Bangsa Papua melarang keras eksploitasi sumberdaya alam untuk kepentingan bangsa lain dan atau yang dikelola berdasarkan peraturan perusahaan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.

Kongres Papua agar menugaskan Presidium Dewan Papua untuk membatalkan semua LMA buatan pemerintah Indonesia yang tidak mencerminkan budaya Rakyat Papua.

LMA buatan pemerintah Indonesia dinyatakan gugur demi hukum sebab seharusnya LMA itu dibentuk oleh masyarakat adat Papua setempat dengan Surat Keputusan Pemerintah dasar adat hukum setempat (Papua), bukan dengan Surat Keputusan Pemerintah Indonesia yang selama ini ternyata hanya dipakai untuk mengesahkan perampasan hak-hak adat orang Papua. Dengan demikian untuk memperjuangkan bangsa Papua Barat Merdeka, masyarakat Papua seluruhnya bernaung di bawah payung Lembaga Adat yang benar-benar dikukuhkan oleh masyarakat dan hukum adat masyarakat Papua Barat.

Kongres Papua supaya membatalkan nama-nama jalan, desa, kantor-kantor, lambang pemerintah daerah Papua serta nama-nama lain yang memakai nama-nama budaya bangsa Indonesia. Seluruh identitas di Papua harus dikembalikan kepada harkat, kebudayaan dan martabat bangsa Papua.

Harus ada proteksi khusus bagi prosedur pengembangan Sumber Daya Alam di tanah Papua baik di lingkungan pendidikan dan struktural secara memadai. Lagu-lagu daerah Papua supaya dilestarikan kembali dalam rangka memperkaya dan memperhankankan identitas orang Papua sebagai suatu bangsa yang bermartabat.

HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Bahwa kini telah tiba saatnya bagi bangsa Papua Barat untuk keluar dari NKRI dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di muka karena :

1. Bahwa bangsa Papua Barat tidak diikuti-sertakan di dalam perundingan maupun penanda tangan Perjanjian New York sebagai ahli waris tanah dan wilayah Papua Barat yang dipersengketakan oleh Indonesia dan Belanda. Indonesia dan Belanda bukan subyek hukum atas tanah dan negeri Papua. Karena itu, perjanjian mengenai status politik bangsa dan tanah Papua yang dibuat oleh Indonesia dan Belanda harus dinyatakan gugur demi hukum dan peradaban politik internasional.
2. Hasil Pepera yang telah diadakan di Irian Barat pada tanggal 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969 di bawah pengawasan dan tanggungjawab Perserikatan Bangsa Bangsa adalah proses politik yang cacat hukum karena penuh intimidasi dan tekanan di bawah todongan laras senjata, harta dan wanita yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersama TNI dan POLRI. Karena itu proses Pepera dan hasil-hasilnya harus di tinjau ulang dan segera di cabut dan dinyatakan batal demi hukum.
3. Indonesia sama sekali tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengklaim wilayah Papua Barat sebagai bagian integral dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Integrasi wilayah Papua Barat kedalam NKRI, tidak pernah diundangkan didalam lembaran negara Republik Indonesia sejak tahun 1963 sampai dengan hari ini dan tidak pernah di tetapkan dalam suatu ketetapan MPRS atau MPR-RI.
5. Mukadimah UUD RI 1945 alinea pertama memuat jiwa hak atas kemerdekaan.
6. Mukadimah deklarasi HAM sedunia bagian 1 fasal 1 ayat 1,2 dan 3 tanggal 16 Desember 1966.
7. Piagam PBB 1514 no. 8.
8. Deklarasi Viena 1993 tentang hak penentuan nasib sendiri (pidato mantan presiden RI, Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie, 25 Juni 1998 pukul 10.00 WIB).
9. Deklarasi konvensi ILO 1969 tentang Hak-hak Masyarakat Adat.
10. Indonesia telah menghapus berbagai instrumen-instrumen internasional yang mengatur tentang pemberian kemerdekaan bagi setiap suku bangsa yang masih di jajah termasuk Papua Barat.

11. Berbagai tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI dan POLRI secara sistematis (penembakan secara brutal pembantaian dan pemerkosaan secara keji dan tidak manusiawi) sudah merupakan crime against humanity dan pembantaian etnis. Praktek ini sudah menjadi bukti bahwa Papua bukan saudara sebangsa dengan Indonesia, sehingga selalu dibantai seperti binatang.
12. Perampasan tanah-tanah adat tanpa prosedur hukum adat yang jelas dari masyarakat sebagai pewaris tanah adat itu sendiri adalah wujud perampasan hak dan pemiskinan secara struktural.
13. Gereja-gereja Kristen di tanah Papua harus mencabut keanggotaannya dari Dewan Gereja Indonesia dan menghubungkan dirinya dengan Dewan-dewan Gereja Sedunia dan Dewan-dewan Gereja Pasifik. Gereja-gereja Katolik di tanah Papua harus keluar dari Konferensi Wali Gereja (KWI) di Jakarta. Gereja-gereja Katolik di tanah Papua secara hirarki berada dibawah Gereja-gereja Katolik Sedunia di Roma. Demikian pula Kaum Muslimin Papua harus mencabut diri dan segera keluar dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan selanjutnya mendaftarkan diri dan keanggotaanya di Rabitah al Alam al Islami.

Berdasarkan tindakan-tindakan keji yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia , TNI dan POLRI terhadap orang Papua, namun tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada sejarah, hukum dan kemanusiaan sampai hari ini, maka tidak ada pilihan lain bagi bangsa Papua Barat hanyalah satu-satunya pilihan, yakni : Republik Indonesia harus keluar dan berpisah dari bangsa Papua Barat dan membiarkan bangsa Papua Barat menata diri menuju masa depannya sebagai bangsa yang Merdeka, Berdaulat, Beriman dan Bermartabat. Jika tidak, maka bangsa Papua akan terus teracam, mati dan punah, karena Indonesia tidak pernah menginginkan manusia Papua, tetapi hanya tertarik dengan tanah dan sumberdaya alam Papua yang kaya raya.

Pengalaman hidup bangsa Papua selama 38 tahun menunjukkan secara pasti bahwa Integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah Integrasi sebagai Bangsa, melainkan integrasi kapital / kekayaan. Kami orang Papua dari ras Melanesia, Engkau orang Indonesia dari ras Melayu. Sejak kita diciptakan, Tuhan Yang Maha Kuasa telah menetapkan bahwa kodrat kita berbeda. Berbeda untuk saling kenal mengenal (berada), bukan untuk saling memiliki dan menguasai.

RESOLUSI

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-hak Azasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa Desember 1948, Alinea I Mukadimah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 1514 (XV) 14 Desember 1960 mengenai jaminan pemberian kemerdekaan kepada rakyat dan wilayah-wilayah jajahan, Manifesto Politik Komite Nasional Papua tanggal 19 Oktober 1961, pengakuan Presiden Soekarno atas keberadaan Negara Papua Barat yang tercetus melalui Tri Komando Rakyat tanggal 19 Desember 1961, Surat Kongres Amerika Serikat tanggal 22 Mei 1998, Pernyataan Tim 100 Masyarakat Papua Barat pada tanggal 26 Februari 1999 kepada Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya, dan hasil-hasil Kongres II Papua Juni 2000 terutama keinginan kuat dari seluruh rakyat dan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka rakyat bangsa Papua melalui Kongres II Papua 2000 menegaskan kepada Indonesia dan bangsa-bangsa di seluruh dunia, bahwa:

1. Bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961.
2. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak New York Agreement 1962 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak melibatkan wakil-wakil bangsa Papua.
3. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak hasil-hasil Pepera karena dilaksanakan di bawah ancaman, intimidasi, pembunuhan sadis, kekerasan militer dan perbuatan-perbuatan amoral di luar batas-batas perikemanusiaan. Karena itu Bangsa Papua menuntut PBB untuk mencabut Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 Desember 1969.
4. Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa Bangsa harus mengakui hak politik dan kedaulatan Bangsa Papua Barat yang sah berdasarkan kajian sejarah, hukum dan sosial budaya.
5. Kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat yang terjadi sebagai akibat dari konspirasi politik internasional yang melibatkan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-bangsa, harus diusut tuntas dan pelaku-pelakunya diadili di pengadilan internasional.

MARI KITA MELURUSKAN SEJARAH PAPUA BARAT

6. Perserikatan Bangsa Bangsa, Amerika Serikat, dan Belanda agar meninjau kembali keterlibatan mereka dalam proses aneksasi Indonesia, atas Papua Barat dan menyampaikan hasil-hasilnya secara jujur, adil dan benar kepada rakyat Papua 1 Desember 2000.

Proses perundingan politik untuk penyelesaian masalah-masalah di atas dilakukan secara jujur, damai, dan demokratis berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

Rakyat Papua melalui Kongres II memberi mandat sepenuhnya kepada Presidium Dewan Papua untuk:

1. Memperjuangkan pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan Papua Barat serta pengusutan dan pengadilan para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat.
2. Segera membentuk suatu Tim Independen yang akan melakukan perundingan damai dengan Indonesia dan Belanda di bawah pengawasan PBB untuk suatu referendum pengakuan kedaulatan rakyat dan Bangsa Papua.
3. Mengupayakan sumber-sumber yang tersedia di tanah Papua yang tidak bersifat mengikat untuk membiayai pencapaian tujuan perjuangan.
4. Melalui Panel Kongres II, rakyat Papua Barat memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presidium Dewan Papua.
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagaimana termaktub di atas pada tanggal 1 Desember 2000.

Penyelesaian masalah status politik Papua Barat secara adil dan demokratis harus dilakukan antara wakil-wakil sah Bangsa Papua dengan pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-bangsa.

MARI KITA MELURUSKAN SEJARAH PAPUA BARAT

Berdasarkan pengalaman bangsa Papua selama 38 tahun hidup dibawah penindasan dan kekerasan pemerintah Republik Indonesia, maka Kongres II Papua 2000 menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-bangsa dan masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi bangsa Papua.

Kongres II Papua 2000 menyerukan kepada rakyat Papua untuk menghargai dan menjamin hak-hak sipil setiap penduduk tanah Papua, termasuk kaum minoritas. Selain itu, Kongres II Papua Barat juga menyerukan kepada rakyat Papua untuk bersifat ramah dan mendukung kegiatan investasi di tanah Papua sepanjang kegiatan investasi tersebut memenuhi hak-hak pemilik adat dan ramah terhadap lingkungan dan kebudayaan masyarakat Papua.

Resolusi ini secara benar dan sungguh-sungguh dibuat dalam kongres Papua 2000 yang melibatkan 501 orang perwakilan sah masyarakat Papua Barat dari seluruh penjuru Tanah Papua dan luar negeri, serta dihadiri pula oleh 21.000 orang Papua dan non-Papua. Kongres ini merupakan wahana demokrasi tertinggi rakyat Papua, dan dengan demikian merupakan satu-satunya instansi pengambilan keputusan politik Bangsa Papua yang sah.

Kongres Papua 2000 menegaskan sekali lagi kepada bangsa-bangsa dunia bahwa berdasarkan Kajian Pelurusan Sejarah, bangsa Papua sudah merdeka sejak 1 Desember 1961. Merdeka! Merdeka!

Resolusi ini secara resmi disampaikan dengan hormat kepada kepada Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Belanda, Pemerintah Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa Bangsa serta Bangsa-bangsa dan masyarakat dunia.

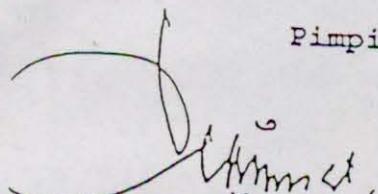
KONGRES PAPUA

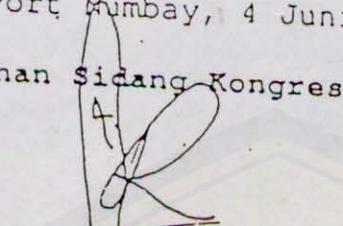
MARI KITA MELURUSKAN SEJARAH PAPUA BARAT

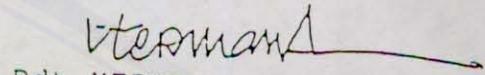
Syukur BagiMu Tuhan

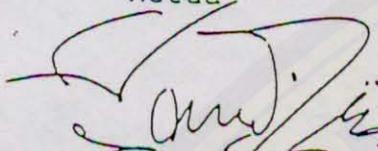
Port Mumbay, 4 Juni 2000

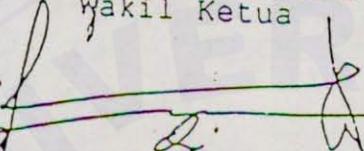
Pimpinan Sidang Kongres II Papua,

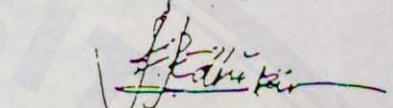

TRAHA M. ALHAMID
Ketua

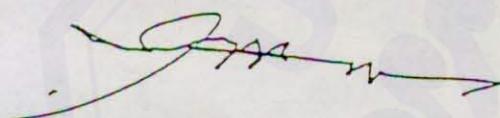

Tt. ARONGGEAR, S.E
Wakil Ketua

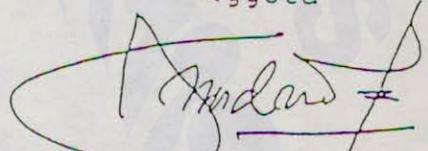

Pdt. HERMAN AWOM, S.Th
Sekertaris


FRANZALBERT JORA
Anggota


DECKY WANGGIN, B.A
Anggota


Dra. FERA KAMBU
Anggota


SAM MANAMI SATIA
Anggota


ADOLOF FONATABA
Anggota

JEMBER

MARI KITA MELURUSKAN SEJARAH PAPUA BARAT

Berdasarkan pengalaman bangsa Papua selama 38 tahun hidup dibawah penindasan dan kekerasan pemerintah Republik Indonesia, maka Kongres II Papua 2000 menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-bangsa dan masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi bangsa Papua.

Kongres II Papua 2000 menyerukan kepada rakyat Papua untuk menghargai dan menjamin hak-hak sipil setiap penduduk tanah Papua, termasuk kaum minoritas. Selain itu, Kongres II Papua Barat juga menyerukan kepada rakyat Papua untuk bersifat ramah dan mendukung kegiatan investasi di tanah Papua sepanjang kegiatan investasi tersebut memenuhi hak-hak pemilik adat dan ramah terhadap lingkungan dan kebudayaan masyarakat Papua.

Resolusi ini secara benar dan sungguh-sungguh dibuat dalam kongres Papua 2000 yang melibatkan 501 orang perwakilan sah masyarakat Papua Barat dari seluruh penjuru Tanah Papua dan luar negeri, serta dihadiri pula oleh 21.000 orang Papua dan non-Papua. Kongres ini merupakan wahana demokrasi tertinggi rakyat Papua, dan dengan demikian merupakan satu-satunya instansi pengambilan keputusan politik Bangsa Papua yang sah.

Kongres Papua 2000 menegaskan sekali lagi kepada bangsa-bangsa dunia bahwa berdasarkan Kajian Pelurusan Sejarah, bangsa Papua sudah merdeka sejak 1 Desember 1961. Merdeka! Merdeka!

Resolusi ini secara resmi disampaikan dengan hormat kepada kepada Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Belanda, Pemerintah Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa Bangsa serta Bangsa-bangsa dan masyarakat dunia.

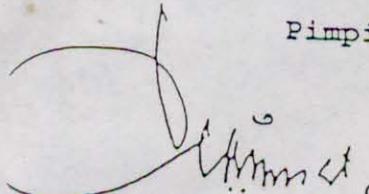
KONGRES PAPUA

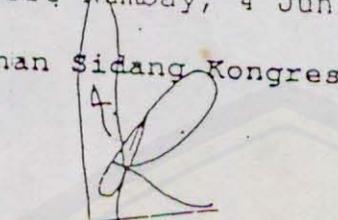
MARI KITA MELURUSKAN SEJARAH PAPUA BARAT

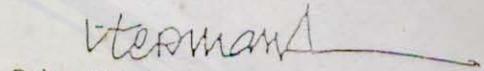
Syukur BagiMu Tuhan

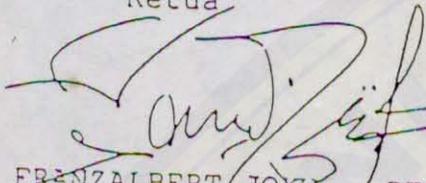
Port Mumbay, 4 Juni 2000

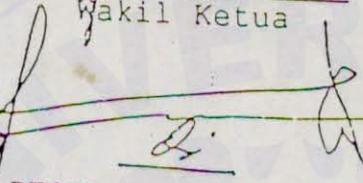
Pimpinan Sidang Kongres II Papua,

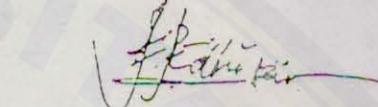

TRAHA M. ALHAMID
Ketua


Tt. ARONGGEAR, S.E
Wakil Ketua

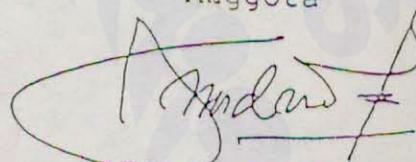

Pdt. HERMAN AWOM, S.Th
Sekertaris


FRANZALBERT JOKI
Anggota


DECKY WANGGIN, B.A
Anggota


Dra. FERA KAMBU
Anggota


SAM MANAMI SATIA
Anggota


ADOLOF FONATABA
Anggota

